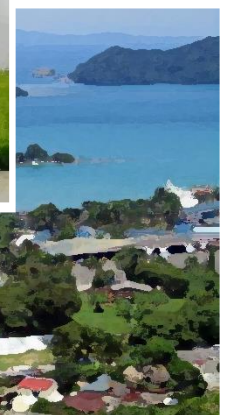




KABUPATEN LAMPUNG SELATAN



GRAND DESIGN PEMBANGUNAN KEPENDUDUKAN (GDPK) KABUPATEN LAMPUNG SELATAN TAHUN 2021-2035

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	i
DAFTAR GAMBAR	v
DAFTAR TABEL	vii
BAB 1 PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Landasan Hukum	5
1.3. Kondisi Saat Ini	7
1.4. Kondisi Yang Diharapkan	14
1.5. Permasalahan	16
1.6. Sistematika Penyusunan GDPK	17
BAB 2 VISI MISI TUJUAN DAN SASARAN	18
2.1. Visi	18
2.2. Misi	18
2.3. Tujuan	19
2.4. Sasaran Umum	20
2.5. Strategi Pelaksanaan	20
2.6. Alur Pikir	21
BAB 3 PENGENDALIAN KUANTITAS PENDUDUK	22
3.1. Pengendalian Fertilitas	22
3.1.1. Pengembangan Fertilitas	22
3.1.2. Strategi	26
3.1.3. Program	26
3.2. Penurunan Mortalitas	27
3.2.1 Angka Kematian Bayi (AKB)	27
3.2.2 Angka Kematian Ibu (AKI)	28
3.2.3. Strategi	30

3.2.4. Program	30
BAB 4 KUALITAS PENDUDUK	31
4.1. Dimensi Pendidikan.....	32
4.1.1 Perkembangan Pendidikan	33
4.1.2 Angka Melek huruf.....	33
4.1.3 Angka Harapan Lama Sekolah dan Rata-rata Lama Sekolah.....	34
4.1.4 Angka Partisipasi Kasar (APK).....	36
4.1.5 Angka Partisipasi Murni (APM)	37
4.1.6 Angka Partisipasi Sekolah (APS)	39
4.1.7 Strategi Perkembangan Pendidikan.....	40
4.1.8 Program Perkembangan Pendidikan.....	41
4.2. Dimensi Kesehatan	41
4.2.1. Perkembangan Kesehatan.....	42
4.2.2. Stunting	44
4.2.3. Persentase Berat Badan Bayi Lahir Rendah (BBLR)	45
4.2.4. Angka Kematian Bayi (AKB)	47
4.2.5. Angka Kematian Ibu (AKI)	48
4.2.6. Angka Harapan Hidup (AHH)	50
4.2.7. Penderita Penyakit Menular	51
4.2.8. Strategi Perkembangan Kesehatan	52
4.2.9. Program Perkembangan Kesehatan	53
4.3. Dimensi Ekonomi.....	54
4.3.1. Perkembangan Perekonomian.....	54
4.3.2. Perkembangan Kemiskinan dan Tingkat Pengangguran	62
4.3.2. Strategi Perkembangan Ekonomi	66
4.3.3. Program Perkembangan Ekonomi	67
4.4. Pembangunan Manusia dan Produktivitas.....	68
4.4.1. Perkembangan Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	69
4.4.2. Produktivitas Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)	71
4.4.3. Strategi Perkembangan Manusia dan Produktivitas.....	72

4.4.4. Program Perkembangan Manusia dan Produktivitas.....	72
BAB 5 PEMBANGUNAN KELUARGA GRAND DESIGN PEMBANGUNAN KEPENDUDUKAN (GDPK) KABUPATEN LAMPUNG SELATAN 2021 - 2035	73
5.1. Kebijakan Pembangunan	73
5.2. Pembangunan Keluarga di Kabupaten Lampung Selatan.....	74
5.2.1. Perkembangan Pembangunan Keluarga dari Dimensi Sosial/ Budaya	74
5.3. Permasalahan Pembangunan Keluarga	80
5.4. Tujuan, Sasaran, dan Strategi Kebijakan Pembangunan Keluarga	81
5.5. Program Perkembangan Keluarga.....	82
5.6. Kondisi Yang Diinginkan Pada Pembangunan Keluarga	82
BAB 6 PENATAAN PERSEBARAN DAN PENGARAHAN MOBILITAS PENDUDUK	84
6.1. Kondisi Saat Ini	84
6.1.1. Persebaran atau Distribusi Penduduk	84
6.1.2. Penataan Mobilitas Penduduk.....	87
6.2. Intervensi.....	90
6.2.1. Strategi Intervensi.....	90
6.2.2. Program Penataan Persebaran dan Mobilitas Penduduk.....	91
6.3. Kondisi Yang Diinginkan	91
BAB 7 PENATAAN ADMINISTRASI PENDUDUK	93
7.1. Kondisi Saat Ini	93
7.1.1. Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil.....	93
7.2. Permasalahan dan Intervensi Penataan Administrasi Kependudukan	99
7.3. Tujuan , Sasaran, Strategi, dan Arah Kebijakan Penataan Administrasi Kependudukan.....	100
7.4. Program Penataan Administrasi Kependudukan	101
7.5. Kondisi Yang Diinginkan Pada Penataan Administrasi Kependudukan 101	
BAB 8 ROADMAP GDPK KABUPATEN LAMPUNG SELATAN	102

8.1. Roadmap Kuantitas Penduduk 2021 – 2035	102
8.2. Sasaran Lima Tahun Pembangunan Kependudukan.....	103
8.3. Keterkaitan GDPK dengan RPJMD	149
PENUTUP	151

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Piramida Penduduk Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2021	11
Gambar 2. Alur Pikir Pembentukan GDPK	21
Gambar 3. TFR 2018 - 2022	22
Gambar 4. Angka Kelahiran Remaja Perempuan Usia 15 - 19 Tahun	24
Gambar 5. Penggunaan CPR Perempuan Usia 15 - 49 Tahun	25
Gambar 6. Kondisi Angka Kematian Bayi pada Kabupaten Lampung Selatan tahun 2017-2021	27
Gambar 7. Kondisi Angka Kematian Ibu pada Kabupaten Lampung Selatan tahun 2017-2021	29
Gambar 8. Perkembangan Harapan Lama Sekolah (HLS) dan Rata-rata Lama Sekolah (RLS) di Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2017-2021	35
Gambar 9. Perkembangan Angka Partisipasi Kasar (APK) menurut Jenjang Pendidikan di Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2017-2021	37
Gambar 10. Perkembangan Angka Partisipasi Murni (APM) menurut Jenjang Pendidikan di Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2017-2021	38
Gambar 11. Perkembangan Angka Partisipasi Sekolah (APS) menurut Jenjang Pendidikan di Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2017-2021	40
Gambar 12. Perkembangan Balita Gizi Buruk Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2017-2021	43
Gambar 13. Perkembangan Berat Badan Lahir Rendah (BBLR) Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2018-2022	46
Gambar 14. Kondisi Angka Kematian Bayi pada Kabupaten Lampung Selatan tahun 2017-2021	48
Gambar 15. Kondisi Angka Kematian Ibu pada Kabupaten Lampung Selatan tahun 2017-2021	49
Gambar 16. Perkembangan Angka Harapan Hidup (AHH) Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2017-2021	50
Gambar 17. Nilai rata-rata Kontribusi Sektorial PDRB ADHK Kabupaten Lampung Selatan tahun 2017-2021	56
Gambar 18. Nilai rata-rata Kontribusi Sektorial PDRB ADHB Kabupaten Lampung Selatan tahun 2017-2021	56
Gambar 19. Perkembangan Pertumbuhan Ekonomi Kab Lampung Selatan, Prov Lampung dan Nasional Tahun 2017-2021	60
Gambar 20. Perkembangan Inflasi Kab Lampung Selatan, Prov Lampung dan Nasional Tahun 2017-2021	61
Gambar 21. Kondisi Garis Kemiskinan Kabupaten Lampung Selatan 2017-2021 ...	62

Gambar 22.	Kondisi Jumlah Penduduk Miskin Kabupaten Lampung Selatan 2017-2021	63
Gambar 23.	Kondisi Rata-rata Persentase Penduduk miskin 15 Kabupaten Kota Selatan 2017-2021	64
Gambar 24.	Kondisi tingkat pengangguran terbuka (TPT) Kab Lampung Selatan, Prov Lampung dan Nasional tahun 2017-2021	65
Gambar 25.	Kondisi Rata-rata Tingkat Pengangguran Terbuka 15 Kabupaten Kota Selatan 2017-2021	66
Gambar 26.	Kondisi rata-rata modal manusia Provinsi Lampung, Nasional dan Kabupaten Lampung Selatan tahun 2017-2021.....	69
Gambar 27.	Perkembangan TPAK Provinsi Lampung dan Kabupaten Lampung Selatan tahun 2017-2021	71
Gambar 28.	Jumlah Kasus Kekerasan terhadap anak dan perempuan Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2017-2021.....	79
Gambar 29.	Persentase Jumlah Penduduk berdasarkan Kecamatan di Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2022.....	86
Gambar 30.	Road Map Kuantitas Penduduk Tahun 2021 – 2035.....	115
Gambar 31.	Road Map Kualitas Penduduk Tahun 2021 – 2035.....	130
Gambar 32.	Road Map Pembangunan Keluarga Tahun 2021 – 2035.....	139
Gambar 33.	Road Map Penataan dan Pengarahan Mobilitas Penduduk Tahun 2021 – 2035.....	145
Gambar 34.	Road Map Perbaikan dan Peningkatan Tata Kelola dan Layanan Administrasi Kependudukan Tahun 2021 – 2035	149

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Jumlah Penduduk, Laju Pertumbuhan Penduduk Menurut Kecamatan Tahun 2017-2021.....	8
Tabel 2. Jumlah, Distribusi, Dan Kepadatan Penduduk Kabupaten Lampung Selatan Menurut Kecamatan Tahun 2021	9
Tabel 3. Jumlah Penduduk Kabupaten Lampung Selatan Berdasarkan Jenis Kelamin Dan Kelompok Umur Tahun 2021	10
Tabel 4. Perkembangan Dependency Ratio Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2017-2021.....	13
Tabel 5. Jumlah Penduduk dan Dependency Ratio Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2012 Dan 2022	13
Tabel 6. Persentase Penduduk Berumur 15 Tahun ke Atas yang Melek Huruf Menurut Kelompok Umur	34
Tabel 7. Desa Lokus Stunting Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2020-2022	44
Tabel 8. Jumlah Penderita Penyakit Menular Tahun 2017-2021	51
Tabel 9. Perkembangan PDRB Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2017-2021	55
Tabel 10. Perkembangan PDRB Perkapita Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2017-2021	58
Tabel 11. PDRB ADHB dan ADHK (Juta Rupiah) Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2017–2021 menurut Jenis Pengeluaran.....	59
Tabel 12. Faktor pembentuk IPM Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2017-2021 .	70
Tabel 13. Distribusi dan Kepadatan penduduk kabupaten Lampung Selatan berdasarkan kecamatan tahun 2021.....	85
Tabel 14. Perkembangan Migrasi Kabupaten Lampung Selatan berdasarkan kecamatan tahun 2022	88
Tabel 15. Perkembangan Persentase Penduduk yang Memiliki KTP-el, Akta Kelahiran, dan Kartu Keluarga di Kabupaten Lampung Selatan	95
Tabel 16. Perkembangan Jumlah Penduduk Wajib KTP Menurut Kecamatan di Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2022	96
Tabel 17. Perkembangan Jumlah Penduduk Cetak Akta Kematian Menurut Kecamatan di Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2022	98
Tabel 18. Roadmap Kualitas Penduduk 2021-2035.....	116
Tabel 19. Road Map Kualitas Penduduk Tahun 2021 – 2035 Kabupaten Lampung Selatan	130

Tabel 20. Roadmap Pembangunan Keluarga Tahun 2021-2035	131
Tabel 21. Roadmap Penataan dan Pengarahan Mobilitas Penduduk	140

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Dalam konteks pembangunan yang berpusat pada penduduk (*people-centered development*), tersusunnya Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) berupa rumusan perencanaan pembangunan kependudukan yang mencakup upaya peningkatan kuantitas dan kualitas penduduk, penataan persebaran dan pengarahan mobilitas penduduk serta administrasi kependudukan menjadi hal yang mutlak dibutuhkan bagi para pengelola maupun pemangku kepentingan/pemerintah guna menyinkronisasi dan mengintegrasikan kebijakan, sasaran dan program dalam perencanaan pembangunan agar sesuai dengan situasi kependudukan di wilayah. Artinya, GDPK dapat dijadikan acuan atau setidaknya menjadi bahan pertimbangan dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) baik yang bersifat *influence policy* maupun *responsive policy* terhadap dinamika kependudukan di daerah. Pemerintah telah memberikan arah kebijakan dari isu dan permasalahan kependudukan melalui Perpes No. 153 Tahun 2014 tentang Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) untuk memperkuat koordinasi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, Lima Aspek GDPK:

1. Pengendalian Kuantitas Penduduk
2. Peningkatan Kualitas Penduduk
3. Pembangunan Keluarga
4. Penataan persebaran dan pengarahan mobilitas penduduk
5. Penataan administrasi kependudukan.

Representasi 5 aspek tersebut akan membawa kepada tujuan Sumber Daya Manusia (SDM) Berkualitas dan Berdaya Saing sebagai faktor penting dalam mencapai kemajuan bangsa terutama dalam pembangunan kependudukan dan akan membentuk *Social Wellbeing*. Kita tentu sangat menyadari bahwa pembangunan di berbagai bidang tidaklah berdiri sendiri, melainkan bertumpu pada aspek kependudukan. Hal ini terjadi karena sebuah negara terbentuk oleh tiga pilar utama, yakni wilayah, penduduk dan pemerintahan. Sehingga pengabaian terhadap aspek kependudukan, sama saja artinya dengan pengabaian pilar utama terbentuknya sebuah negara. Apalagi pembangunan itu sendiri pada prinsipnya sebagai suatu proses perubahan yang berlangsung terus menerus dan bertujuan meningkatkan kesejahteraan penduduk. Dengan demikian, penduduk harus menjadi titik sentral. Artinya, dalam pembangunan apapun, harus menjadikan situasi kependudukan sebagai asumsi dasar dan pijakan utama untuk mengambil keputusan, termasuk menetapkan regulasi.

Laju pertumbuhan penduduk usia produktif menunjukkan bahwa Indonesia telah mengalami transisi demografi yang telah menghasilkan bonus demografi. Bonus demografis atau hadiah demografis berarti bahwa manfaat ekonomi disebabkan oleh penurunan rasio ketergantungan sebagai akibat dari pengurangan dalam proses kesuburan jangka panjang. Menurut (Goujon, 2006), transisi demografis adalah konsep yang dikembangkan untuk menunjukkan perjalanan demografis populasi dari status masyarakat tradisional di mana kesuburan dan kematian tingkat tinggi ke status masyarakat modern, di mana tingkat kesuburan dan kematian rendah. Secara umum dipahami bahwa bonus demografi terjadi pada keadaan jumlah penduduk usia produktif lebih banyak dibandingkan dengan jumlah penduduk usia nonproduktif atau rasio ketergantungan di bawah 50. Artinya, indikator ketergantungan di bawah 50 persen merupakan indikator bonus demografi (jumlah kelompok usia produktif lebih tinggi dari jumlah kelompok usia nonproduktif).

Peningkatan kualitas SDM harus dilakukan secara sistematis dan berkelanjutan, dengan memanfaatkan peluang dan potensi terjadinya bonus demografi. Bonus demografi ini tidak secara otomatis dapat dinikmati, apalagi bonus demografi tidak dimanfaatkan dan dikelola secara baik. Oleh karena itu harus ada arah kebijakan dan strategi yang tepat dan berkelanjutan, terutama terkait dengan: 1) Peningkatan kesehatan (*health improvement*); 2) pendidikan dan pengembangan keterampilan; 3) pengendalian laju pertumbuhan melalui Keluarga Berencana; dan 4) kebijakan ekonomi yang mendukung fleksibilitas tenaga kerja dan pasar tenaga kerja (*labor market*), keterbukaan perdagangan dan tabungan.

Menurut Prof. Dr. John Beddington (2010) ”menjelang tahun 2030, akibat dari perubahan iklim dan ledakan penduduk, akan terjadi kelangkaan pangan, air, dan energi yang luar biasa yang akan memicu kerusuhan sosial dan konflik internasional karena akan terjadi migrasi besar-besaran dari daerah yang paling terkena dampak”. Pendapat ini didukung oleh Nina Federoff (2010) yang mengatakan “Perubahan iklim akibat pertumbuhan penduduk yang sangat pesat berakibat buruk bagi produksi pangan sehingga miliaran penduduk terancam kelaparan”. Lebih jauh Jeffrey Sach (2010) memaparkan 4 (empat) tantangan berat dekade mendatang yang harus diantisipasi dan dikendalikan, yaitu pemanasan global dan kerusakan lingkungan; laju pertumbuhan penduduk; pengentasan kemiskinan; dan kebuntuan politik yang menghalangi kerjasama global untuk mengatasi masalah tersebut. Perserikatan Bangsa-Bangsa (1998) memperkirakan bahwa pada tahun 2030 akan terjadi 3 dari 5 penduduk dunia tinggal di wilayah perkotaan, baik kota kecil, kota besar maupun kota metropolitan.

Rencana strategis menata, mengelola secara berkelanjutan dan integratif penduduk dengan seluruh unsur yang terkait denganya merupakan proses penting pengubah (transformasi). Langkah transformasi yang harus digaungkan adalah penduduk yang awalnya disinyalir beban pembangunan menjadi sebuah asset penting pembangunan yang dapat menompang segala aktivitas

perekonomian yang berkualitas demi terwujudnya kesejahteraan masyarakat luas. Langkah strategis dan salah satu upaya dalam menata dan mengelola sumber daya manusia (SDM) yang berupa penduduk adalah dengan pengendalian kuantitas penduduk. Sasaran pengendalian kuantitas penduduk ini tertuju pada variabel-variabel yang terkait erat dengan perubahan kuantitas penduduk. Selain pengendalian kuantitas, tidak kalah pentingnya adalah membangun dan mengembangkan kualitas penduduk (kualitas sumberdaya manusia), membangun dan meningkatkan kualitas keluarga serta menata administrasi kependudukannya. Seluruh agenda penataan dan pengelolaan kependudukan ini disusun dalam suatu Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Kabupaten Lampung Selatan, tahun 2021 – 2035.

Penyusunan GDPK ini disesuaikan dengan kondisi eksisting Kabupaten Lampung Selatan, seperti :

1. Kabupaten Lampung Selatan memiliki luas wilayah sebesar (2.218,84 km²) dengan jumlah penduduk tertinggi ke-4 sebesar 1.071.727 Jiwa diantara 15 Kabupate/Kota di Provinsi Lampung.
2. Penduduk Kabupaten Lampung Selatan tahun 2021 memiliki komposisi usia produktif yang mendukung peningkatan fertilitas dengan angka sex ratio penduduk mencapai 104,7 % > 100 %.
3. Kabupaten Lampung Selatan tahun 2021 memiliki dependency ratio atau rasio ketergantungan sebesar 47,05 artinya bahwa dari 100 penduduk usia produktif menanggung sebanyak 47 orang penduduk usia non produktif, memasuki era bonus demografi ditandai dengan angka ketergantungan (Dependency Ratio/DR).
4. Keadaan kepadatan penduduk yang meningkat dan tinggi dengan kepadatan antar 17 kecamatan dan setiap 1 kilometer persegi luas wilayah Kabupaten Lampung Selatan dihuni oleh 508 jiwa/km².
5. Keadaan sumber daya manusia, angkatan kerja yang terus meningkat Peningkatan ini antara lain dipengaruhi oleh meningkatnya angkatan kerja dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung

Selatan Tahun 2023 rendahnya penawaran kerja yang terserap terutama tingkat pendidikan SMK dan diploma.

Ruang lingkup GDPK meliputi (1) pengendalian jumlah penduduk; (2) peningkatan kualitas penduduk; (3) pembangunan keluarga; (4) 2 BAB 1 penataan/pengaturan persebaran penduduk dan (5) pembentukan data base dan penataan administrasi kependudukan; (6) Road Map Pembangunan Kependudukan periode lima tahunan.

1.2. Landasan Hukum

Berbagai landasan hukum yang mendasari pelaksanaan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) dapat disebutkan antara lain sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025;
2. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 87 tahun 2014 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Keluarga Berencana, dan sistem Informasi Keluarga;
7. Peraturan Presiden Nomor 153 Tahun 2014 tentang Grand Design Pembangunan Kependudukan;
8. Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen, yang telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 145 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedelapan atas Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Kementerian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 322);
9. Keputusan Presiden Nomor 110 Tahun 2001 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Lembaga Pemerintah Non Departemen, yang telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedelapan atas Keputusan Presiden Nomor 110 tahun 2001 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2013);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Proyeksi Penduduk Di Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 tentang klasifikasi, kodefikasi, dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah;
12. Peraturan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 72/PER/B5/2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional sebagaimana

telah diubah dengan Peraturan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 273/PER/B4/2014;

13. Peraturan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 82/PER/B5/2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Provinsi;

1.3. Kondisi Saat Ini

Wilayah Kabupaten Lampung Selatan terletak antara 105 o 14' sampai dengan 105 o 45' Bujur Timur dan 5 o 15' sampai dengan 6 o Lintang Selatan, dengan demikian sama seperti daerah lainnya di Indonesia, Kabupaten Lampung Selatan merupakan daerah tropis. Daerah yang terletak paling ujung bagian selatan pulau Sumatera ini memiliki sebuah pelabuhan di kecamatan Bakauheni dan merupakan tempat transit penduduk dari pulau Jawa ke Sumatera dan sebaliknya. Dengan demikian pelabuhan Bakauheni merupakan pintu gerbang pulau Sumatera. Jarak antara pelabuhan Bahauheni (Lampung Selatan) dengan pelabuhan Merak (Provinsi Banten) kurang lebih 29 km dengan waktu tempuh kapal penyeberangan sekitar 2 jam sampai 2,5 jam. Selain memiliki pelabuhan Bakauheni Kabupaten Lampung Selatan juga memiliki bandara Raden Inten II yang terletak di Kecamatan Natar. Kabupaten Lampung Selatan mempunyai daerah daratan kurang lebih adalah 2.109,74 km² (berdasarkan Peraturan Daerah Lampung Selatan Nomor 15 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Lampung Selatan), dengan Kantor Pusat Pemerintahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2023 di Kota Kalianda.

Kabupaten Lampung Selatan merupakan kabupaten dengan jumlah penduduk terbanyak ke-4 diantara 15 Kabupaten/kota di Provinsi Lampung, pada tahun 2021 memiliki jumlah sebesar 1.071.727 Jiwa dengan luas wilayah sebesar (2.218,84 km²). Kabupaten Lampung Selatan memiliki 17 Kecamatan kecamatan Natar merupakan kecamatan terluas di Kabupaten Lampung Selatan

dengan wilayah seluas 250,88 km², Sedangkan Kecamatan Way Panji sebagai kecamatan terkecil dengan wilayah seluas 38,45 km², Jumlah penduduk terbesar terdapat di Kecamatan Natar yaitu sebesar 193.125 jiwa dan yang terkecil di Kecamatan Way Panji yaitu sebesar 18.219 jiwa.

Rata-rata kepadatan penduduk aritmatika di Kabupaten Lampung Selatan adalah sebesar 508 jiwa/km², yang artinya setiap 1 kilometer persegi luas wilayah Kabupaten Lampung Selatan dihuni oleh 508 jiwa. Kecamatan Natar dan Kecamatan Jati Agung memiliki kepadatan penduduk tertinggi yaitu lebih dari 10% dan kepadatan penduduk aritmatika juga yang terbesar yaitu lebih dari 700 jiwa/km². Hal ini karena populasi di kedua kecamatan tersebut merupakan kecamatan yang paling dekat dengan ibukota Provinsi Lampung, Kota Bandarlampung, yang saat ini diproyeksikan sebagai daerah alternatif bagi masyarakat ibukota untuk berinvestasi dan tempat tinggal. Secara garis besar ringkasan penduduk dan laju pertumbuhan penduduk disajikan pada tabel berikut:

Tabel 1. Jumlah Penduduk, Laju Pertumbuhan Penduduk Menurut Kecamatan Tahun 2017-2021

No	Kecamatan	Jumlah Penduduk (jiwa)		LPP Per Tahun 2017 - 2021 (%)
		2017	2021	
1	Natar	191.707	193.172	5,67
2	Jati Agung	114.269	129.501	5,26
3	Tanjung Bintang	75.834	82.757	5,34
4	Tanjung Sari	29.188	32.044	3,89
5	Katibung	67.732	73.069	4,76
6	Merbau Mataram	48.919	56.901	2,40
7	Way Sulan	22.692	24.496	3,33
8	Sidomulyo	57.701	65.748	0,49
9	Candipuro	55.011	58.029	4,28
10	Way Panji	17.049	18.232	2,31
11	Kalianda	88.681	94.784	4,44
12	Rajabasa	22.359	25.022	3,67

No	Kecamatan	Jumlah Penduduk (jiwa)		LPP Per Tahun 2017 - 2021 (%)
		2017	2021	
13	Palas	57.047	61.289	3,33
14	Sragi	33.378	35.914	2,67
15	Penengahan	37.328	42.555	2,42
16	Ketapang	49.993	53.518	3,51
17	Bakauheni	23.875	24.696	6,68
Lampung Selatan		992.763	1.071.727	4,19

Sumber : BPS, Kabupaten Lampung Selatan, 2022

Berdasarkan tabel diatas terlihat jumlah penduduk antar 17 Kecaamatan dimana secara keseluruhan menjelaskan tahun dasar 2017 total penduduk berada pada angka 992.763 Jiwa dan terus bertambah dan mengalami peningkatan dan pada tahun 2021 sebanyak 1.071.727 jiwa. Data selama 5 tahun dari data tahun awal 2017-2021 telah terjadi pertambahan penduduk total sebanyak 78.964 jiwa dan laju rata-rata penduduk kabupaten Lampung Selatan sepanjang 5 tahun sebesar 4,19%. Tingginya LPP Kabupaten Lampung Selatan ini dikarenakan jumlah kelahiran lebih banyak dari pada jumlah kematian. Faktor lain yang diperhitungkan dalam kependudukan adalah distribusi dan kepadatan penduduk yang disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2. Jumlah, Distribusi, Dan Kepadatan Penduduk Kabupaten Lampung Selatan Menurut Kecamatan Tahun 2021

No	Kecamatan	Jumlah Penduduk 2021	Distribusi Penduduk (%)	Kepadatan Penduduk (Jiwa/Km2)
1	Natar	193.172	18.02	770
2	Jati Agung	129.501	12.08	787
3	Tanjung Bintang	82.757	7.72	638
4	Tanjung Sari	32044	2.99	310
5	Katibung	73.069	6.82	387
6	Merbau Mataram	56.901	5.31	499
7	Way Sulan	24.496	2.29	526
8	Sidomulyo	65.748	6.13	414

No	Kecamatan	Jumlah Penduduk 2021	Distribusi Penduduk (%)	Kepadatan Penduduk (Jiwa/Km ²)
9	Candipuro	58.029	5.41	683
10	Way Panji	18.232	1.70	474
11	Kalianda	94.784	8.84	527
12	Rajabasa	25.022	2.33	249
13	Palas	61.289	5.72	370
14	Sragi	35.914	3.35	384
15	Penengahan	42.555	3.97	341
16	Ketapang	53.518	4.99	493
17	Bakauheni	24.696	2.30	432
Lampung Selatan		1.071.727	100	508

Sumber : BPS, Kabupaten Lampung Selatan, 2022

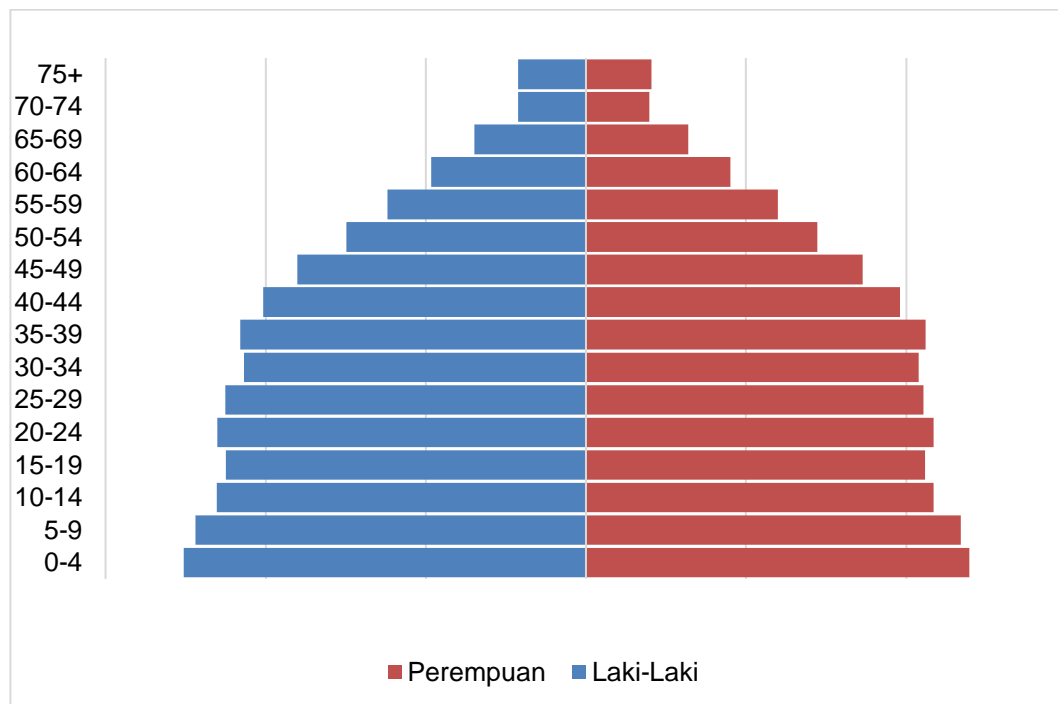
Kabupaten Lampung Selatan pada setiap kecamatan dilihat dari distribusi penduduk distribusi 1%-5% terdapat 8 kecamatan, distribusi 5,1%-10% terdapat 7 Kecamatan sedangkan 11% > terdapat 2 Kecamatan. Dilihat dari kepadatan penduduk 17 Kecamatan rata-rata memiliki kepadatan yang tinggi untuk cakupan 1 kecamatan dimana berada pada minimal 200 Jiwa/Km² – 787 Jiwa/Km², sedangkan dilihat dari total Kabupaten memiliki kepadatan 508 Jiwa/Km². Penduduk dalam kelompok umur dan kelamin jumlah penduduk di Kabupaten Lampung Selatan pada Tahun 2021 lebih banyak berjenis kelamin laki-laki daripada perempuan, berikut adalah tabel yang menyajikan data:

Tabel 3. Jumlah Penduduk Kabupaten Lampung Selatan Berdasarkan Jenis Kelamin Dan Kelompok Umur Tahun 2021

Kelompok Umur	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
0-4	50.239	47.882	98.121
5-9	48.742	46.830	95.572
10-14	46.073	43.428	89.501
15-19	44.982	42.363	87.345
20-24	46.013	43.389	89.402

Kelompok Umur	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
25-29	45.067	42.120	87.187
30-34	42.713	41.559	84.272
35-39	43.161	42.402	85.563
40-44	40.291	39.191	79.482
45-49	36.075	34.537	70.612
50-54	29.911	28.903	58.814
55-59	24.772	23.991	48.763
60-64	19.316	18.062	37.378
65-69	13.941	12.801	26.742
70-74	8.458	7.884	16.342
75+	8.443	8.188	16.631
Jumlah	548.197	523.530	1.071.727

Sumber : BPS, Kabupaten Lampung Selatan, 2022



Sumber : BPS, Kabupaten Lampung Selatan, 2022

Gambar 1. Piramida Penduduk Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2021

Kelompok umur penduduk kabupaten Lampung Selatan menunjukkan total laki-laki yang lebih tinggi sebesar 548.197 dan perempuan sebesar

523.530. Dominasi kelompok umur pada laki-laki yang tinggi pada kelompok umur 0-4 tahun dengan total 50.239, perempuan kelompok umur 0-4 tahun dengan total 47.882 bisa dikatakan dalam kategori balita. Dengan komposisi jumlah penduduk laki-laki sebanyak 548.197 jiwa dan jumlah penduduk perempuan sebanyak 523.530 jiwa, maka sex ratio penduduk mencapai 104,7 %. Hal ini berarti bahwa setiap 100 jiwa penduduk perempuan terdapat 104 jiwa penduduk laki-laki.

Berdasarkan piramida penduduk menurut kelompok umur dan jenis kelamin di Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2021, diketahui bahwa komposisi penduduk usia muda dan usia tua di Kabupaten Lampung Selatan cenderung seimbang. Bentuk piramida penduduk seperti ini biasa disebut piramida penduduk tetap (*stationer*) yang menunjukkan bahwa angka kelahiran dan angka kematian di Kabupaten Lampung Selatan cenderung seimbang. Piramida penduduk ini juga menunjukkan bahwa mayoritas penduduk Lampung Selatan berada pada usia produktif sehingga perlu adanya program prioritas dari Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan yang mendukung peningkatan keterampilan pemuda dan terciptanya lapangan kerja baru.

Rasio ketergantungan digunakan untuk mengukur besarnya beban yang harus ditanggung oleh setiap penduduk berusia produktif terhadap penduduk yang tidak produktif. Penduduk usia produktif adalah penduduk yang berusia 15-64 tahun, sedangkan yang dikategorikan sebagai penduduk usia non produktif adalah penduduk berusia dibawah 15 tahun (karena secara ekonomis masih tergantung pada orang tua atau orang lain yang menanggungnya) dan penduduk berusia diatas 65 tahun (karena umumnya sudah melewati masa pensiun. Rasio ketergantungan atau *Dependency ratio* (DR) merupakan salah satu indikator demografi yang penting. Semakin tingginya persentase dependency ratio menunjukkan semakin tingginya beban yang harus ditanggung penduduk yang produktif untuk membiayai hidup penduduk yang belum produktif dan tidak produktif lagi. Sedangkan persentase dependency ratio yang semakin rendah menunjukkan semakin rendahnya beban yang

ditanggung penduduk yang produktif untuk membiayai penduduk yang belum produktif dan tidak produktif lagi. Berikut adalah data *Dependency Ratio*:

Tabel 4. Perkembangan Dependency Ratio Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2017-2021

Uraian	2017	2018	2019	2020	2021
Rasio Ketergantungan	51,58	51,42	51,26	51,08	47,05

Sumber : BPS, Kabupaten Lampung Selatan, 2022

Tabel 5. Jumlah Penduduk dan Dependency Ratio Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2012 Dan 2022

Umur (Tahun)	Jumlah Penduduk Tahun 2017		Jumlah Penduduk Tahun 2021		Dependency Ratio / DR	
	Jumlah	%	Jumlah	%	2017	2021
0 - 14	287217	28.93	283194	26.42	51,58	47,05
15 - 64	654937	65.97	728818	68.00		
65+	50609	5.10	59715	5.57		
Jumlah	992763	100	1071727	100		

Sumber : BPS, Kabupaten Lampung Selatan, 2022

Kabupaten Lampung Selatan memiliki rasio ketergantungan yang cenderung mengalami penurunan dari Tahun 2017-2021, yang berarti bahwa semakin rendahnya beban yang ditanggung penduduk yang produktif untuk membiayai penduduk yang belum produktif dan tidak produktif lagi. Pada perkembangan sepanjang 2017-2020 DR berada pada angka 51 orang dan Tahun 2021 persentase *dependency ratio* atau rasio ketergantungan sebesar 47,05 berkurang 4 orang , artinya bahwa dari 100 penduduk usia produktif menanggung sebanyak 47 orang penduduk usia non produktif.

Pembangunan Keluarga merupakan bagian dari isu pembangunan nasional yang mengedepankan rekayasa sosial dalam kehidupan keluarga. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Keluarga Berencana menyebutkan bahwa tujuan pembangunan keluarga

adalah untuk meningkatkan kualitas keluarga agar timbul rasa aman, tenteram, dan harapan masa depan lebih baik dalam mewujudkan kesejahteraan lahir dan kebahagiaan batin. Sejalan dengan hal tersebut maka ketahanan keluarga yang tinggi apabila memenuhi beberapa aspek yaitu: (1) ketahanan fisik yaitu terpenuhinya kebutuhan pangan, sandang, perumahan, Pendidikan dan kesehatan; (2) ketahanan social yaitu berorientasi pada nilai agama, komunikasi yang efektif dan komitmen keluarga yang tinggi; (3) ketahanan psikologis yang meliputi kemampuan penanggulangan masalah non fisik, pengendalian emosi secara positif, konsep diri positif, dan kepedulian suami terhadap istri.

1.4. Kondisi Yang Diharapkan

Pengendalian kuantitas penduduk mempunyai tiga sasaran pokok kuantitatif, yang mencakup fertilitas, mortalitas, dan persebaran penduduk. Sasaran fertilitas diarahkan pada pencapaian kondisi penduduk tumbuh seimbang (PTS) yang ditandai dengan pencapaian TFR sebesar 1,72 anak per wanita dan NRR sebesar 0,16 per wanita pada tahun 2035. Dari sisi mortalitas, angka kematian bayi diharapkan terus menurun menjadi sekitar 0,7 per 1000 kelahiran hidup pada kurun waktu tahun 2035. Dari sisi migrasi, diharapkan arus migrasi masuk lebih banyak dari arus migrasi keluar dapat dipertahankan seiring dengan capaian kemajuan pembangunan daerah. Dari aspek persebaran penduduk diharapkan akan terjadi persebaran yang lebih merata sesuai dengan daya dukung alam dan daya tampung lingkungan. Meningkatnya kualitas hidup penduduk dan keluarga yang ditandai dengan peningkatan Indeks Pembangunan Manusia, Indeks Pembangunan Gender dan Indeks Pembangunan Keluarga dengan peringkat 20 besar secara nasional. Meningkatnya sadar Administrasi Penduduk yang ditandai dengan perekaman dan pemilikan e-ktp serta cakupan akte lahir penduduk 110% - 78% tahun mencapai 100% pada tahun 2035.

Dari aspek migrasi, kondisi yang diinginkan adalah migrasi masuk lebih banyak dari migrasi keluar. Memperbesar arus migrasi masuk dapat dilakukan

melalui program transmigrasi (seperti pola PIR-Trans) oleh pemerintah daerah kabupaten. Menciptakan banyak “gula pembangunan” melalui perluasan investasi (PMA dan PMDN) oleh masing-masing kabupaten/kota akan mengundang banyak “semut” berdatangan (migrasi masuk) ke daerah tersebut. Dampak ikutan dari kondisi ini adalah terjadinya persebaran penduduk yang lebih merata di semua kecamatan. Demikian juga halnya dengan urbanisasi, diharapkan agar penduduk tidak berbondong-bondong datang ke perkotaan yang pada gilirannya dapat menimbulkan masalah baru yang tidak kalah peliknya. Namun patut disadari bahwa urbanisasi tidak semata-mata karena perpindahan penduduk dari desa ke kota, tetapi juga karena daerah-daerah dengan kategori urban sudah semakin banyak karena fasilitas dan hasil pembangunan yang semakin merata. Kualitas penduduk pada masa mendatang diharapkan semakin meningkat. Kualitas yang dimaksud di sini adalah kualitas akademik dan keterampilan (skill). Vokasi learning dan vokasi training semakin meningkat. Dari aspek Pendidikan, rata-rata lama sekolah bisa mencapai 12 tahun. Proporsi Angka Partisipasi Sekolah, terutama SMA/SMK semakin mendekati 100% sebagai bukti keberhasilan Gerakan wajib belajar 12 tahun. Produktivitas, inovasi dan kreativitas penduduk usia produktif semakin meningkat seiring dengan perkembangan industri 4.0. dan optimalisasi era bonus demografi. Pada saat yang sama pembangunan keluarga harus lebih ditingkatkan terlebih dengan kesehatan ibu anak.

Harap diingat bahwa pembangunan sumberdaya manusia dimulai dari sejak dalam kandungan. Oleh karenanya, perawatan dan pemeriksaan kehamilan dan kecukupan asupan gizi menjadi keharusan untuk melahirkan bayi sehat dan tumbuh normal hingga usia 0-59 bulan (tidak sangat pendek dan sangat kurus). Mengingat posisi strategis penduduk dalam proses pembangunan berkelanjutan, maka dibutuhkan system layanan administrasi penduduk yang baik, mudah dan merata ke seluruh penjuru wilayah. Semua penduduk harus terdaftar yang ditandai dengan peningkatan kesadaran masyarakat melaporkan

semua kejadian kependudukan yang dialami. Dengan kata lain “sadar adminduk meningkat”.

1.5. Permasalahan

Meskipun TFR Kabupaten Lampung Selatan semakin menurun, namun bila dikaitkan dengan Sasaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2021-2026 mengamanahkan agar BKKBN bertanggung jawab terhadap tercapainya target TFR secara nasional pada tahun 2024 yaitu mencapai 2,28 anak per wanita usia subur. Capaian TFR Kabupaten Lampung Selatan (1,7 anak per wanita). Angka Kematian Bayi (AKB) dan Angka Kematian Ibu (AKI) meskipun turun namun masih tergolong tinggi. Masih jauh dari target SDGs. AKB tinggi berdampak pada perlambatan peningkatan usia harapan hidup yang pada gilirannya perlambatan pada peningkatan IPM. Mobilitas penduduk antar kabupaten dan antar propinsi dari dan ke Kabupaten Lampung Selatan akan semakin cepat dan ramai/padat yang dapat menimbulkan dampak langsung dan tidak langsung bagi persebaran penduduk Kabupaten Lampung Selatan.

Kualitas penduduk Kabupaten Lampung Selatan dinilai dari dimensi kesehatan dan dimensi Pendidikan masih tergolong rendah dari capaian nasional. Kondisi ini menjadi tantangan berat dalam pemanfaatan jumlah besar penduduk usia produktif di era bonus demografi dan industri 4.0. Pembangunan keluarga di Provinsi Lampung secara nasional belum menggembirakan. Derajat kesehatan Ibu – Anak lebih rendah dari nasional. Dalam hal administrasi penduduk, kesadaran masyarakat masih rendah melaporkan tentang perubahan elemen data kependudukannya, melakukan update KK tentang terjadinya penambahan/pengurangan Anggota Keluarga, tingkat Pendidikan Anggota Keluarga.

1.6. Sistematika Penyusunan GDPK

1. BAB 1 membahas pendahuluan meliputi latar belakang, dasar hukum, kondisi saat ini, kondisi yang diinginkan, permasalahan, dan sistematika.
2. BAB 2 membahas tentang visi, misi, tujuan dan sasaran meliputi visi, misi, tujuan, sasaran umum, strategi pelaksanaan, dan alur pikir.
3. BAB 3 membahas tentang pengendalian kuantitas penduduk yang meliputi pengendalian fertilitas, penurunan mortalitas.
4. BAB 4 membahas tentang kualitas penduduk yang meliputi dimensi Pendidikan, dimensi kesehatan, dimensi ekonomi, dimensi pembangunan manusia dan produktivitas.
5. BAB 5 membahas tentang pembangunan keluarga yang meliputi kebijakan pembangunan keluarga, pembangunan keluarga di Kabupaten Lampung Selatan, permasalahan pembangunan keluarga, tujuan, sasaran, dan strategi kebijakan pembangunan keluarga, program pembangunan keluarga, dan kondisi yang diharapkan.
6. BAB 6 membahas tentang penataan, persebaran, dan pengarahan mobilitas penduduk yang meliputi kondisi saat ini, intervensi, dan kondisi yang diinginkan
7. BAB 7 membahas tentang penataan administrasi penduduk yang meliputi kondisi saat ini, intervensi, tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan, penataan administrasi kependudukan, program penataan administrasi kependudukan, dan kondisi yang diinginkan.
8. BAB 8 membahas tentang Road Map GDPK meliputi pengendalian kuantitas penduduk, pembangunan kualitas penduduk, pembangunan keluarga, persebaran penduduk, dan penataan administrasi kependudukan.
9. BAB 9. PENUTUP

BAB 2

VISI MISI TUJUAN DAN SASARAN

2.1. Visi

Visi dari Grand Design Pembangunan Kependudukan adalah terwujudnya keserasian, keselarasan, dan keseimbangan antara kuantitas dan kualitas penduduk, kualitas keluarga dengan lingkungan hidup disertai pengaturan mobilitas penduduk dan administrasi penduduk yang rapi dan lengkap.

Visi GDPK berkaitan erat dengan Visi RPJMD Kabupaten Lampung Selatan 2021-2026 yaitu Terwujudnya Masyarakat Lampung Selatan yang Berintegritas, Maju dan Sejahtera dengan Semangat Gotong Royong.

2.2. Misi

Misi dari Grand Design Pembangunan Kependudukan adalah :

- a. Membangun komitmen para pemangku kepentingan dan penentu kebijakan (*prime stakeholders*) tentang pentingnya dan strategisnya upaya pengendalian kuantitas penduduk, peningkatan kualitas penduduk, pembangunan keluarga, penataan mobilitas/persebaran penduduk dan penataan administrasi kependudukan.
- b. Mensinergikan pembangunan berwawasan kependudukan dengan pembangunan berwawasan lingkungan demi terwujudnya peningkatan kesejahteraan masyarakat secara berkesinambungan
- c. Mengoptimalkan bonus demografi untuk cewujudkan masyarakat yang sehat, cerdas, produktif, dan inovatif serta berahlak mulia.

Misi GDPK ini erat kaitannya dengan misi RPJMD Kabupaten Lampung Selatan, yaitu :

1. Meningkatkan penerapan nilai-nilai agama, budaya dan keluarga dalam kehidupan bermasyarakat
2. Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia melalui pelayanan pendidikan dan kesehatan serta kesejahteraan sosial
3. Membangun infrastruktur untuk meningkatkan konektivitas antar wilayah dan pusat-pusat perekonomian yang berkelanjutan
4. Mengembangkan ekonomi kreatif dengan memanfaatkan potensi unggulan daerah
5. Meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang profesional, transparan, efektif dan akuntabel

2.3. Tujuan

Tujuan dari *Grand Design* Pembangunan Kependudukan adalah :

- a. Memberikan arah kebijakan bagi pelaksanaan pembangunan kependudukan Kabupaten Lampung Selatan yang meliputi pengendalian jumlah penduduk, peningkatan kualitas penduduk, pembangunan keluarga, penataan dan pengaturan persebaran/mobilitas penduduk serta pembangunan data base dan administrasi kependudukan.
- b. Menjadi pedoman bagi penyusunan road map pembangunan kependudukan Kabupaten Lampung Selatan pada periode 2021 – 2035.
- c. Menjadi pedoman bagi pemerintah daerah dan lintas sektor terkait dalam perencanaan pembangunan yang berwawasan kependudukan di Kabupaten Lampung Selatan dalam kaitannya dengan penyusunan RPJMD
- d. Mewujudkan pembangunan berwawasan kependudukan yang berkelanjutan melalui rekayasa kondisi penduduk optimal yang sesuai dengan daya dukung alam dan daya tampung lingkungan hidup

2.4. Sasaran Umum

Pada hakekatnya, pengendalian kuantitas penduduk mempunyai tiga sasaran pokok kuantitatif, yang mencakup fertilitas, mortalitas, dan persebaran penduduk. Sasaran fertilitas diarahkan pada pencapaian kondisi penduduk tumbuh seimbang (PTS) yang ditandai dengan pencapaian TFR sebesar 1,72 anak per wanita dan NRR sebesar 0,16 per wanita pada tahun 2035. Dari sisi mortalitas, angka kematian bayi diharapkan terus menurun menjadi sekitar 0,7 per 1000 kelahiran hidup pada kurun waktu tahun 2035. Dari sisi migrasi, diharapkan arus migrasi masuk lebih banyak dari arus migrasi keluar dapat dipertahankan seiring dengan capaian kemajuan pembangunan daerah. Dari aspek persebaran penduduk diharapkan akan terjadi persebaran yang lebih merata sesuai dengan daya dukung alam dan daya tampung lingkungan.

Meningkatnya kualitas hidup penduduk dan keluarga yang ditandai dengan peningkatan Indeks Pembangunan Manusia, Indeks Pembangunan Gender dan Indeks Pembangunan Keluarga dengan peringkat 20 besar secara nasional Meningkatkan sadar Administrasi Penduduk yang ditandai dengan perekaman dan pemilikan e-ktp serta cakupan akte lahir penduduk 110% - 78% tahun mencapai 100% pada tahun 2035.

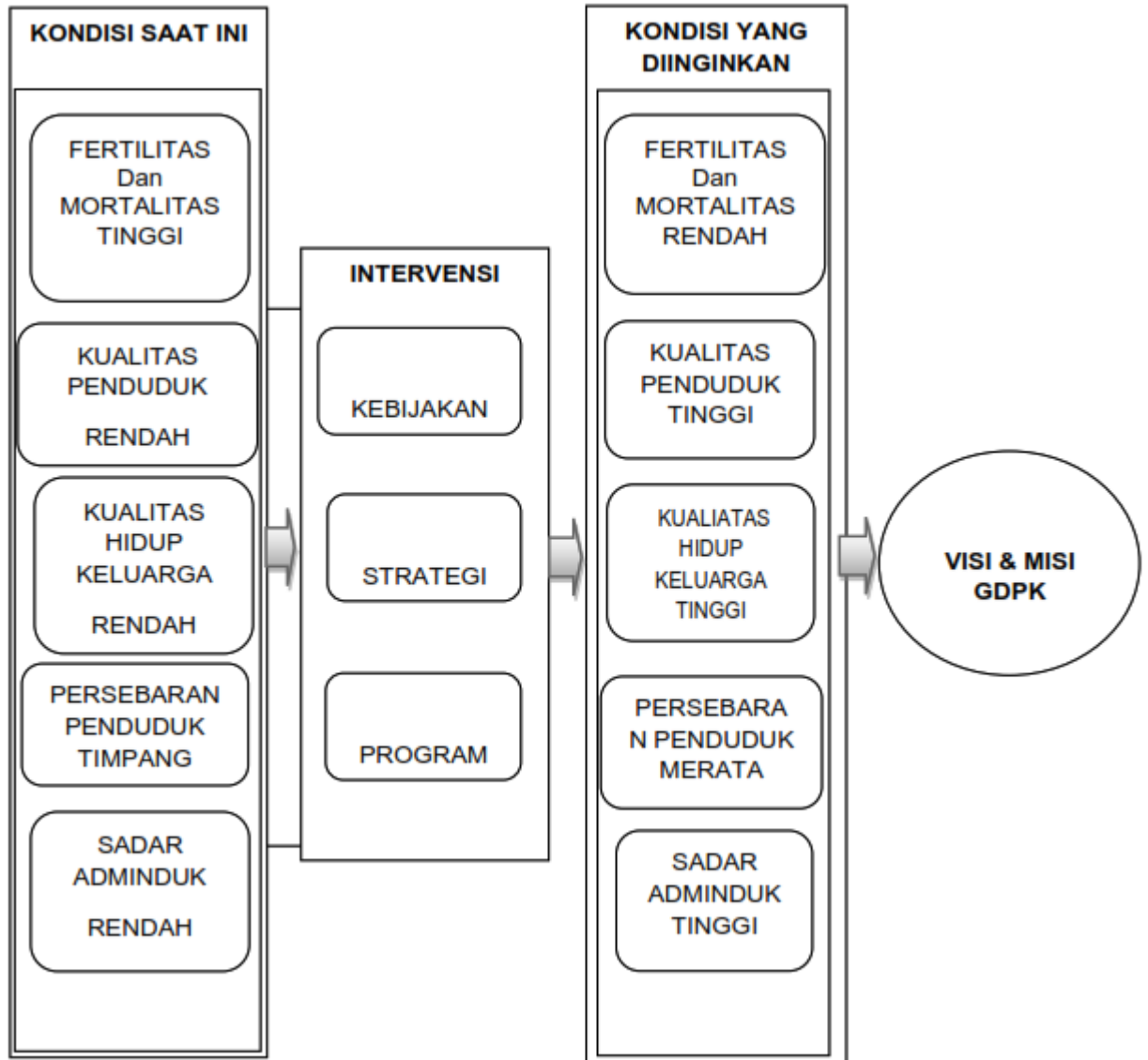
2.5. Strategi Pelaksanaan

Di tingkat provinsi, strategi pelaksanaan dari Grand Design Pembangunan Kependudukan ini mencakup dua hal pokok, yaitu: (1) Menyangkut penyempurnaan regulasi yang terkait dengan upaya pengendalian kuantitas penduduk; dan (2) Melalui penyelesaian Peraturan Daerah dan regulasi ikutan sebagai penjabaran Undang-Undang Nomor 52 tahun 2009.

Di tingkat kabupaten/kota strategi pelaksanaan Grand Design Pembangunan Kependudukan ini berkaitan dengan: (1) Implementasi kebijakan atau program yang berkaitan dengan komponen-komponen pembangunan kependudukan; dan (2) Pelaksanaan upaya pengendalian fertilitas, penurunan

mortalitas, dan pengarahan mobilitas penduduk, pembangunan keluarga, dan penataan administrasi menuju satu data (*big data*).

2.6. Alur Pikir



Gambar 2. Alur Pikir Pembentukan GDPK

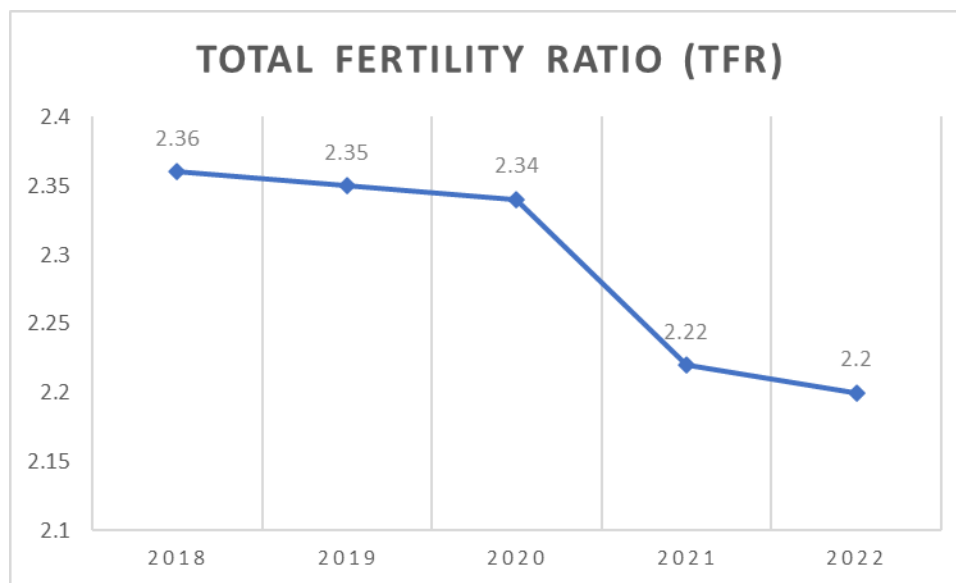
BAB 3

PENGENDALIAN KUANTITAS PENDUDUK

3.1. Pengendalian Fertilitas

3.1.1. Pengembangan Fertilitas

Fertilitas adalah rata-rata jumlah tingkat kelahiran anak pada usia subur wanita, Kabupaten Lampung Selatan mengacu pada angka fertilitas dasar 2020 sebesar 1,78 anak per wanita, yang berarti seorang wanita di Kabupaten Lampung Selatan rata-rata melahirkan 1-2 orang anak selama hidupnya. Sasaran fertilitas diarahkan pada pencapaian kondisi penduduk tumbuh seimbang (PTS) pada tahun 2035 yang ditandai dengan TFR mencapai 1,72 rata-rata melahirkan 1-2 orang anak selama hidupnya anak per wanita usia subur sedangkan NRR menjadi 1 per wanita.



Sumber : Dinas Kesehatan Lampung Selatan, 2023

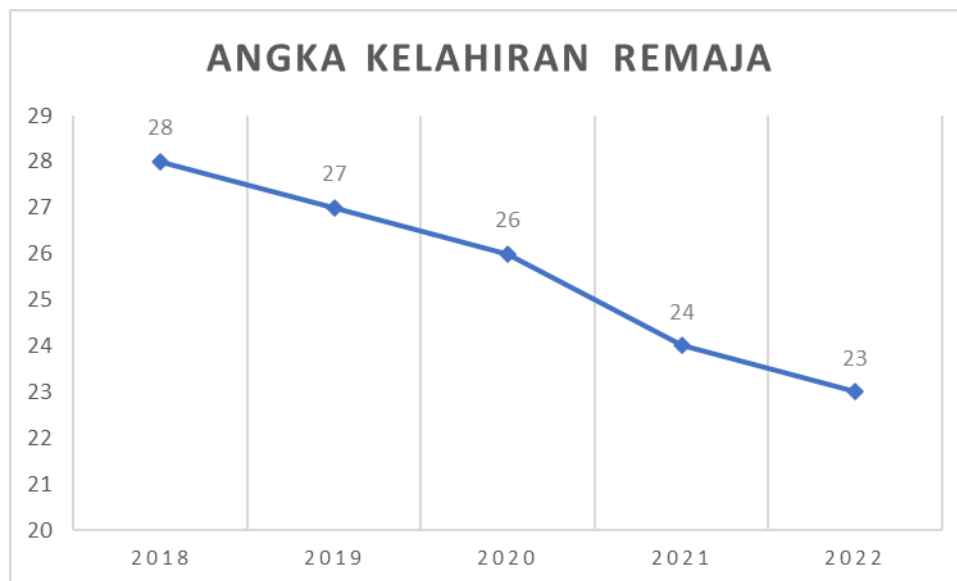
Gambar 3. TFR 2018 - 2022

Jumlah anak yang dilahirkan oleh seorang wanita dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain umur pertama kali melahirkan, jarak antar

kelahiran, dan kesuburan. Menunda kelahiran pertama dan menjarangkan kelahiran berhasil menurunkan tingkat fertilitas di berbagai negara. Faktor-faktor ini juga berdampak positif terhadap kesehatan. Sebaliknya, jarak antar kelahiran yang pendek (kurang dari 24 bulan) akan berdampak negatif terhadap bayi dan ibu, antara lain kelahiran prematur, berat lahir rendah, dan kematian. Melahirkan pada usia muda meningkatkan risiko komplikasi selama kehamilan dan melahirkan serta kematian neonatal. Jarak antar kelahiran berkaitan dengan risiko kesakitan dan kematian pada anak. Risiko ini akan lebih tinggi pada jarak kurang dari 24 bulan. Jarak antar kelahiran yang lebih panjang bukan hanya menguntungkan bagi anak, tetapi juga akan meningkatkan status kesehatan ibu.

Salah satu faktor yang mempengaruhi tingkat fertilitas adalah umur kawin pertama (UKP) dan umur pada kelahiran anak pertama. Median UKP wanita di Kabupaten Lampung S meningkat dari 19,3 tahun (2010) menjadi 21 tahun (2020). Wanita yang menikah pada umur muda lebih lama menghadapi risiko kehamilan. Selain itu, ibu yang melahirkan pada umur muda mempunyai risiko kesehatan yang tinggi.

Median umur melahirkan pertama wanita umur 25-49 yang tinggal di perkotaan lebih tinggi dibandingkan dengan yang tinggal di perdesaan, yaitu 23,0 dan 20,9 tahun. Median umur melahirkan anak pertama meningkat seiring dengan tingkat pendidikan dan kekayaan. Semakin tinggi tingkat Pendidikan dan kuintil kekayaan, semakin tinggi median umur melahirkan anak pertama. Median umur melahirkan anak pertama meningkat dari 18,6 tahun pada wanita tidak sekolah menjadi 23,3 tahun pada wanita tamat SLTA. Demikian juga pada kuintil kekayaan, median umur melahirkan anak pertama meningkat dari 20,5 tahun pada wanita pada kuintil kekayaan terbawah menjadi 24,0 tahun pada kuintil kekayaan teratas.



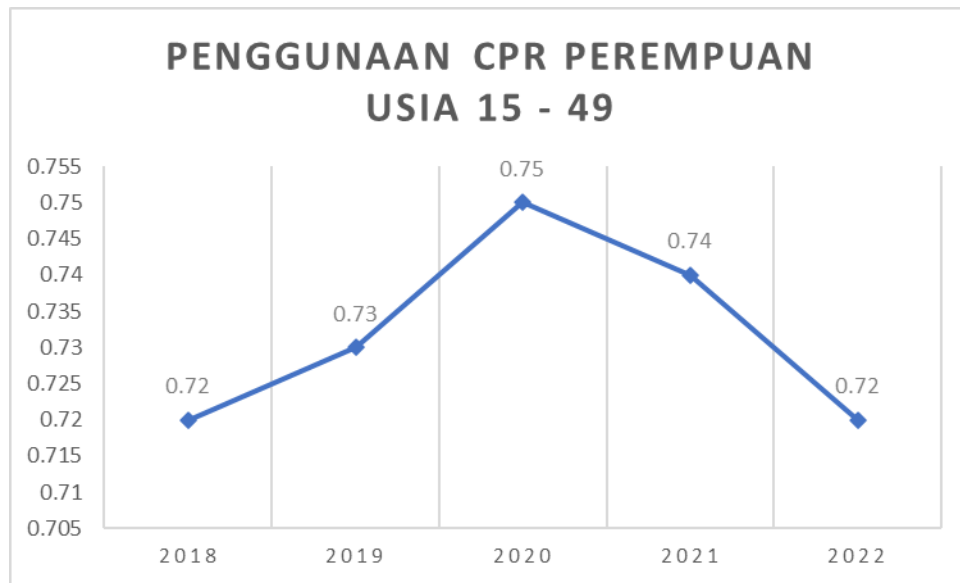
Sumber : Dinas Kesehatan Lampung Selatan, 2023

Gambar 4. Angka Kelahiran Remaja Perempuan Usia 15 - 19 Tahun

Fertilitas remaja merupakan isu penting karena berhubungan dengan tingkat kesakitan serta kematian ibu dan anak. Ibu yang berumur remaja lebih berisiko untuk mengalami masalah kesehatan dan kematian yang berkaitan dengan persalinan dibandingkan dengan wanita yang lebih tua. Selain itu, melahirkan pada umur muda mengurangi kesempatan mereka untuk melanjutkan pendidikan atau mendapatkan pekerjaan. Pada kabupaten Lampung Selatan 2017-2021 sebanyak 1 orang pada setiap tahunnya, diikuti oleh persentase penurunan dari angka awal tahun 2017 sebesar 54,2% terus menurun dan pada tahun 2021 sebesar 38,03%. Penyebab kematian ibu di Kabupaten Lampung Selatan berdasarkan hasil Audit Maternal Perinatal (AMP) adalah pendarahan, eklampsia dan Emboli Air Ketuban. Semakin tinggi kuintil kekayaan, semakin rendah persentase remaja yang menjadi ibu. Berbeda bila dilihat dari aspek Pendidikan, dimana semakin tinggi tingkat pendidikan, semakin tinggi persentase remaja yang menjadi ibu.

Naik turunnya TFR di Kabupaten Lampung Selatan terkait erat dengan pelaksanaan Program Keluarga Berencana. Kesadaran PUS yang menggunakan

alat/metode kontrasepsi modern dan tradisional semakin meningkat. Ini dibuktikan dari capaian CPR (*Contraceptive Prevalance Rate*) sebesar 74,23% tahun 2019 dan 74,8 % tahun 2020. Capaian tertinggi yang pernah dicapai sebesar 75,3 % tahun 2021.



Sumber : Dinas Kesehatan Lampung Selatan, 2023

Gambar 5. Penggunaan CPR Perempuan Usia 15 - 49 Tahun

Secara teoritis, antara CPR dengan TFR terjadi korelasi negatif, dan itu yang terjadi di Kabupaten Lampung Selatan dimana CPR meningkat, TFR turun. Meskipun terbilang tinggi, namun capaian ini belum menggembirakan karena alat kontrasepsi yang dipakai oleh PUS dan Akseptor Baru sebagian besar tergolong pada Metode Kontrasepsi Jangka Pendek, yaitu Pil, Kondom dan Suntik. Alat Kontrasepsi Pil, Kondom dan Suntik memiliki resiko kegagalan lebih tinggi dibanding alat kontrasepsi IUD, Implant, MOW dan MOP Pada saat yang sama, kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need) masih tergolong tinggi.

KB Aktif pada tahun 2019 sebesar (70,78%) atau 121.688 peserta KB aktif, mengalami peningkatan dibandingkan dengan tahun sebelumnya sebesar (70,05%) atau 118.107 peserta Kb aktif. Capaian tersebut masih dibawah target

Renstra Dinas Kesehatan sebesar 76%. Cakupan pelayanan peserta KB aktif tertinggi pada Puskesmas Way Panji (125,2%) dan cakupan yang paling rendah adalah Puskesmas Way Urang (4,6%). Cakupan peserta KB aktif pada tahun 2020 sebesar 71,13% (123.306 peserta KB aktif), mengalami peningkatan dibandingkan dengan tahun sebelumnya sebesar 70,78% (121.688 peserta KB aktif), tetapi capaian ini masih dibawah target Renstra sebesar 77%. Cakupan pelayanan peserta KB aktif tertinggi pada Puskesmas Bumidaya (100%) dan cakupan yang paling rendah adalah Puskesmas Katibung (15,7%). Cakupan peserta KB aktif pada tahun 2021 sebesar 74,2% (107.000 peserta KB aktif), mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2020 sebesar 71,13% (123.306 peserta KB aktif). Upaya peningkatan jumlah peserta KB aktif dapat dilakukan dengan cara memberikan bantuan dana, pelatihan, manajemen sosialisasi, dan pelatihan alat KB pada PUS, kerja sama dengan pemangku kepentingan, pendekatan tokoh masyarakat, bantuan alat dan pemasangan kontrasepsi secara gratis, pemberian apresiasi kepada pengguna KB, melakukan monitoring dan evaluasi serta umpan balik, tinjauan kembali dari hasil monitoring dan evaluasi agar dapat diperbaiki pada program KB berikutnya.

3.1.2. Strategi

Pengaturan fertilitas melalui kesertaan ber-KB dan peningkatan keikutsertaan pria ber-KB serta ketersediaan alat kontrasepsi guna meningkatkan angka prevalensi pemakaian kontrasepsi modern (mCPR), menurunkan kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need) dan menurunkan TFR.

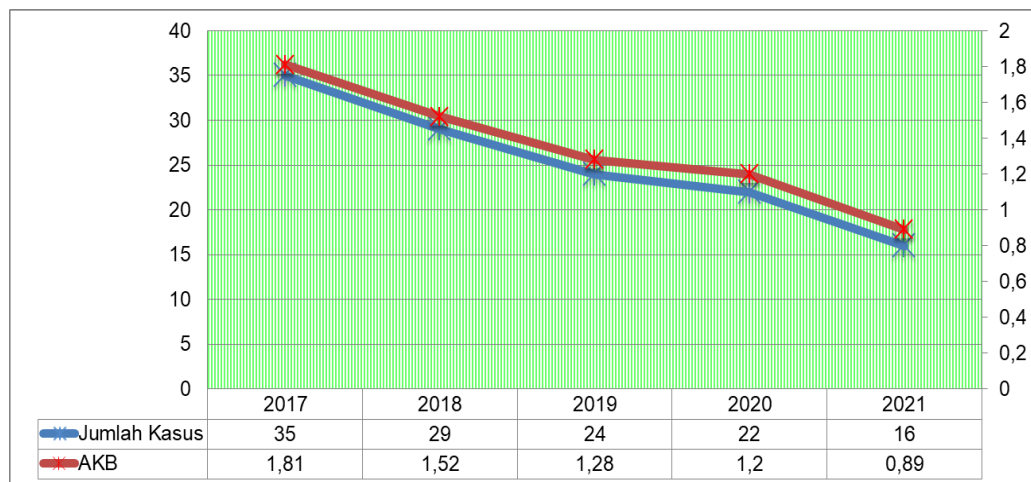
3.1.3. Program

1. Menurunkan angka kelahiran total (TFR) per WUS
2. Meningkatkan angka prevalensi pemakaian kontrasepsi modern (mCPR)
3. Menurunkan kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi/unmet need
4. Meningkatkan peserta KB Aktif yang menggunakan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)

3.2. Penurunan Mortalitas

3.2.1 Angka Kematian Bayi (AKB)

Angka Kematian Bayi (AKB) adalah angka yang menunjukkan banyaknya kematian bayi usia 0 tahun dari setiap 1000 kelahiran hidup pada tahun tertentu atau dapat dikatakan juga sebagai probabilitas bayi meninggal sebelum mencapai usia satu tahun (dinyatakan dengan per seribu kelahiran hidup). Angka kematian bayi merupakan indikator yang penting untuk mencerminkan keadaan derajat kesehatan di suatu masyarakat, karena bayi yang baru lahir sangat sensitif terhadap keadaan lingkungan tempat orang tua si bayi tinggal dan sangat erat kaitannya dengan status sosial orang tua bayi. Kemajuan yang dicapai dalam bidang pencegahan dan pemberantasan berbagai penyakit penyebab kematian akan tercermin secara jelas dengan menurunnya tingkat AKB. Dengan demikian angka kematian bayi merupakan tolok ukur yang sensitif dari semua upaya intervensi yang dilakukan oleh pemerintah khususnya di bidang kesehatan. Berikut adalah kondisi AKB pada Kabupaten Lampung Selatan:



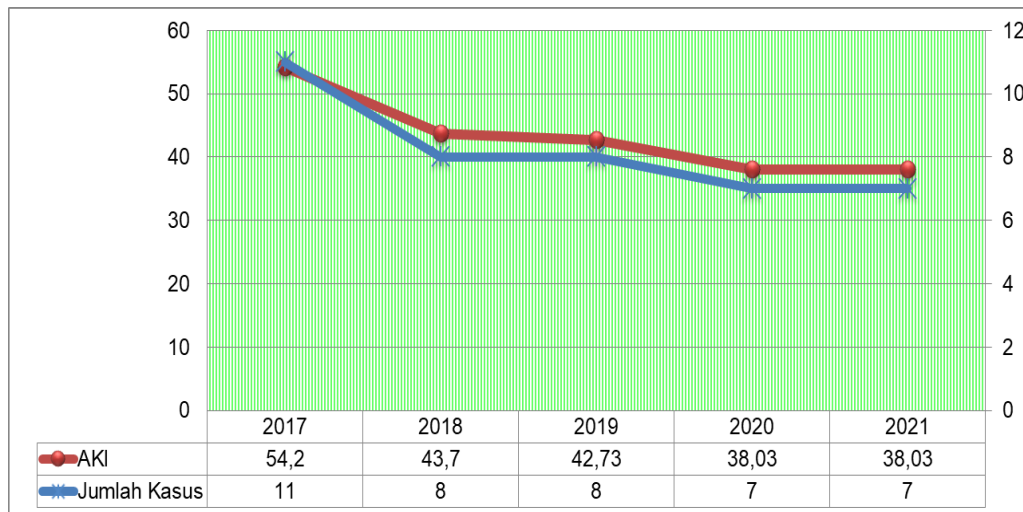
Sumber: Dinas Kesehatan Kab. Lampung Selatan, 2022

Gambar 6. Kondisi Angka Kematian Bayi pada Kabupaten Lampung Selatan tahun 2017-2021

AKB di Kabupaten Lampung Selatan dalam lima tahun terakhir mengalami tren penurunan dari tahun 2017. Pada Tahun 2021 AKB di Kabupaten Lampung Selatan sebesar 0,89 per 1.000 kelahiran hidup dengan jumlah kasus kematian bayi sebanyak 16 kasus mengalami penurunan dari Tahun 2017 yang sebesar 1,81 per 1.000 kelahiran hidup dengan jumlah kematian bayi sebanyak 35 kasus. Penyebab kematian bayi di Kabupaten Lampung Selatan adalah BBLR, aspeksia, kelainan kongenital, dan lainlain. Langkah pemerintah daerah telah dilakukan untuk menekan AKB antara lain dengan upaya sejak awal kehamilan melalui program ANC (Ante Natal Care) yang berkualitas dan berintergrasi dengan berbagai lintas program.

3.2.2 Angka Kematian Ibu (AKI)

Angka Kematian Ibu (AKI) adalah banyaknya kematian perempuan pada saat hamil atau selama 42 hari sejak terminasi kehamilan tanpa memandang lama dan tempat persalinan, yang disebabkan karena kehamilannya atau pengelolaannya, dan bukan karena sebab-sebab lain, per 100.000 kelahiran hidup. Informasi mengenai tingginya AKI akan bermanfaat untuk pengembangan program peningkatan kesehatan reproduksi, terutama pelayanan kehamilan dan membuat kehamilan yang aman bebas risiko tinggi (*making pregnancy safer*), program peningkatan jumlah kelahiran yang dibantu oleh tenaga kesehatan, penyiapan sistem rujukan dalam penanganan komplikasi kehamilan, penyiapan keluarga dan suami siaga dalam menyongsong kelahiran, yang semuanya bertujuan untuk mengurangi Angka Kematian Ibu dan meningkatkan derajat kesehatan reproduksi. Berikut adalah kondisi AKI pada Kabupaten Lampung Selatan:



Sumber: Dinas Kesehatan Kab. Lampung Selatan, 2022

Gambar 7. Kondisi Angka Kematian Ibu pada Kabupaten Lampung Selatan tahun 2017-2021

Jumlah kasus terus mengalami penurunan rati tahun dasar 2017-2021 sebanyak 1 orang pada setiap tahunnya, diikuti oleh persentase penurunan dari angka awal tahun 2017 sebesar 54,2% terus menurun dan pada tahun 2021 sebesar 38,03%. Penyebab kematian ibu di Kabupaten Lampung Selatan berdasarkan hasil Audit Maternal Perinatal (AMP) adalah pendarahan, eklampsia dan Emboli Air Ketuban. Berbagai upaya telah dilakukan untuk menekan AKB antara lain perbaikan status gizi ibu hamil, kesadaran perilaku terhadap PHBS, kesehatan lingkungan serta peningkatan kualitas pelayanan kesehatan ibu hamil dan tata laksana pertolongan persalinan normal yang optimal serta mengurangi peran dukun dan meningkatkan peran bidan, sehingga para bidan di desa sebagai ujung tombak pelayanan kesehatan ibu dan anak, dengan meningkatkan ketrampilan dan kemampuannya melalui pelatihan kebidanan dan sejenisnya.

3.2.3. Strategi

Peningkatan pelayanan maternal dan neonatal berkesinambungan di fasilitas public dan swasta dengan mendorong seluruh persalinan di fasilitas kesehatan, peningkatan cakupan dan kualitas pelayanan antenatal dan neonatal, peningkatan kompetensi tenaga kesehatan terutama bidan, perbaikan sistem rujukan maternal, penyediaan sarana prasarana dan farmasi, jaminan ketersediaan darah setiap saat, dan pencatatan kematian ibu di fasilitas pelayanan Kesehatan.

3.2.4. Program

1. Peningkatan Akses Pelayanan Kesehatan Balita: yaitu peningkatan fasilitas kesehatan (Puskesmas, Bidan Praktek Swasta dan RSUD) dalam penanganan kegawat daruratan ibu dan bayi, ketersediaan rumah tunggu kelahiran, Penurunan angka kematian ibu dan Balita per 1.000 Kelahiran Hidup.
2. Peningkatan Akses Pelayanan Kesehatan bayi: yaitu peningkatan fasilitas kesehatan (Puskesmas, Bidan Praktek Swasta dan RSUD) dalam penanganan kegawat daruratan ibu dan bayi, ketersediaan rumah tunggu kelahiran untuk Penurunan angka kematian bayi dan Balita per 1.000 Kelahiran Hidup.

BAB 4

KUALITAS PENDUDUK

Penduduk yang berkualitas adalah kondisi penduduk yang meliputi aspek fisik dan non-fisik serta ketaqwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Kualitas penduduk ini menjadi dasar untuk mengembangkan kemampuan individu dan menikmati kehidupan sebagai manusia yang berbudaya, berkepribadian, dan layak. Selain itu, kualitas penduduk juga terkait dengan tingkat atau taraf kehidupan penduduk dalam memenuhi kebutuhan seperti pangan, sandang, perumahan, kesehatan, dan pendidikan.

Salah satu indikator yang digunakan untuk mengukur kualitas penduduk adalah Indeks Pembangunan Manusia (IPM), yang mencakup pendapatan, kesehatan, pendidikan, dan indikator lainnya. Konsep kualitas penduduk pertama kali diperkenalkan oleh United Nations Development Programme (UNDP) pada tahun 1990. Kualitas penduduk memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kemajuan suatu negara, terkait dengan kemampuan penduduk dalam mengelola sumber daya alam dan sumber daya manusia untuk mencapai kesejahteraan bersama.

Pembangunan kualitas penduduk ditentukan oleh tiga faktor utama, yaitu pembangunan pendidikan, pembangunan kesehatan, dan pembangunan ekonomi. Oleh karena itu, untuk meningkatkan kualitas penduduk, perlu fokus pada pengembangan sektor pendidikan, kesehatan, dan ekonomi. Tujuan dari peningkatan kualitas penduduk di Indonesia, termasuk di Kabupaten Lampung Selatan pada tahun 2035, adalah memiliki penduduk yang sehat, cerdas, produktif, mandiri, kompetitif, berakhlak mulia, dan berkarakter. Kondisi ini menjadi dasar untuk mengembangkan kemampuan individu dan menikmati kehidupan sebagai manusia yang taqwa, berbudaya, berkepribadian, berkebangsaan, dan hidup layak.

Penduduk yang sehat tidak hanya memiliki umur panjang, tetapi juga produktif, cerdas, dan memiliki daya saing. Penduduk yang berkualitas

diharapkan mampu menghadapi tantangan pasar global. Oleh karena itu, strategi peningkatan kualitas penduduk harus berfokus pada tiga dimensi utama, yaitu pendidikan, kesehatan, dan ekonomi.

4.1. Dimensi Pendidikan

Pendidikan memainkan peran yang sangat penting dalam menentukan kemajuan suatu bangsa. Kualitas pendidikan yang baik akan menghasilkan siswa-siswa yang memiliki berbagai kemampuan, yang pada gilirannya akan mendorong perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Pendidikan merupakan modal dasar dalam mengembangkan kemampuan intelektual seseorang. Melalui pendidikan, seseorang dapat meningkatkan kemampuan kognitif, afektif, dan psikomotoriknya. Hal ini diwujudkan dalam bentuk kemampuan untuk memecahkan berbagai masalah dengan mengembangkan kreativitas.

Pendidikan sangat penting dalam meningkatkan pengetahuan dan keterampilan penduduk guna mendukung pembangunan bangsa. Semakin tinggi tingkat pendidikan penduduk di suatu negara, semakin besar kemampuan mereka dalam mengelola sumber daya secara mandiri. Namun, Indonesia menghadapi tantangan besar dalam mengatasi kesenjangan pendidikan. Pembangunan yang tidak merata menyebabkan perbedaan kualitas pendidikan antara daerah satu dengan daerah lainnya. Faktor ini disebabkan oleh rendahnya tingkat pendapatan masyarakat di beberapa daerah, kurangnya sarana dan prasarana pendidikan yang memadai, serta kurangnya kesadaran masyarakat akan pentingnya pendidikan.

Untuk mengatasi persoalan ini, perlu dilakukan upaya yang serius dan terarah. Pemerintah perlu mengalokasikan sumber daya yang cukup untuk pengembangan pendidikan di seluruh daerah. Diperlukan perencanaan yang matang dalam membangun sarana dan prasarana pendidikan yang memadai, termasuk peningkatan kualitas guru dan tenaga pendidik. Selain itu, penting

untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya pendidikan melalui kampanye dan program edukasi yang efektif.

Dengan langkah-langkah tersebut, diharapkan dapat mengatasi kesenjangan pendidikan dan meningkatkan kualitas pendidikan secara keseluruhan di Indonesia. Pendidikan yang berkualitas akan membawa dampak positif bagi pembangunan bangsa, dengan penduduk yang memiliki pengetahuan dan keterampilan yang memadai untuk menghadapi tantangan dan memajukan negara ke arah yang lebih baik.

4.1.1 Perkembangan Pendidikan

Pendidikan memiliki peran yang sangat penting dalam meningkatkan daya saing suatu negara atau daerah. Kabupaten Lampung Selatan, dengan posisi strategisnya, memerlukan sumber daya manusia yang handal dan kompeten untuk dapat menghadapi tantangan perubahan yang cepat dan kompleks.

Dalam menghadapi perubahan yang cepat, pendidikan berperan sebagai landasan utama dalam mempersiapkan individu untuk menghadapi tantangan tersebut. Pendidikan yang berkualitas akan memberikan pengetahuan, keterampilan, dan pemahaman yang diperlukan agar seseorang dapat beradaptasi dengan perubahan, mengembangkan potensi diri, serta berkontribusi secara positif dalam pembangunan daerah.

4.1.2 Angka Melek Huruf

Angka Melek Huruf (AMH) merupakan proporsi penduduk usia 15 tahun ke atas yang mempunyai kemampuan membaca dan menulis huruf latin dan huruf lainnya, tanpa harus mengerti apa yang dibaca/ditulisnya terhadap penduduk usia 15 tahun ke atas. Berikut adalah data angka melek huruf Kabupaten Lampung Selatan :

Tabel 6. Persentase Penduduk Berumur 15 Tahun ke Atas yang Melek Huruf Menurut Kelompok Umur

Kelompok Umur	2019 (%)	2020 (%)
15-19	100,00	100,00
20-24	100,00	100,00
25-29	100,00	100,00
30-34	100,00	99,54
35-39	100,00	100,00
40-44	100,00	100,00
45-49	98,70	100,00
50+	89,82	86,73
Jumlah	98,56	98,28
15-24	100,00	100,00
15-44	100,00	99,92
15+	97,25	96,42
45+	92,08	90,05

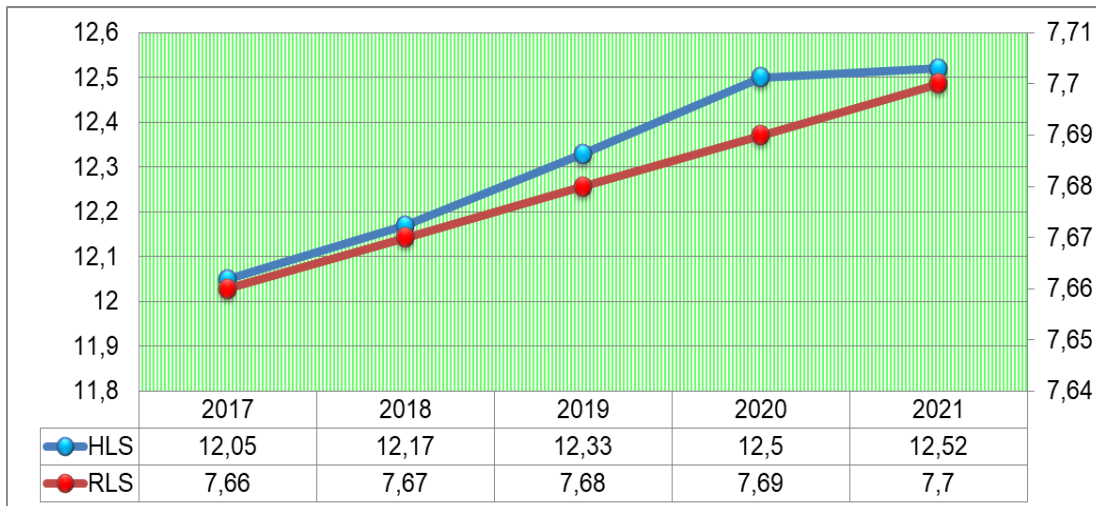
Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Lampung Selatan, 2021

Angka melek huruf Kabupaten Lampung Selatan sepanjang tahun 2019-2020 mengalami penurunan dari sebesar 98,56 persen menjadi 98,28 persen. Pada kelompok umur 30-34 dari 100% terjadi penurunan menjadi 99,54%, kelompok umur 50+ dari 89,82% terjadi penurunan menjadi 86,73%. Angka peningkatan terjadi pada umur 45-49 dari 98,70% menjadi 100%. Akumulasi Jumlah penurunan tersebut terjadi pada jenjang umum 15-44 tahun 100% menjadi 99,92%, 15 tahun keatas 97,25% menjadi 96,42%, dan 45 tahun keatas 92,08% menjadi 90,05%. Semakin tinggi angka melek huruf suatu penduduk maka akan meningkatkan mutu dan kualitas SDM. Penduduk yang bisa baca tulis diasumsikan memiliki kemampuan dan keterampilan karena dapat menyerap informasi baik itu lisan maupun tulisan.

4.1.3 Angka Harapan Lama Sekolah dan Rata-rata Lama Sekolah

Angka Harapan Lama Sekolah (HLS) didefinisikan sebagai lamanya sekolah (dalam tahun) yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu di masa mendatang. Angka HLS menunjukkan peluang anak usia 7 tahun ke atas untuk mengenyam pendidikan formal pada waktu tertentu. HLS digunakan untuk mengetahui kondisi pembangunan sistem pendidikan di

berbagai jenjang. Sedangkan rata-rata lama sekolah (RLS) didefinisikan sebagai jumlah tahun yang digunakan oleh penduduk dalam menjalani pendidikan formal. Penduduk yang tamat SD diperhitungkan lama sekolah selama 6 tahun, tamat SMP diperhitungkan lama sekolah selama 9 tahun, tamat SMA diperhitungkan lama sekolah selama 12 tahun tanpa memperhitungkan apakah pernah tinggal kelas atau tidak. RLS digunakan untuk mengetahui tingkat pendidikan masyarakat dalam suatu wilayah. Angka Harapan Lama Sekolah (HLS) didefinisikan sebagai lamanya sekolah (dalam tahun) yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu di masa mendatang, Berikut adalah HLS dan RLS Kabupaten Lampung Selatan:



Sumber : BPS, Kabupaten Lampung Selatan, 2022

Gambar 8. Perkembangan Harapan Lama Sekolah (HLS) dan Rata-rata Lama Sekolah (RLS) di Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2017-2021

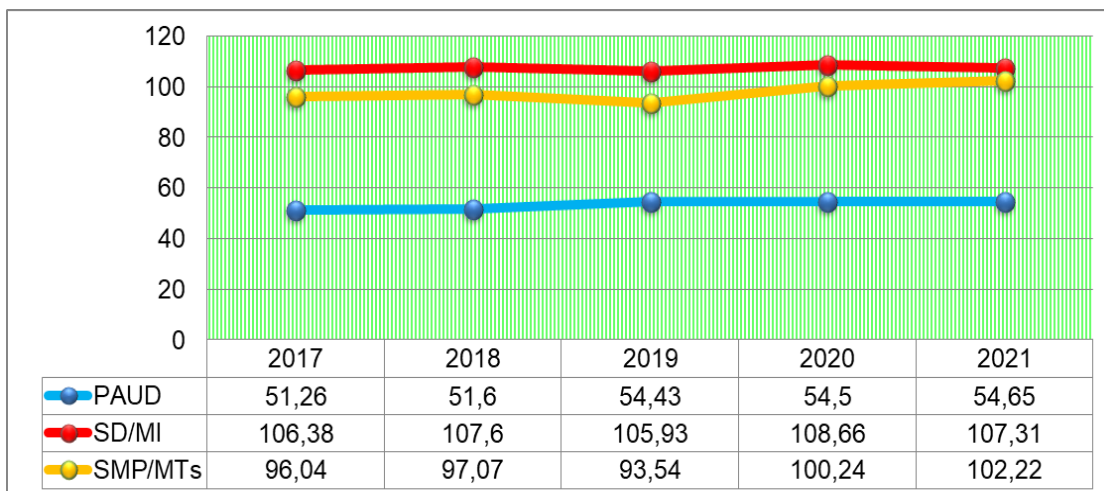
Pada perkembangan Harapan Lama Sekolah (HLS) Kabupaten Lampung Selatan sepanjang tahun memiliki harapan rata-rata masyarakat bersekolah sampai 12 Tahun rata-rata penduduk berpendidikan sampai jenjang sekolah menengah atas (SMA). Pada sisi rata-rata lama sekolah masyarakat Kabupaten Lampung Selatan sepanjang tahun dari tahun 2017 memiliki rata-rata masyarakat dalam jenjang pendidikan selama 7,66 Tahun atau sampai kepada jenjang SMP sampai tahun 2021 sebesar 7,7 Tahun. Kabupaten

Lampung Selatan diindikasikan masih minimnya kualitas pendidikan dikarenakan faktor capaian terhadap RLS belum mencapai harapan lama sekolah yang tinggi.

4.1.4 Angka Partisipasi Kasar (APK)

Angka Partisipasi Kasar (APK), menunjukkan partisipasi penduduk yang sedang mengenyam pendidikan sesuai dengan jenjang pendidikannya. APK merupakan persentase jumlah penduduk yang sedang bersekolah pada suatu jenjang pendidikan (berapapun usianya) terhadap jumlah penduduk usia sekolah yang sesuai dengan jenjang pendidikan tersebut. APK digunakan untuk mengukur keberhasilan program pembangunan pendidikan yang diselenggarakan dalam rangka memperluas kesempatan bagi penduduk untuk mengenyam pendidikan. APK merupakan indikator yang paling sederhana untuk mengukur daya serap penduduk usia sekolah di masing-masing jenjang pendidikan.

Nilai APK bisa lebih dari 100%. Hal ini disebabkan karena populasi murid yang bersekolah pada suatu jenjang pendidikan mencakup anak berusia di luar batas usia sekolah pada jenjang pendidikan yang bersangkutan. Sebagai contoh, banyak anak-anak usia diatas 12 tahun, tetapi masih sekolah di tingkat SD atau juga banyak anak-anak yang belum berusia 7 tahun tetapi telah masuk SD. Adanya siswa dengan usia lebih tua dibanding usia standar di jenjang pendidikan tertentu menunjukkan terjadinya kasus tinggal kelas atau terlambat masuk sekolah. Sebaliknya, siswa yang lebih muda dibanding usia standar yang duduk di suatu jenjang pendidikan menunjukkan siswa tersebut masuk sekolah di usia yang lebih muda. Berikut adalah kondisi APK Kabupaten Lampung Selatan:



Sumber : BPS, Kabupaten Lampung Selatan, 2022

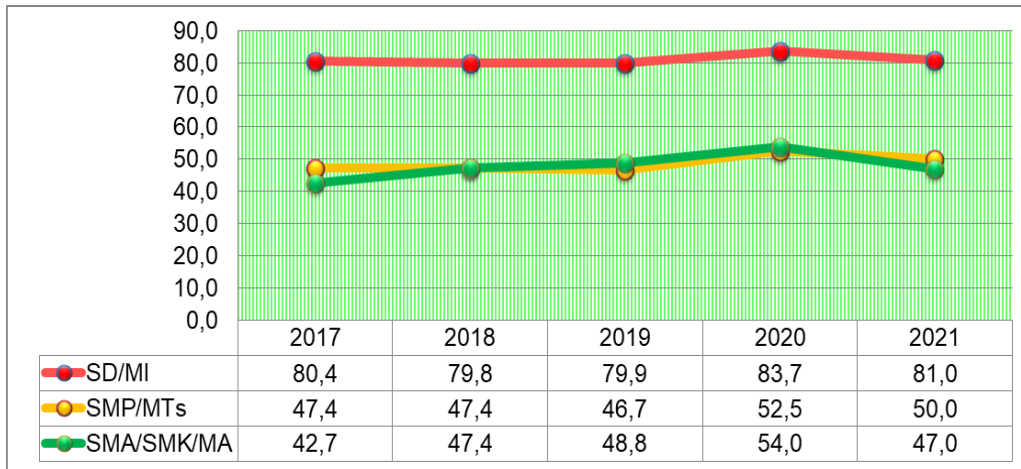
Gambar 9. Perkembangan Angka Partisipasi Kasar (APK) menurut Jenjang Pendidikan di Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2017-2021

Nilai APK Kabupaten Lampung Selatan dari sisi PAUD terlihat terus mengalami peningkatan dari awal 2017 sebesar 51,26% dan terakhir tahun 2021 sebesar 54,65% diikuti oleh peningkatan pada Sekolah dasar SD/MI Tahun 2017 sebesar 106,38 tahun 2021 sebesar 107,31% dan yang terakhir pada cakupan SMP/MTs pada tahun 2017 sebesar 96,4% terus mengalami peningkatan pada tahun 2021 sebesar 102,22%. APK adalah perbandingan antara siswa pada jenjang pendidikan tertentu dengan penduduk usia sekolah dan dinyatakan dalam persentase. Makin tinggi APK berarti makin banyak anak usia sekolah yg bersekolah di jenjang pendidikan tertentu atau banyak anak di luar usia sekolah, secara keseluruhan APK Kabupaten Lampung Selatan terus meningkat dan masyarakat mampu mengakses jenjang pendidikan yang selengkapnya ia dapatkan.

4.1.5 Angka Partisipasi Murni (APM)

Angka Partisipasi Murni (APM) adalah persentase jumlah anak pada kelompok usia sekolah tertentu yang sedang bersekolah pada jenjang pendidikan yang sesuai dengan usianya terhadap jumlah seluruh anak pada kelompok usia sekolah yang bersangkutan. Bila APK digunakan untuk

mengetahui seberapa banyak penduduk usia sekolah yang sudah dapat memanfaatkan fasilitas pendidikan di suatu jenjang pendidikan tertentu tanpa melihat berapa usianya, maka APM mengukur proporsi anak yang bersekolah tepat waktu. Berikut adalah gambaran angka partisipasi Murni Kabupaten Lampung Selatan:



Sumber : BPS, Kabupaten Lampung Selatan, 2022

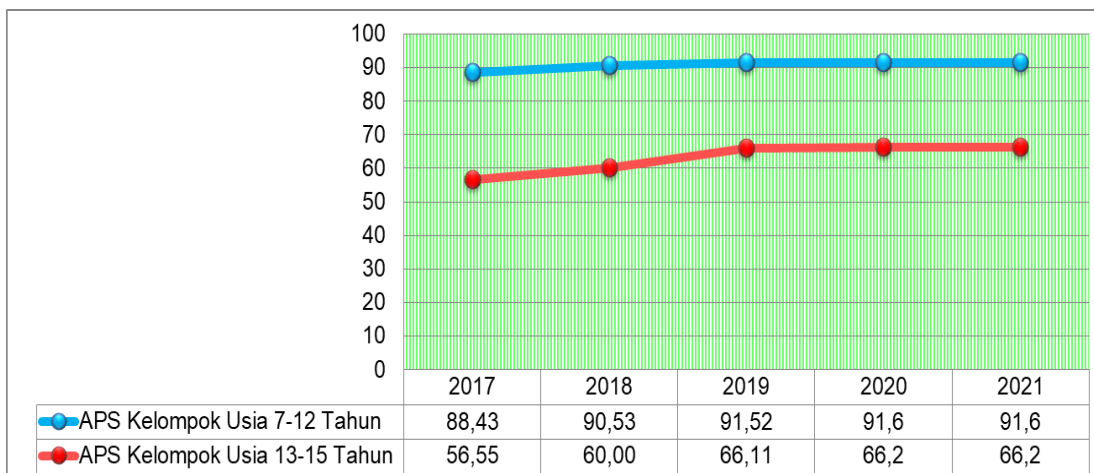
Gambar 10. Perkembangan Angka Partisipasi Murni (APM) menurut Jenjang Pendidikan di Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2017-2021

Angka Partisipasi murni dengan tingkatan paling tinggi terdapat pada jenjang SD/MI dimana angka tahun awal 2017 sebesar 80,4% dan pada tahun akhir 2021 sebesar 81,0%, diikuti oleh jenjang SMP/MTs yang tergolong rendah angka tahun awal 2017 sebesar 47,4% dan pada tahun akhir 2021 sebesar 50,0%, terakhir keadaan jenjang SMA/SMK/MA yang tergolong rendah angka tahun awal 2017 sebesar 42,7% dan pada tahun akhir 2021 sebesar 47,0%. Bila seluruh anak usia sekolah dapat bersekolah tepat waktu, maka APM akan mencapai nilai 100. Secara umum, nilai APM akan selalu lebih rendah dari APK karena nilai APK mencakup anak diluar usia sekolah pada jenjang pendidikan yang bersangkutan. Selisih antara APK dan APM menunjukkan proporsi siswa yang terlambat atau terlalu cepat bersekolah. Keterbatasan APM

adalah kemungkinan adanya under estimate karena adanya siswa diluar kelompok usia yang standar di tingkat pendidikan tertentu.

4.1.6 Angka Partisipasi Sekolah (APS)

Angka Partisipasi Sekolah (APS) adalah Proporsi dari semua anak yang masih sekolah pada suatu kelompok umur tertentu terhadap penduduk dengan kelompok umur yang sesuai. APS dikenal sebagai salah satu indikator keberhasilan pembangunan layanan pendidikan di suatu daerah. Semakin tinggi nilai APS, maka daerah tersebut dianggap berhasil menyelenggarakan layanan akses pendidikan. APS yang tinggi menunjukkan terbukanya peluang yang lebih besar dalam mengakses pendidikan secara umum. Pada kelompok umur mana peluang tersebut terjadi dapat dilihat dari besarnya APS pada setiap kelompok umur. Angka Partisipasi Sekolah merupakan ukuran daya serap lembaga pendidikan terhadap penduduk usia sekolah. APS merupakan indikator dasar yang digunakan untuk melihat akses penduduk pada fasilitas pendidikan khususnya bagi penduduk usia sekolah di suatu wilayah/daerah. Semakin tinggi APS semakin besar jumlah penduduk yang berkesempatan mengenyam pendidikan. Namun demikian meningkatnya APS tidak selalu dapat diartikan sebagai meningkatnya pemerataan kesempatan masyarakat untuk mengenyam pendidikan. Berikut adalah kondisi APS Kabupaten Lampung Selatan:



Sumber : BPS, Kabupaten Lampung Selatan, 2022

Gambar 11. Perkembangan Angka Partisipasi Sekolah (APS) menurut Jenjang Pendidikan di Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2017-2021

Dari gambar di atas tergambar bahwa Angka Partisipasi Sekolah mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Untuk kategori Pendidikan Dasar (7-12 tahun) angka tahun dasar 2017 sebesar 88,43% terus mengalami peningkatan hingga tahun 2021 sebesar 91,6%, dan kategori Pendidikan Menengah Pertama (13-15 tahun) angka tahun dasar 2017 sebesar 56,55% terus mengalami peningkatan hingga tahun 2021 sebesar 66,2%. Namun terlihat bahwa tidak semua siswa yang lulus dari Pendidikan Dasar melanjutkan pendidikan ke tingkat Menengah Pertama, keadaan yang dominan pada jenjang APS usia (7-12 tahun).

4.1.7 Strategi Perkembangan Pendidikan

1. Peningkatan akses dan perluasan kesempatan belajar yang sama bagi anak usia sekolah, target utama daerah dan masyarakat kelompok rentan, khususnya penduduk miskin, penduduk yang terisolir dan daerah terisolir.
2. Prioritas pada pengembangan pendidikan informal dan non formal dan kebijakan pendidikan harus disusun berdasarkan kebutuhan kualifikasi SDM disetiap koridor.

3. Peningkatan kualitas dan relevansi pendidikan dengan menerapkan standar nasional pendidikan sebagai acuan dan rambu-rambu hukum untuk meningkatkan mutu berbagai aspek pendidikan nasional termasuk mutu pendidikan dan tenaga kependidikan, mutu sarana dan prasarana pendidikan, kompetensi lulusan, pembiayaan pendidikan dan penilaian pendidikan.
4. Mendorong pelaksanaan otonomi pendidikan dan desentralisasi pengelolaan pendidikan sampai dengan satuan pendidikan dalam penyelenggaraan pendidikan.
5. Memperkuat manajemen pelayanan pendidikan dalam rangka membangun pelayanan pendidikan.
6. Pengembangan teknologi informasi dan komunikasi dibidang pendidikan sebagai ilmu pengetahuan, alat bantu pembelajaran, fasilitas pendidikan, standar kompetensi, penunjang administrasi pendidikan, alat bantu manajemen satuan pendidikan, dan infrastruktur pendidikan.
7. Meningkatkan penelitian dan pengembangan pendidikan untuk menyusun kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan pendidikan.

4.1.8 Program Perkembangan Pendidikan

1. Peningkatan Angka Partisipan murni untuk segala jenjang SD/SMP/SMA.
2. Peningkatan Angka Kasar untuk segala jenjang SD/SMP/SMA.
3. Penyuluhan dan peningkatan wajib belajar 12 tahun untuk rata-rata lama sekolah.
4. Penyuluhan dan peningkatan pada angka partisipasi kasar untuk anak dibawah umur program PAUD dan partisipan jenjang lebih tinggi menuju perguruan tinggi.

4.2. Dimensi Kesehatan

Kesehatan memainkan peran yang sangat penting dalam kinerja dan aktivitas penduduk. Rendahnya kualitas kesehatan dapat memiliki beberapa

penyebab, antara lain kurangnya kesadaran masyarakat dalam menjaga kesehatan, adanya masalah gizi buruk, kurangnya sarana dan prasarana kesehatan yang memadai, serta penularan penyakit oleh virus dan bakteri.

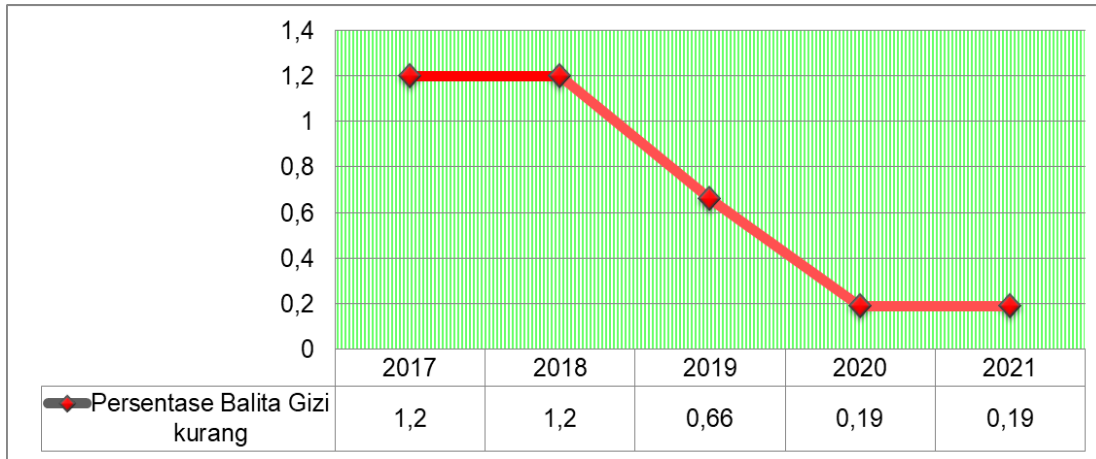
Tingkat kesehatan penduduk yang tinggi dalam suatu negara akan meningkatkan kemampuan mereka dalam mengelola sumber daya secara mandiri. Namun, Indonesia menghadapi tantangan besar dalam mengatasi kesenjangan kesehatan. Pembangunan yang tidak merata menyebabkan perbedaan kualitas kesehatan antar daerah. Faktor ini disebabkan oleh rendahnya tingkat pendapatan masyarakat di beberapa daerah, kurangnya sarana dan prasarana yang memadai untuk mendukung kegiatan kesehatan, serta kurangnya kesadaran masyarakat akan pentingnya kesehatan.

4.2.1. Perkembangan Kesehatan

Kesehatan merupakan salah satu prioritas pembangunan di Kabupaten Lampung Selatan selain pendidikan, dan menjadi penentu paling utama daya saing suatu negara atau daerah. Sebagai daerah dengan posisi strategis, dibutuhkan sumber daya manusia yang handal untuk dapat menjawab tantangan perubahan yang sangat cepat dan semakin kompleks. Ada beberapa indikator derajat kesehatan yang penting untuk menentukan status kualitas sumber daya manusia antara lain Gizi buruk, Berat Badan Lahir Rendah, dan Stunting. Gizi buruk adalah istilah teknis yang umumnya dipakai oleh kalangan ahli gizi, kesehatan dan kedokteran. Gizi buruk adalah bentuk terparah dari proses terjadinya kekurangan gizi menahun.

Anak balita sehat atau kurang gizi secara sederhana dapat diketahui dengan membandingkan antara berat badan menurut umumnya dengan rujukan (standar) yang telah ditetapkan. Apabila berat badan anak balita jauh dibawah standar dikatakan gizi buruk. Gizi buruk ini istilah dimasyarakat adalah “busung lapar”, yang sebenarnya adalah keadaan yang terjadi akibat kekurangan pangan dalam kurun waktu tertentu, sehingga mengakibatkan kurangnya asupan zat gizi yang diperlukan, yang akhirnya berdampak pada

kondisi status menjadi kurang atau buruk. Berikut adalah gambaran keadaan kondisi Balita Gizi Buruk Kabupaten Lampung Selatan:



Sumber : BPS, Kabupaten Lampung Selatan, 2022

Gambar 12. . Perkembangan Balita Gizi Buruk Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2017-2021.

Keadaan balita gizi buruk pada tahun dasar data 2017 sebesar 1,2% mulai mengalami penurunan dari tahun 2019 sebesar 0,66% dan tahun terakhir kembali mengalami penurunan pada tahun 2021 sebesar 0,19, perkembangan angka tersebut terbilang positif tingkatan keadaan balita yang semakin membaik ditandai dari penurunan persentase setiap tahunnya. Kurang gizi tingkat berat disebabkan oleh rendahnya konsumsi energi dan protein dari makanan sehari-hari yang terjadi dalam waktu yang cukup lama. Berikut adalah standar dari WHO dan Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor: 1995/MENKES/SK/XII/2010: 1 Batas gizi kurang pada balita yaitu antara < -2.0 SD sampai dengan -3.0 SD baku WHO. Dalam lima tahun terakhir, persentase gizi kurang di Kabupaten Lampung Selatan cenderung mengalami penurunan. Hal ini mengindikasikan bahwa persentase balita gizi kurang di Lampung Selatan berada di bawah ambang batas atas yang telah ditetapkan oleh WHO dan Kementerian Kesehatan RI.

4.2.2. Stunting

Penanganan stunting merupakan fokus prioritas pembangunan di Kabupaten Lampung Selatan. Desa lokus penanganan stunting selalu mengalami peningkatan setiap tahunnya. Pada Tahun 2020 terdapat 10 Desa lokus stunting, meningkat pada Tahun 2021 menjadi 17 Desa dan pada Tahun 2022 sebanyak 22 Desa lokus stunting. Desa lokus stunting ini tersebar di 10 Kecamatan di Lampung Selatan. Berikut adalah data lokus stunting:

Tabel 7. Desa Lokus Stunting Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2020-2022

No	Desa/Kelurahan	Tahun Pelaksanaan di Lokasi Fokus		
		2020	2021	2022
1	Mekar Mulya		√	√
2	Tanjung Sari	√	√	
3	Agom		√	
4	Pauh Tanjung Iman		√	√
5	Tetaan		√	
6	Bangunan		√	
7	Pisang		√	
8	Pasuruan		√	
9	Bulok		√	
10	Padan		√	
11	Rawa Selapan		√	
12	Sumber Sari		√	
13	Sidoasri	√	√	
14	Kekiling		√	
15	Neglasari		√	
16	Palas Aji		√	
17	Babulang		√	√
18	Gedung Agung	√		
19	Jati Baru	√		
20	Tanjung Agung	√		
21	Merak Belantung	√		
22	Bandar Rejo	√		
23	Bandar Agung	√		
24	Mandah	√		
25	Wonodadi	√		
26	Kali Asin			√

No	Desa/Kelurahan	Tahun Pelaksanaan di Lokasi Fokus		
		2020	2021	2022
27	Bumi Agung			√
28	Tengkujuh			√
29	Maja			√
30	Pematang			√
31	Kecapi			√
32	Sukaratu			√
33	Palembapang			√
34	Negeri Pandan			√
35	Banjar Suri			√
36	Sidowaluyo			√
37	Karya Tunggal			√
38	Jati Mulyo			√
39	Sidoharjo			√
40	Karang Sari			√
41	Panca Tunggal			√
42	Totoharjo			√
43	Kemukus			√

Sumber : Dinas Kesehatan, Kabupaten Lampung Selatan, 2022

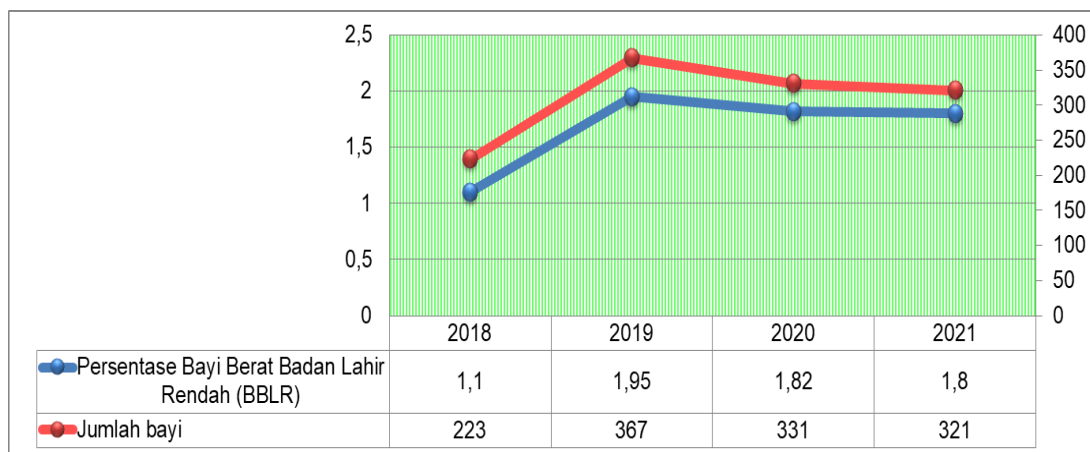
Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan melalui Dinas Kesehatan telah melakukan penghitungan terhadap angka stunting di Lampung Selatan. Dari hasilnya diketahui bahwa angka stunting di Kabupaten Lampung Selatan terjadi penurunan yang sangat signifikan, dimana angka balita yang mengalami stunting berjumlah 29,08 persen pada Tahun 2018 menurun menjadi 3,61 persen pada Tahun 2020. Hal ini merupakan pencapaian hasil yang baik dari seluruh program dan kegiatan yang dilakukan serta kerjasama antar sektor yang terus dijaga yang menyebabkan angka kejadian stunting di Lampung Selatan.

4.2.3. Persentase Berat Badan Bayi Lahir Rendah (BBLR)

Bayi dengan Berat Badan Lahir Rendah (BBLR) adalah bayi baru lahir dengan berat badan kurang dari 2500 gr. Ada berbagai faktor yang dapat menyebabkan atau meningkatkan risiko seorang bayi terlahir dengan berat badan yang kurang. Beberapa faktor tersebut meliputi:

- 1) Terlahir dari ibu yang memiliki masalah kesehatan selama hamil, misalnya preeklamsia, tekanan darah tinggi, atau kekurangan gizi.
- 2) Infeksi selama kehamilan.
- 3) Adanya kelainan genetik atau cacat bawaan lahir pada bayi.
- 4) Terlahir dari ibu dengan berat badan kurang selama kehamilan.
- 5) Usia ibu saat hamil kurang dari 20 tahun atau lebih dari 35 tahun.
- 6) Kehamilan kembar.
- 7) Ibu yang memiliki gaya hidup yang tidak sehat, seperti merokok, mengonsumsi alkohol, dan menggunakan narkoba.

Berikut adalah data Berat Badan Lahir Rendah (BBLR) di Kabupaten Lampung Selatan:



Sumber : *Profile Kesehatan, Kabupaten Lampung Selatan, 2022*

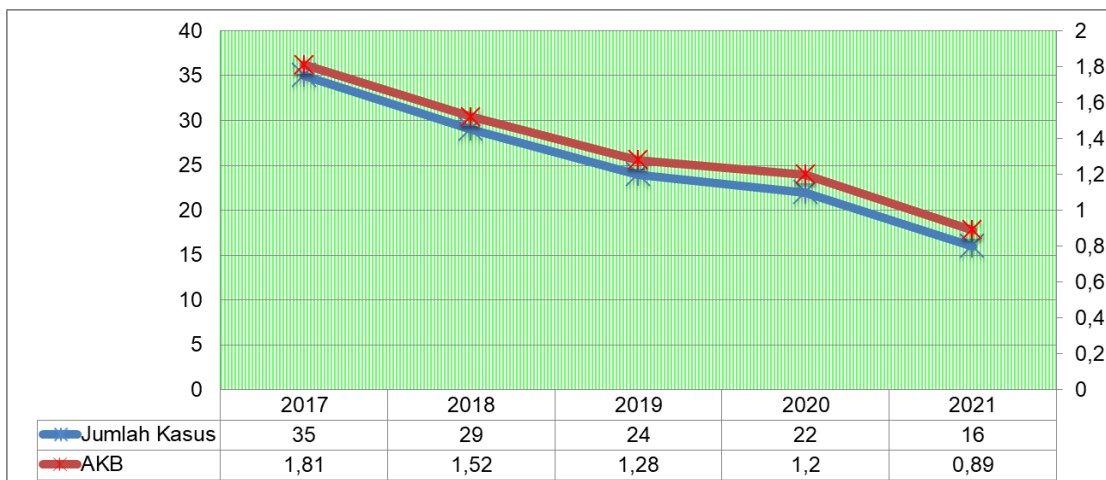
Gambar 13. Perkembangan Berat Badan Lahir Rendah (BBLR) Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2018-2022.

Data diatas menunjukkan tahun 2018 memiliki jumlah 223 bayi dengan persentase (1,1%) dari jumlah 19.407 bayi baru lahir, dan terus mengalami penurunan Cakupan bayi dengan BBLR pada tahun 2019 mencapai 367 bayi (1,95%) dari jumlah 18.808 bayi baru lahir, tahun 2020 mencapai 331 bayi (1,82%) dari jumlah 18.650 bayi baru lahir tahun 2021 mencapai 321 bayi (1,8%) dari jumlah 17.648 bayi lahir. Kebanyakan bayi dengan berat badan

lahir rendah yang lahir cukup bulan tidak mengalami gangguan kesehatan di kemudian hari. Tapi jika BBLR terjadi pada bayi prematur, maka dapat muncul beberapa komplikasi berikut ini gangguan pernafasan, infeksi, hipoglikemia, sindrom kematian bayi mendadak (SIDS), berat badan sulit bertambah, hambatan tumbuh kembang, hipotermia, bayi kuning atau gangguan makan atau kesulitan untuk menyusui.

4.2.4. Angka Kematian Bayi (AKB)

Angka Kematian Bayi (AKB) adalah angka yang menunjukkan banyaknya kematian bayi usia 0 tahun dari setiap 1000 kelahiran hidup pada tahun tertentu atau dapat dikatakan juga sebagai probabilitas bayi meninggal sebelum mencapai usia satu tahun (dinyatakan dengan per seribu kelahiran hidup). Angka kematian bayi merupakan indikator yang penting untuk mencerminkan keadaan derajat kesehatan di suatu masyarakat, karena bayi yang baru lahir sangat sensitif terhadap keadaan lingkungan tempat orang tua si bayi tinggal dan sangat erat kaitannya dengan status sosial orang tua bayi. Kemajuan yang dicapai dalam bidang pencegahan dan pemberantasan berbagai penyakit penyebab kematian akan tercermin secara jelas dengan menurunnya tingkat AKB. Dengan demikian angka kematian bayi merupakan tolok ukur yang sensitif dari semua upaya intervensi yang dilakukan oleh pemerintah khususnya di bidang kesehatan. Berikut adalah kondisi AKB pada Kabupaten Lampung Selatan:



Sumber: Dinas Kesehatan Kab. Lampung Selatan, 2022

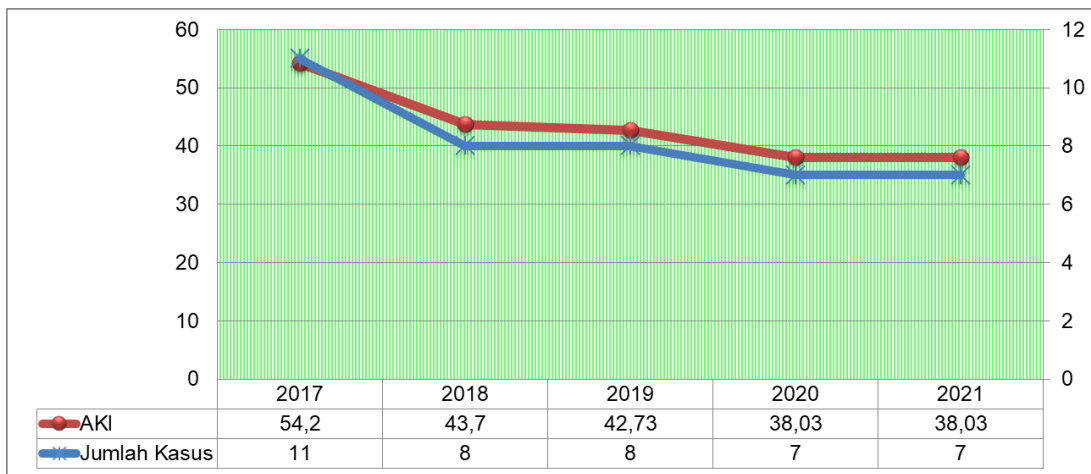
Gambar 14. Kondisi Angka Kematian Bayi pada Kabupaten Lampung Selatan tahun 2017-2021

AKB di Kabupaten Lampung Selatan dalam lima tahun terakhir mengalami tren penurunan dari tahun 2017. Pada Tahun 2021 AKB di Kabupaten Lampung Selatan sebesar 0,89 per 1.000 kelahiran hidup dengan jumlah kasus kematian bayi sebanyak 16 kasus mengalami penurunan dari Tahun 2017 yang sebesar 1,81 per 1.000 kelahiran hidup dengan jumlah kematian bayi sebanyak 35 kasus. Penyebab kematian bayi di Kabupaten Lampung Selatan adalah BBLR, aspeksia, kelainan kongenital, dan lainlain. Langkah pemerintah daerah telah dilakukan untuk menekan AKB antara lain dengan upaya sejak awal kehamilan melalui program ANC (Ante Natal Care) yang berkualitas dan berintergrasi dengan berbagai lintas program.

4.2.5. Angka Kematian Ibu (AKI)

Angka Kematian Ibu (AKI) adalah banyaknya kematian perempuan pada saat hamil atau selama 42 hari sejak terminasi kehamilan tanpa memandang lama dan tempat persalinan, yang disebabkan karena kehamilannya atau pengelolaannya, dan bukan karena sebab-sebab lain, per 100.000 kelahiran hidup. Informasi mengenai tingginya AKI akan bermanfaat untuk pengembangan program peningkatan kesehatan reproduksi, terutama pelayanan

kehamilan dan membuat kehamilan yang aman bebas risiko tinggi (*making pregnancy safer*), program peningkatan jumlah kelahiran yang dibantu oleh tenaga kesehatan, penyiapan sistem rujukan dalam penanganan komplikasi kehamilan, penyiapan keluarga dan suami siaga dalam menyongsong kelahiran, yang semuanya bertujuan untuk mengurangi Angka Kematian Ibu dan meningkatkan derajat kesehatan reproduksi. Berikut adalah kondisi AKI pada Kabupaten Lampung Selatan:



Sumber: Dinas Kesehatan Kab. Lampung Selatan, 2022

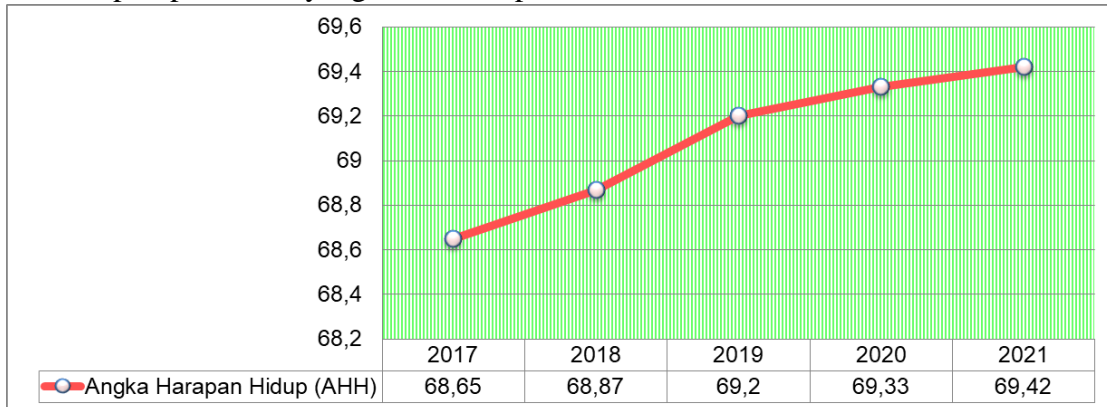
Gambar 15. Kondisi Angka Kematian Ibu pada Kabupaten Lampung Selatan tahun 2017-2021

Jumlah kasus terus mengalami penurunan rasi tahun dasar 2017-2021 sebanyak 1 orang pada setiap tahunnya, diikuti oleh persentase penurunan dari angka awal tahun 2017 sebesar 54,2% terus menurun dan pada tahun 2021 sebesar 38,03%. Penyebab kematian ibu di Kabupaten Lampung Selatan berdasarkan hasil Audit Maternal Perinatal (AMP) adalah pendarahan, eklampsia dan Emboli Air Ketuban. Berbagai upaya telah dilakukan untuk menekan AKB antara lain perbaikan status gizi ibu hamil, kesadaran perilaku terhadap PHBS, kesehatan lingkungan serta peningkatan kualitas pelayanan kesehatan ibu hamil dan tata laksana pertolongan persalinan normal yang optimal serta mengurangi peran dukun dan meningkatkan peran bidan, sehingga

para bidan di desa sebagai ujung tombak pelayanan kesehatan ibu dan anak, dengan meningkatkan ketrampilan dan kemampuannya melalui pelatihan kebidanan dan sejenisnya.

4.2.6. Angka Harapan Hidup (AHH)

Angka harapan hidup adalah rata-rata tahun hidup yang akan dijalani oleh seorang bayi saat lahir sampai pada tahun tertentu saat ia meninggal. Data angka harapan hidup di suatu negara berguna untuk mengevaluasi kinerja pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan penduduk dan meningkatkan derajat kesehatan. Angka harapan hidup yang rendah di suatu daerah harus diikuti dengan program pembangunan kesehatan dan program sosial lainnya termasuk kesehatan lingkungan, mencakup gizi dan kalori termasuk program pemberantasan kemiskinan. Angka Harapan Hidup ketika lahir merupakan suatu perkiraan rata-rata lamanya hidup sejak lahir yang akan dicapai oleh sekelompok penduduk yang dilahirkan pada tahun tersebut, Berikut adalah data



Sumber : BPS, Kabupaten Lampung Selatan, 2022

Gambar 16. Perkembangan Angka Harapan Hidup (AHH) Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2017-2021.

Data diatas menjelaskan perkembangan angka harapan hidup masyarakat di Kabupaten Lampung Selatan rata-rata sepanjang tahun angka harapan hidup sebesar 69,09 tahun. Pada tahun dasar 2017 angka harapan hidup berada pada angka 68,65 Tahun dan terus mengalami peningkatan, tahun 2021 sebesar 69,42 Tahun. Angka Harapan Hidup ini dapat dijadikan sebagai tolok

ukur indikator kesehatan. Semakin tinggi Angka Harapan Hidup (AHH) suatu masyarakat mengindikasikan tingginya derajat kesehatan masyarakat tersebut.

4.2.7. Penderita Penyakit Menular

Penyakit menular atau penyakit infeksi adalah sebuah penyakit yang disebabkan oleh sebuah agen biologi (seperti virus, bakteri atau parasit), bukan disebabkan faktor fisik atau kimia. Cara penularan penyakit ini melalui 2 cara, yaitu: 1) Media langsung dari orang ke orang; dan 2) Media udara. Berikut adalah data perkembangan penyakit menular di Kabupaten Lampung Tengah:

Tabel 8. Jumlah Penderita Penyakit Menular Tahun 2017-2021

NO	Nama Penyakit	2017	2018	2019	2020	2021
1	Muntaber/Diare	28.867	27.062	18.397	13.045	27.443
2	Demam Berdarah	206	373	457	462	462
3	Infeksi Saluran Pernafasan/Pneumonia	2.580	1.602	1.830	1.389	1.389
4	Campak	0	0	29	13	2
5	Malaria	188	262	105	36	0
6	HIV/AIDS	50	21	21	79	178
7	Wabah lainnya (TBC)	0	0	0	1.165	5.177

Sumber : BPS, Kabupaten Lampung Selatan, 2022

Pada perkembangan penyakit Muntaber/Diare sepanjang 2017-2020 telah mengalami penurunan tetapi peningkatan terjadi kembali di tahun 2021 dengan jumlah penderita menjapai 27.443 orang, Penyakit demam berdarah terus meningkat pada tahun dasar 206 orang terus mengalami peningkatan sampai tahun 2021 sebanyak 462 orang, Infeksi Saluran Pernafasan/Pneumonia angka tahun dasar 2017 sebanyak 2.580 orang terus mengalami penurunan pada tahun 2021 sebanyak 1.389 orang. Penyakit Campak selama 2017 dan 2018 tidak memiliki penderita namun tahun 2019 penderita muncul sebanyak 29 orang, tahun berikutnya terus mengalami penurunan pada tahun 2021 hanya 2 Orang, penderita Penyakit malaria pada tahun 2017 sebanyak 188 orang dan terus mengalami penurunan pada tahun 2021 jumlah penderita 0 orang. Penyakit

menular seksual HIV/AIDS mengalami trend peningkatan yang signifikan pada tahun dasar 2017 sebanyak 50 Orang penderita terus meningkat sampai tahun 2021 sebanyak 178 Orang dan kategori Wabah lainnya (TBC) sepanjang 2017-2019 tidak ada indikasi penderita, namun tahun 2020 terdapat 1.165 orang dan meningkat sangat signifikan pada tahun 2021 sebanyak 5.177 orang. Telah dilakukan penanganan terhadap para penderita penyakit menular. Penyakit menular yang ditangani antara lain TBC, pneumonia balita, HIV/AIDS, diare, kusta, DBD, malaria, dan difteri. Diare merupakan kasus terbanyak, namun sudah dilakukan penanganan terhadap penderita.

4.2.8. Strategi Perkembangan Kesehatan

1. Peningkatan akses dan kualitas pelayanan kesehatan masyarakat dengan cara peningkatan pelayanan kesehatan yang berorientasi pada kepuasan masyarakat terhadap pelayanan kesehatan dan perluasan akses sampai daerah terpencil
2. Perluasan kapasitas dan fasilitas kesehatan RS dan kapasitas SDM
3. Peningkatan kesehatan ibu dan anak dengan peningkatan pelayanan gizi dan kesehatan ibu dan anak.
4. Peningkatan status kesehatan masyarakat, dengan cara peningkatan pola hidup bersih dan sehat pada masyarakat, penyediaan data informasi kesehatan, penyediaan obat dan perbekalan kesehatan yang memadai.
5. Percepatan perbaikan Gizi masyarakat melalui peningkatan surveilans gizi, peningkatan akses dan mutu paket pelayanan kesehatan dan mutu gizi, peningkatan promosi perilaku masyarakat, peningkatan peran masyarakat dalam perbaikan gizi, penguatan dan pengawasan, penguatan peran lintas sektor
6. Melakukan pencegahan atau treatment penyakit infeksi, khususnya pada bayi dan anak-anak dan juga orang dewasa
7. Peningkatan akses pelayanan penyakit TB dan penyakit menular lainnya yang bermutu

8. Dengan memperhatikan diversifikasi kondisi kesehatan atau daerah, terutama dalam hal penyakit, maka setiap strategi tidak dapat bersifat homogen atau tunggal, tetapi harus memperhatikan kondisi spesifik daerah.
9. Sementara itu, strategi penurunan kematian maternal sangat erat kaitannya dengan program KB, sehingga strategi yang dijalankan untuk pelaksanaan program KB juga akan memberikan kontribusi terhadap penurunan angka kematian maternal. Hal tersebut harus ditopang dengan pengembangan pelayanan prenatal dan antenatal.
10. Sinkronisasi dan kolaborasi pembiayaan kesehatan masyarakat
11. Program Perencanaan Persalinan dan Pencegahan komplikasi (P4K) diharapkan bidan mampu memfasilitasi pemberdayaan dan partisipasi semua pemangku kepentingan yang terdiri dari ibu hamil, suami, keluarga dan masyarakat termasuk juga dukun dan kader sebagai tenaga non profesional dalam mendata, mencatat dan memantau intensif setiap ibu hamil dan memastikan diberikannya pelayanan kesehatan rujukan komplikasi dan kegawatdaruratan sesuai standard. Dengan data dalam stiker, suami, keluarga, kader, dukun, bersama bidan di desa dapat memantau secara intensif keadaan dan perkembangan kesehatan ibu hamil. Selain itu adanya Program Indonesia Sehat dengan Pendekatan Keluarga (PISPK) membantu menurunkan AKB karena adanya upaya kesehatan berbasis masyarakat dengan kunjungan keluarga.

4.2.9. Program Perkembangan Kesehatan

1. Program peningkatan gizi dan status kesehatan ibu dan anak.
2. Program Penanganan Prevalensi kekurangan gizi (underweight) pada anak balita.
3. Penurunan Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada anak di bawah dua tahun/baduta.

4. Penurunan angka kematian Ibu dan angka kematian bayi/ 1.000 Kasus Kelahiran.
5. Penanganan, penyuluhan dan pencegahan segala penyakit menular yang berdampak kepada masyarakat.

4.3. Dimensi Ekonomi

Dimensi ekonomi berkaitan erat dengan pemenuhan kebutuhan dasar penduduk, sehingga pertumbuhan ekonomi menjadi indikator penting walaupun bukan indikator satu-satunya. Pertumbuhan ekonomi dimaknai sebagai meningkatnya jumlah produksi barang dan jasa yang dihasilkan disuatu negara. Dengan pertumbuhan ekonomi berarti akan menyediakan lebih banyak barang dan jasa yang dibutuhkan penduduk.

Kemiskinan dan pengangguran terbuka juga menjadi indikator kualitas penduduk. Kemiskinan menggambarkan suatu keadaan penduduk yang tidak mampu memenuhi kebutuhan dasarnya dan pengangguran terbuka menggambarkan suatu kondisi penduduk yang tidak bekerja sama sekali sehingga tidak mempunyai penghasilan dan akhirnya tidak mampu memenuhi kebutuhan dasarnya juga. Pengeluaran perkapita adalah biaya yang dikeluarkan untuk konsumsi semua anggota rumah tangga selama sebulan dibagi dengan banyaknya anggota rumah tangga.

4.3.1. Perkembangan Perekonomian

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan total keseluruhan dari nilai tambah (*value added*) yang timbul akibat adanya aktivitas ekonomi. PDRB merupakan data statistik yang dapat dijadikan ukuran kuantitatif guna mengevaluasi dan memonitor hasil pembangunan yang telah diprogramkan oleh pemerintah daerah. Perkembangan PDRB sangat ditentukan oleh potensi ekonomi yang ada serta kondisi sosial dan politik yang kondusif. Dalam prakteknya PDRB terdiri dari PDRB atas harga berlaku yang memiliki kaitan erat dengan analisis pendapatan perkapita dan PDRB atas harga konstan yang

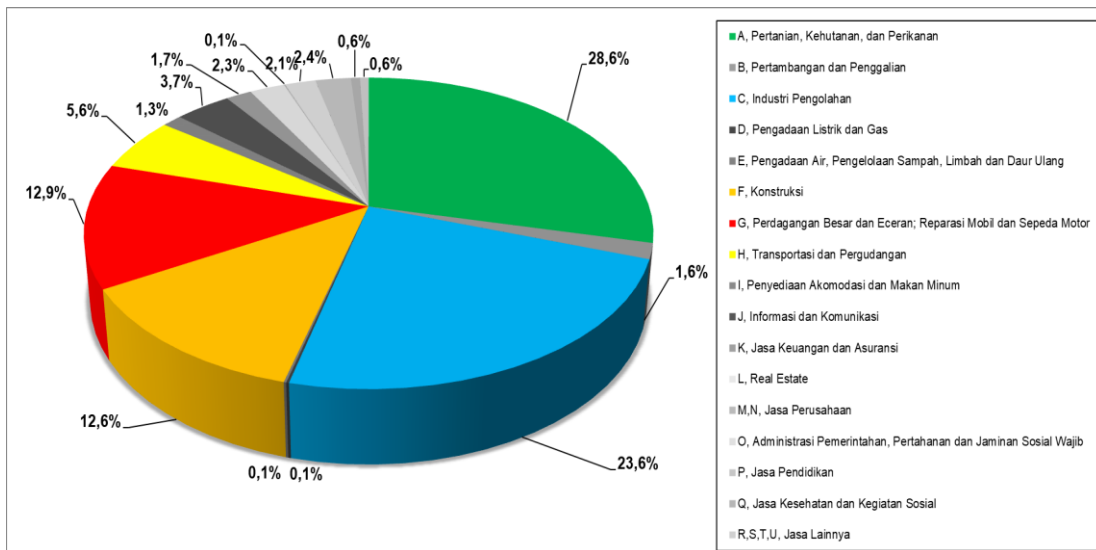
dapat digunakan sebagai analisis tingkat pertumbuhan ekonomi. Berikut adalah gambaran perkembangan perekonomian Kabupaten Lampung Selatan:

Tabel 9. Perkembangan PDRB Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2017-2021

Tahun	PDRB ADHB (Juta Rupiah)	PDRB ADHK (Juta Rupiah)
2017	Rp38.322.380,00	Rp27.359.530,00
2018	Rp41.586.070,00	Rp28.791.440,00
2019	Rp44.685.370,00	Rp30.267.880,00
2020	Rp44.293.000,00	Rp29.743.300,00
2021	Rp46.414.300,00	Rp30.541.210,00

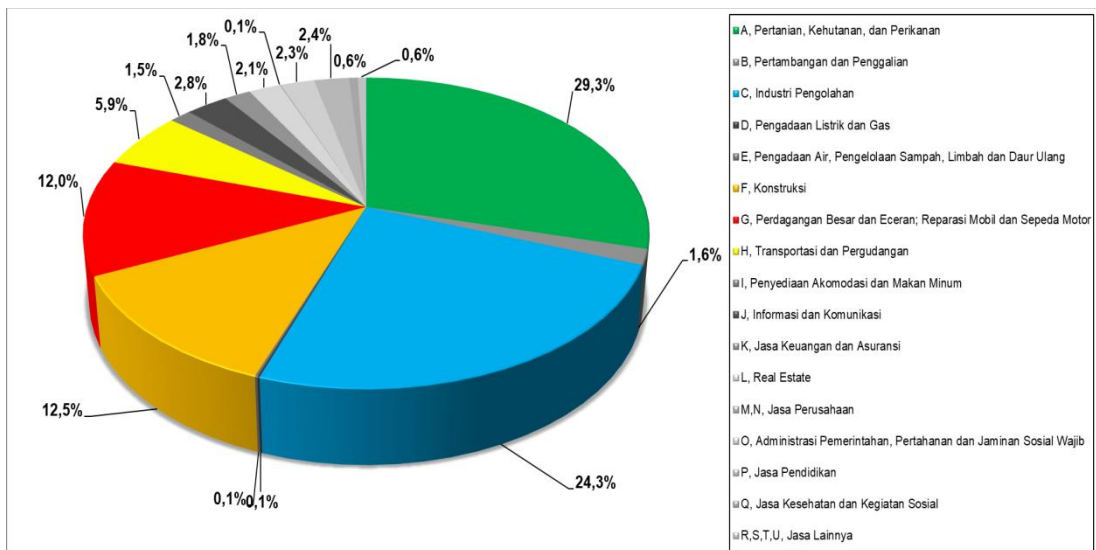
Sumber : BPS, Kabupaten Lampung Selatan, 2022

Perkembangan perekonomian kabupaten Lampung Selatan dilihat dari sisi pendapatan, terjadi peningkatan PDRB baik ADHB maupun ADHK selama 5 Tahun terakhir terjadi penurunan hanya pada tahun 2020 dan tidak begitu besar. Struktur perekonomian daerah ditentukan oleh besarnya sumbangan masing-masing sektor pembentuk perekonomian daerah. Berikut persentase sumbangan sektor-sektor perekonomian yang terbagi dalam 17 (tujuh belas) kategori lapangan usaha terhadap PDRB Kabupaten Lampung Selatan:



Sumber: BPS Kabupaten Provinsi Lampung dalam angka 2022

Gambar 17. Nilai rata-rata Kontribusi Sektorial PDRB ADHK Kabupaten Lampung Selatan tahun 2017-2021.



Sumber: BPS Kabupaten Provinsi Lampung dalam angka 2022

Gambar 18. Nilai rata-rata Kontribusi Sektorial PDRB ADHB Kabupaten Lampung Selatan tahun 2017-2021.

Dalam 5 (lima) tahun terakhir, dari 100% total kontribusi sektoral terhadap Perekonomian Kabupaten Lampung Selatan baik dalam sisi PDRB ADHK maupun ADHB terdapat 5 Sektor yang dominan. Rata-rata sepanjang tahun terdiri dari Sektor (A) pertanian, kehutanan dan perikanan nilai kontribusi ADHK sebesar 28,6% dan ADHB sebesar 29,3%, sektor (C) industri pengolahan nilai kontribusi ADHK sebesar 23,6% dan ADHB sebesar 24,3%, sektor (F) Kontruksi nilai kontribusi ADHK sebesar 12,6% dan ADHB sebesar 12,5%, sektor (G) perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan motor Kontruksi nilai kontribusi ADHK sebesar 12,9% dan ADHB sebesar 12,0% dan yang terakhir sektor (H) Transportasi dan pergudangan nilai kontribusi ADHK sebesar 5,6% dan ADHB sebesar 5,9%.

Dari gambar di atas dapat dilihat bahwa sumbangsih atau peranan sektor pertanian, kehutanan dan perikanan dalam pembentukan PDRB Kabupaten sangat dominan dan sektor industri pengolahan memberikan kontribusi paling tinggi sekitar 20%-30%. Sektor konstruksi dan perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan motor dan transportasi dan pergudangan memberikan kontribusi 5%-12%. Diharapkan perkembangan sektor industri pengolahan mengalami peningkatan sehingga hasil atau produk dari sektor pertanian, peternakan, kehutanan dan perikanan yang memang banyak dihasilkan di Kabupaten Lampung Selatan dapat diolah lebih lanjut atau dapat dimanfaatkan di sektor industri baik industri kecil, menengah, maupun besar sehingga nilai tambah (*value added*) yang dihasilkan dapat meningkatkan perekonomian daerah secara keseluruhan dan berkelanjutan.

Salah satu indikator untuk mengukur tingkat kesejahteraan masyarakat adalah pendapatan per kapita. Indikator pendapatan per kapita dapat juga digunakan untuk menilai apakah upaya pembangunan ekonomi di suatu wilayah mampu meningkatkan capaian nilai tambah berdasarkan kemampuan masyarakat dalam memanfaatkan sumber daya. Pencapaian tingkat pertumbuhan ekonomi yang tinggi akan berdampak pada meningkatnya pendapatan per kapita penduduk, apabila disertai dengan upaya pengendalian

jumlah penduduk. PDRB ADHK per kapita menunjukkan jumlah nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan per kepala atau per satu orang penduduk, sedangkan PDRB per kapita Atas Dasar Harga Konstan berguna untuk mengetahui pertumbuhan nyata ekonomi per kapita penduduk suatu daerah. Berikut adalah tabel perkembangan PDRB Perkapita:

Tabel 10. Perkembangan PDRB Perkapita Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2017-2021

Tahun	PDRB Per Kapita ADHB (Ribu/Jiwa)	PDRB Per Kapita ADHK (Ribu/Jiwa)
2017	Rp38.601.741	Rp27.558.975
2018	Rp41.491.262	Rp28.725.802
2019	Rp44.131.591	Rp29.931.028
2020	Rp43.439.329	Rp29.167.161
2021	Rp43.307.951	Rp28.497.192

Sumber : BPS, Kabupaten Lampung Selatan, 2022

Dari tabel di atas terlihat bahwa trend laju pendapatan perkapita penduduk Kabupaten Lampung Selatan periode Tahun 2017-2019 yang selalu mengalami peningkatan, tetapi pada Tahun 2020 dan 2021 mengalami penurunan, baik berdasarkan harga konstan maupun harga berlaku. Pendapatan perkapita penduduk Kabupaten Lampung Selatan pada Tahun 2021 berdasarkan harga berlaku adalah sebesar Rp. 43.307.950,63 dan harga konstan adalah sebesar Rp. 28.497.191,92.

Jika dilihat dari pendekatan pengeluaran, PDRB ADHB dan PDRB ADHK Kabupaten Lampung Selatan didominasi oleh pengeluaran konsumsi rumah tangga yang artinya bahwa pengeluaran konsumsi untuk rumah tangga sebagai pengguna akhir (final demand) atas berbagai jenis barang dan jasa yang tersedia di dalam suatu perekonomian yang sangat tinggi. Berikut adalah table yang menyajikan data PDRB menurut pengeluaran:

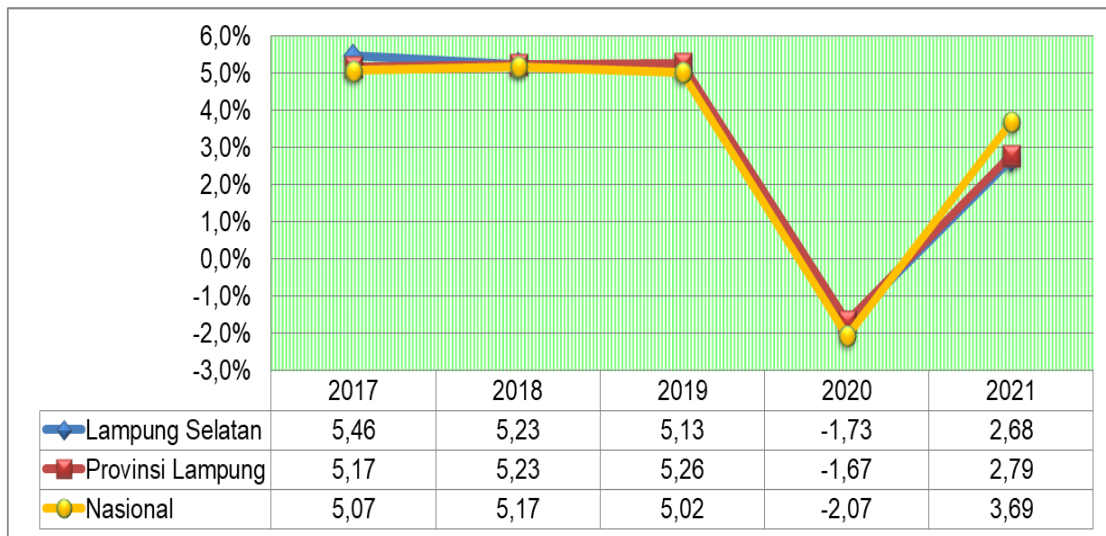
Tabel 11. PDRB ADHB dan ADHK (Juta Rupiah) Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2017–2021 menurut Jenis Pengeluaran

Jenis Pengeluaran	PDRB ADHB				
	2017	2018	2019	2020	2021
Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga	20.594,00	22.708,26	24.771,87	24.846,40	25.822,97
Pengeluaran Konsumsi LNPRT	480,31	580,19	644,62	625,46	660,58
Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	1.972,33	2.072,79	2.169,31	2.144,86	2.192,04
Pembentukan Modal Tetap Bruto	13.479,16	15.211,84	16.735,25	16.129,38	16.970,10
Perubahan Inventori	547,56	593,57	273,43	449.760	557,76
Net Ekspor Barang dan Jasa	1.249,02	418,86	90,89	97,14	210,85
Total	38.322,38	41.586,07	44.685,37	44.293,00	46.414,30
Jenis Pengeluaran	PDRB ADHK				
	2017	2018	2019	2020	2021
Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga	14.815,48	15.653,25	16.515,05	16.262,08	16.563,63
Pengeluaran Konsumsi LNPRT	321,06	372,19	406,16	387,15	399,45
Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	1.217,80	1.243,88	1.281,51	1.239,60	1.247,37
Pembentukan Modal Tetap Bruto	9.801,14	10.623,16	11.184,88	10.568,20	10.960,31
Perubahan Inventori	463,67	476,14	98,32	343,2	331,2
Net Ekspor Barang dan Jasa	740,37	422,81	781,96	943,07	1.039,25
Total	27.359,53	28.791,44	30.267,88	29.743,30	30.541,21

Sumber: BPS Kabupaten Provinsi Lampung dalam angka 2022

PDRB menurut pengeluaran ukuran dasar (basic measure) yang menggambarkan penggunaan atas barang dan jasa (product) yang dihasilkan melalui aktivitas produksi di Kabupaten Lampung Selatan. Pada data di table menunjukkan baik ADHB maupun ADHK pengeluaran terus meningkat seiring bertambahnya aktivitas perekonomian di Kabupaten Lmapung Selatan dengan 3 Komponen yang paling dominan yaitu 1) Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga, 2) Pengeluaran Konsumsi Pemerintah dan 3) Pembentukan Modal Tetap Bruto.

Perkembangan perekonomian dilanjutkan dengan analisa pertumbuhan ekonomi adalah suatu bentuk analisis terhadap parameter PDRB yang menggambarkan perkembangan suatu sektor secara riil dan objektif. Riil dalam arti bahwa angka pertumbuhan diperoleh dengan mengeliminir pengaruh kenaikan harga (inflasi). Sedangkan yang dimaksud dengan objektif adalah bahwa kenaikan/penurunan nilai tambah tersebut pembandingnya adalah nilai tambah sektor yang bersangkutan pada tahun sebelumnya berdasarkan harga konstan. Berikut adalah Perkembangan pertumbuhan Ekonomi:



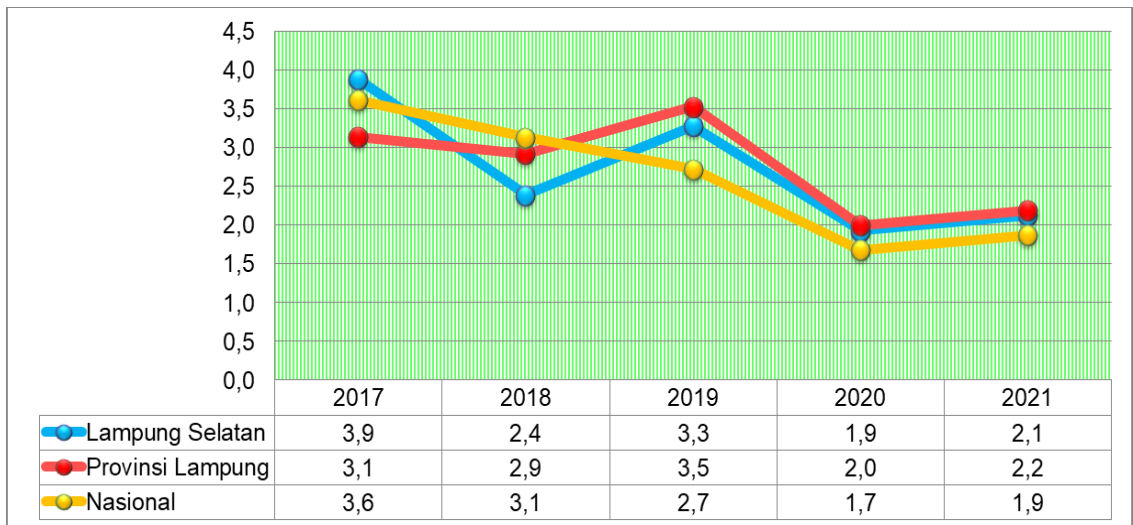
Sumber: BPS Kabupaten Provinsi Lampung dalam angka 2022

Gambar 19. . Perkembangan Pertumbuhan Ekonomi Kab Lampung Selatan, Prov Lampung dan Nasional Tahun 2017-2021

Pertumbuhan ekonomi Kabupaten, Provinsi dan Nasional sama-sama berada pada angka 5% sepanjang tahun 2017-2019, pada tahun 2020 angka pertumbuhan yang cenderung menurun, hal ini dialami oleh sebagian besar wilayah Indonesia. Pada Tahun 2020 terjadi kontraksi perekonomian tumbuh negatif nasional mengalami laju pertumbuhan -2,07%, Provinsi sebesar -1,67% dan Kabupaten Lampung Selatan sebesar -1,73%. Penurunan ini merupakan efek domino perekonomian nasional yang berimbas kepada perekonomian wilayah-wilayah yang ada di Indonesia karena dampak dari Pandemi Covid-19

yang memaksa diberlakukannya lockdown yang menyebabkan menurunnya minat dan daya beli masyarakat. Pada Tahun 2021, pertumbuhan ekonomi baik nasional, provinsi dan kabupaten Lampung Selatan kembali menunjukkan trend positif dan mengalami kenaikan. Hal tersebut tidak terlepas dari segala upaya pemulihan dan penanggulangan Pandemi Covid-19 yang telah dilakukan oleh Pemerintah.

Indikator perekonomian selanjutnya adalah tentang melihat daya beli masyarakat dengan memperhitungkan tingkat angka inflasi menggambarkan rata-rata perubahan harga antar periode waktu tertentu dari sejumlah kelompok barang/jasa yang banyak menjadi kebutuhan masyarakat. berikut adalah perkembangan inflasi baik nasional, provinsi dan kabupaten:



Sumber: BPS Kabupaten Provinsi Lampung dalam angka 2022

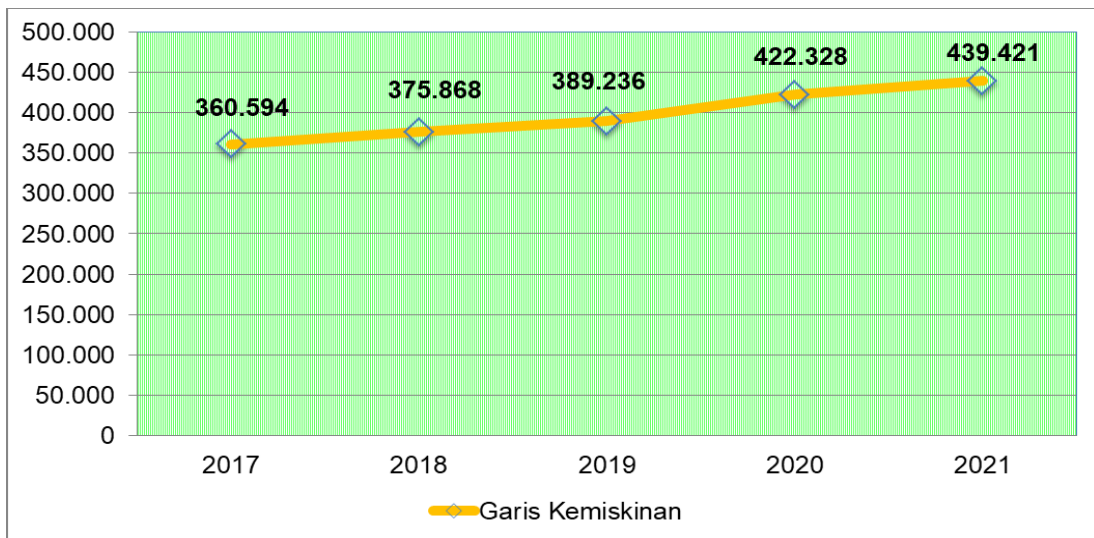
Gambar 20. Perkembangan Inflasi Kab Lampung Selatan, Prov Lampung dan Nasional Tahun 2017-2021

Keseluruhan inflasi Nasional, provinsi dan Kabupaten masuk kepada tingkatan inflasi rendah dibawah 10%, tingkatan inflasi berfluktuasi tergantung situasi perekonomian dan kebijakan yang diterapkan pemerintah. Angka inflasi selama 5 tahun baik nasional, Provinsi dan Kabupaten masuk kepada kategori terkendali hanya berkisar 1%-3%. Pada tahun 2020 nilai inflasi seluruh wilayah turun dengan kisaran 1%-2% dan kembali meningkat tahun 2021, selain

disebabkan oleh upaya Pemerintah dalam mengendalikan harga bahan pokok, juga disebabkan oleh kembali meningkatnya daya beli masyarakat setelah terdampak Pandemi Covid-19 yang menyebabkan pemasukan masyarakat menurun sehingga kegiatan perekonomian terhambat.

4.3.2. Perkembangan Kemiskinan dan Tingkat Pengangguran

Garis kemiskinan adalah nilai rupiah pengeluaran per kapita setiap bulan untuk memenuhi standar minimum kebutuhan-kebutuhan konsumsi pangan dan non pangan yang dibutuhkan oleh individu untuk hidup layak. Penduduk miskin dihitung berdasarkan garis kemiskinan. Berikut adalah gambaran garis kemiskinan kabupaten Lampung Selatan:

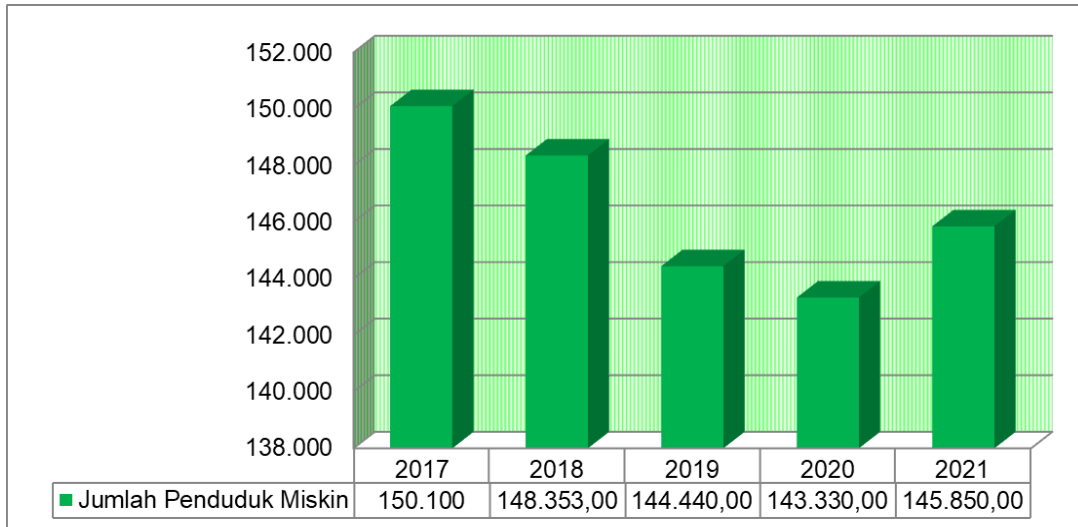


Sumber: BPS Kab. Lampung Selatan, 2022

Gambar 21. Kondisi Garis Kemiskinan Kabupaten Lampung Selatan 2017-2021

Garis kemiskinan Kabupaten Lampung Selatan selalu mengalami peningkatan setiap tahunnya, pada Tahun 2021 sebesar Rp. 439.421,- meningkat dari Tahun 2020 sebesar Rp. 422.328,-. Garis Kemiskinan Makanan (GKM) merupakan suatu Paket komoditi kebutuhan dasar makanan diwakili oleh 52 jenis komoditi (padi-padian, umbi-umbian, ikan, daging, telur dan susu, sayuran, kacang-kacangan, buah-buahan, minyak dan lemak, dll). Kenaikan

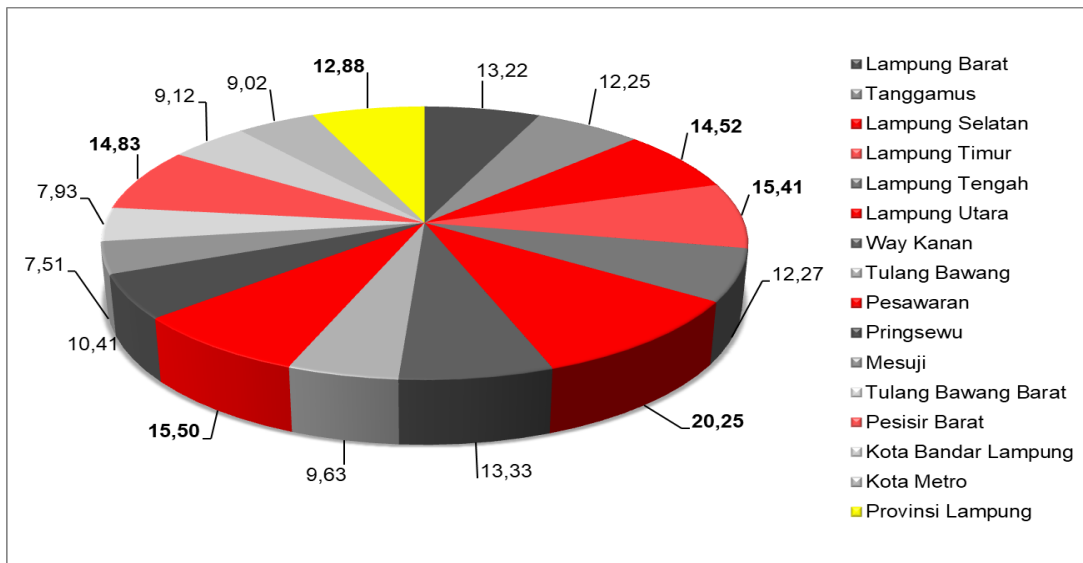
harga-harga baik pangan dan non pangan bisa saja mempengaruhi pengeluaran yang dibutuhkan oleh individu untuk hidup layak di Kabupaten Lampung Selatan, berikut adalah perkembangan jumlah penduduk miskin:



Sumber: BPS Kab. Lampung Selatan, 2022

Gambar 22. Kondisi Jumlah Penduduk Miskin Kabupaten Lampung Selatan 2017-2021

Jumlah penduduk miskin di Kabupaten Lampung Selatan cenderung mengalami penurunan setiap tahunnya. Pada Tahun 2019, jumlah penduduk miskin adalah sebanyak 144.440 jiwa, mengalami penurunan hingga pada Tahun 2020, jumlah penduduk miskin menjadi 143.330 jiwa. Namun pada Tahun 2021 adalah sebesar 14,31 persen. Tahun 2020 jumlah penduduk miskin menjadi 143.330 jiwa atau turun menjadi 14,08 persen. Jumlah penduduk miskin di Kabupaten Lampung Selatan secara perkembangan sangat berfluktuasi, bila dilihat dari persentase perbandingan 15 Kabupaten Kota di Provinsi Lampung disajikan sebagai berikut:

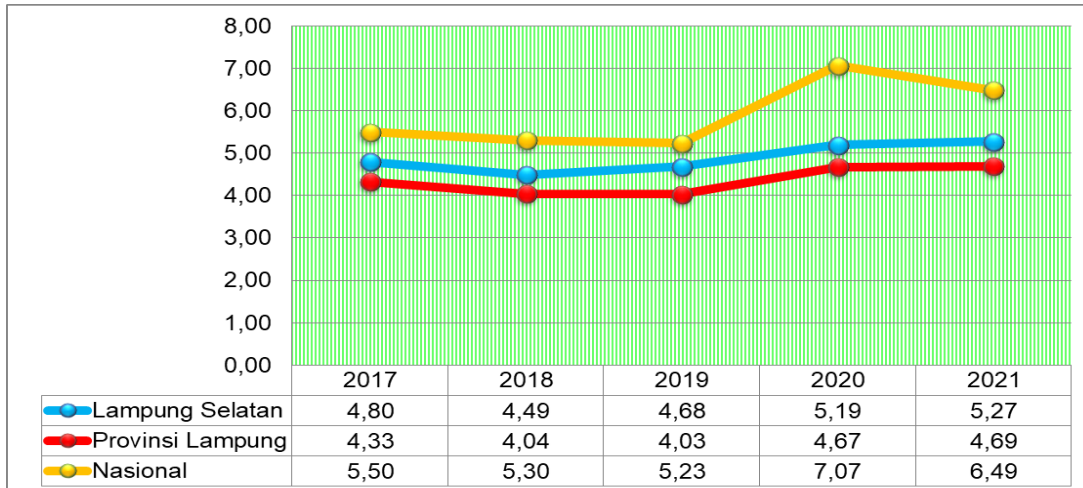


Sumber: BPS Kab. Lampung Selatan, 2022

Gambar 23. Kondisi Rata-rata Persentase Penduduk miskin 15 Kabupaten Kota Selatan 2017-2021

Rata-rata persentase sepanjang tahun penduduk miskin menunjukkan 5 kabupaten dengan persentase tertinggi adalah Lampung Utara sebesar 20,25% , Pesawaran sebesar 15,50% Lampung Timur sebesar 15,41%, Pesisir Barat 14,83% dan yang kelima adalah Kabupaten Lampung Selatan sebesar 14,52%. Kabupaten Lampung Selatan bila dibandingkan dengan rata-rata provinsi masih menunjukkan angka yang lebih tinggi dari Provinsi sebesar 12,88%.

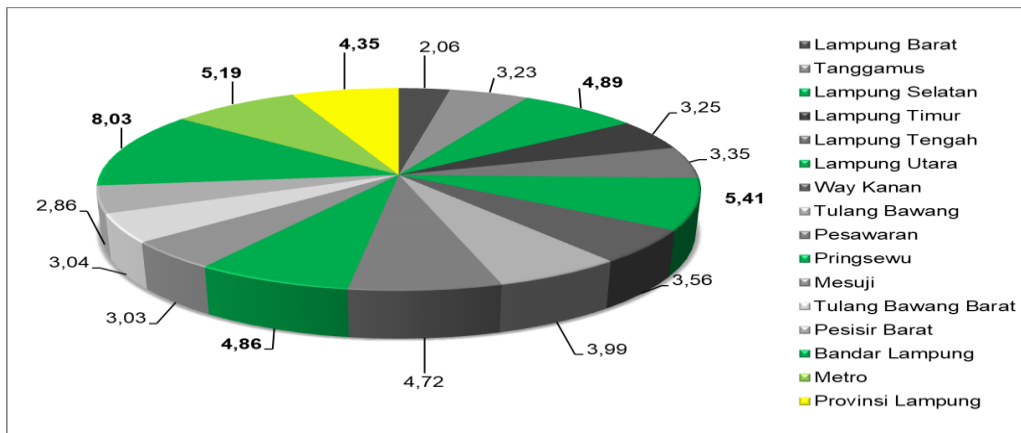
Pengangguran disajikan pada representasi data TPT (Tingkat Pengangguran Terbuka) Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) merupakan indikator yang digunakan untuk mengukur tenaga kerja yang tidak terserap oleh pasar kerja dan menggambarkan kurang termanfaatkannya pasokan tenaga kerja. Berikut adalah persentase tingkat pengangguran yang ada di Kabupaten Lampung Selatan:



Sumber: BPS Kab. Lampung Selatan, 2022

Gambar 24. Kondisi tingkat pengangguran terbuka (TPT) Kab Lampung Selatan, Prov Lampung dan Nasional tahun 2017-2021

Tingkat pengangguran terbuka (TPT) kabupaten Lampung Selatan terus mengalami peningkatan pada tahun 2017 sebesar 4,80% dan terus meningkat sampai tahun 2021 sebesar 5,27%, TPT Kabupaten memiliki angka kisaran 4%-5%. Kondisi TPT provinsi memiliki kisaran 4%-4,7% dan nasional memiliki angka kisaran 5%-7% keadaan Kabupaten, Provinsi dan nasional sama-sama menunjukkan trenda data pergerakan yang sama cenderung terus mengalami peningkatan. Bila melihat perbandingan antar Kabupaten/kota di provinsi lampung terhadap Lampung Selatan berikut disajikan pada grafik:



Sumber: BPS Kab. Lampung Selatan, 2022

Gambar 25. Kondisi Rata-rata Tingkat Pengangguran Terbuka 15 Kabupaten Kota Selatan 2017-2021

Pada kondisi perbandingan antar 15 Kabupaten/Kota yang ada di provinsi Lampung terlihat bahwa 5 wilayah masuk dalam kategori TPT tertinggi adalah wilayah Kota Bandar Lampung sebesar 8,03%, Lampung Utara sebesar 5,41%, Kota Metro sebesar 5,19%, Lampung Selatan 4,89% dan Pringsewu sebesar 4,86% sedangkan provinsi Lampung memiliki persentase keadaan 5 wilayah menunjukkan persentase pengangguran terbuka yang lebih tinggi dari tingkatan Provinsi. Kondisi yang ada pada kabupaten Lampung Selatan, keadaan Peningkatan antara lain dipengaruhi oleh meningkatnya angkatan kerja dan endahnya penawaran kerja yang terserap terutama tingkat pendidikan SMK dan diploma serta perampingan karyawan yang dilakukan oleh perusahaan sebagai dampak dari Pandemi Covid-19.

4.3.2. Strategi Perkembangan Ekonomi

Perekonomian Kabupaten Lampung Selatan di tompang oleh 4 Sektor yang berkontribusi tinggi yaitu (A) pertanian, kehutanan dan perikanan nilai kontribusi, (C) industri pengolahan nilai kontribusi, (F) Kontruksi nilai kontribusi dan (G) perdagangan besar dan eceran. Terdapat beberapa permasalahan terkait pembangunan ketenagakerjaan, diantaranya masih

tingginya tingkat pengangguran terselubung, masih rendahnya kesejahteraan dan perlindungan terhadap tenaga kerja, iklim hubungan industrial yang kurang kondusif. Permasalahan lain adalah masih terjadi ketimpangan pendapatan dan kemiskinan pedesaan yang masih cukup tinggi. Strategi yang harus dilakukan:

1. Mewujudkan pemerataan pembangunan ekonomi di Kabupaten Lampung Selatan, dengan fokus pada daerah potensial dalam sumber daya baik alam maupun manusia.
2. Mewujudkan masyarakat sejahtera melalui peningkatan perekonomian yang merata melalui pengurangan kemiskinan dan pengangguran.
3. Meningkatkan ketersediaan pangan, keterjangkauan dan pemanfaatan pangan termasuk produksi peternakan, perikanan, perkebunan dan kehutanan.
4. Meningkatkan nilai investasi
5. Meningkatkan kualitas koperasi dan UMKM yang mandiri, produktif dan berdaya saing .
6. Meningkatkan pertumbuhan sektor pariwisata, sektor perdagangan dan sektor industri .
7. Pembangunan ketenagakerjaan untuk meningkatkan jumlah penduduk yang bekerja dan meningkatkan kualitas tenaga kerja .
8. Meningkatkan kesejahteraan sosial .
9. Meningkatkan pemberdayaan masyarakat desa dan Kecamatan.

4.3.3. Program Perkembangan Ekonomi

1. Penanganan dan penurunan tingkat kemiskinan ekstrim
2. Penurunan angka persentase penduduk yang hidup dibawah garis kemiskinan.
3. Peningkatan pendapatan daerah untuk meningkatkan PDRB sektoral Lapangan Usaha dan PDRB Perkapita.
4. Peningkatan sektor dominan/basis melalui program-program peningkatan akses UMKM.

5. Peningkatan Laju Pertumbuhan PDB Manufaktur untuk kesejahteraan ekonomi wilayah.

4.4. Pembangunan Manusia dan Produktivitas

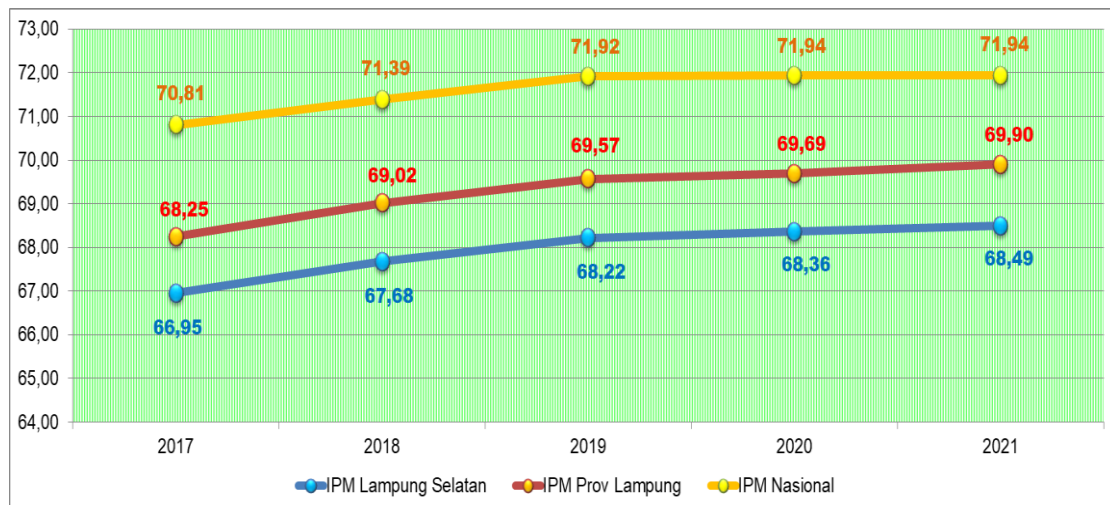
Manusia adalah kekayaan sejati suatu bangsa. Pembangunan manusia menempatkan manusia sebagai tujuan utama pembangunan, bukan hanya sebagai alat dalam mencapai pembangunan. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) menjelaskan bagaimana penduduk dapat mengakses hasil pembangunan dalam hal pendapatan, kesehatan, pendidikan, dan sebagainya. Indikator-indikator kesehatan, pendidikan, dan pendapatan yang digunakan dalam IPM merupakan komponen penting dalam pemahaman ketenagakerjaan.

IPM terdiri dari tiga dimensi dasar, yaitu umur panjang dan hidup sehat, pengetahuan penduduk, dan standar hidup yang layak. Setiap dimensi ini direpresentasikan oleh indikator-indikator yang spesifik. IPM merupakan indikator penting untuk mengukur keberhasilan dalam upaya membangun kualitas hidup manusia atau masyarakat. IPM memiliki hubungan yang erat dengan produktivitas penduduk. Peningkatan IPM diharapkan dapat meningkatkan produktivitas tenaga kerja, yang mencerminkan adanya sumber daya manusia yang kreatif, inovatif, cerdas, sehat, dan mandiri. Dengan meningkatnya indikator IPM, akhirnya dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi, menurunkan tingkat kemiskinan, dan mengurangi tingkat pengangguran.

Dalam konteks pembangunan, fokus pada peningkatan IPM adalah penting untuk mencapai pembangunan yang berkelanjutan dan inklusif. Dengan meningkatkan kualitas hidup penduduk melalui pemenuhan kebutuhan dasar, akses terhadap pendidikan dan kesehatan yang berkualitas, serta peningkatan pendapatan, maka bangsa dapat mencapai pertumbuhan yang berkelanjutan dan menciptakan kesempatan kerja yang lebih baik. Hal ini juga berkontribusi pada pengurangan kesenjangan sosial dan peningkatan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.

4.4.1. Perkembangan Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Indeks pembangunan manusia merupakan indeks yang digunakan untuk mengukur pencapaian pembangunan manusia atau kesejahteraan yang berjalan di suatu daerah berdasarkan komponen dasar kualitas hidup, pengukuran indeks ditunjukkan melalui angka kesehatan, pendidikan, dan hidup layak (Badan Pusat Statistik). Sementara itu untuk mengukur dimensi kesehatan digunakan angka harapan hidup, lalu untuk mengukur dimensi pengetahuan digunakan gabungan indikator angka melek huruf dan rata-rata lama sekolah, sedangkan untuk mengukur dimensi hidup layak digunakan indikator kemampuan daya beli (*Purchasing Power Parity*) (Winarti, 2014). Indeks Pembangunan manusia adalah modal manusia dasar dimana setiap kabupaten/kota memiliki tarafnya masing-masing dalam pembangunan modal manusia berikut adalah gambaran modal manusia pada Perbandingan Provinsi, Nasional dan Kabupaten Lampung Selatan:



Sumber: BPS Kabupaten Provinsi Lampung dalam angka 2022

Gambar 26. Kondisi rata-rata modal manusia Provinsi Lampung, Nasional dan Kabupaten Lampung Selatan tahun 2017-2021

IPM pada kondisi Nasional bergerak meningkat memiliki rata-rata 71,6% angka awal tahun 2017 sebesar 70,81 dan terus meningkat sampai angka

71,94 kenaikan bertahap dengan persentase 0,5% setiap tahunnya, sedangkan kondisi Provinsi bergerak meningkat memiliki rata-rata 69,29% angka awal tahun 2017 sebesar 68,25 dan terus meningkat sampai angka 69,90 kenaikan bertahap dengan persentase 0,5%-1% setiap tahunnya. Keadaan IPM Lampung Selatan bergerak meningkat memiliki rata-rata 67,94% angka awal tahun 2017 sebesar 66,95 dan terus meningkat sampai angka 68,49 kenaikan bertahap dengan persentase 0,5%-1% setiap tahunnya. Perbandingan Kabupaten Lampung Selatan dengan nasional rata-rata IPM masih dibawah tingkat nasional dan jika dibandingkan dengan tingkat Provinsi cenderung masih dibawah tingkatan, akan tetapi pergerakan kenaikan setiap tahunnya pada IPM Lampung Selatan menandakan peningkatan perbaikan modal manusia. Dilihat dari segi faktor secara akumulasi yang membentuk IPM disajikan pada table berikut:

Tabel 12. Faktor pembentuk IPM Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2017-2021

No	Komponen IPM	2017	2018	2019	2020	2021	Rata-rata
1	Angka Harapan Hidup (AHH)	68,7	68,9	69,2	69,3	69,4	69,1
2	Rata-rata Lama Sekolah (RRLS)	7,66	7,67	7,68	7,69	7,7	7,66
3	Harapan Lama Sekolah (HLS)	12,1	12,2	12,3	12,5	12,5	12,3
4	Pengeluaran Perkapita	Rp9.310	Rp9.781	Rp9.978	Rp9.875	Rp9.931	Rp9.775

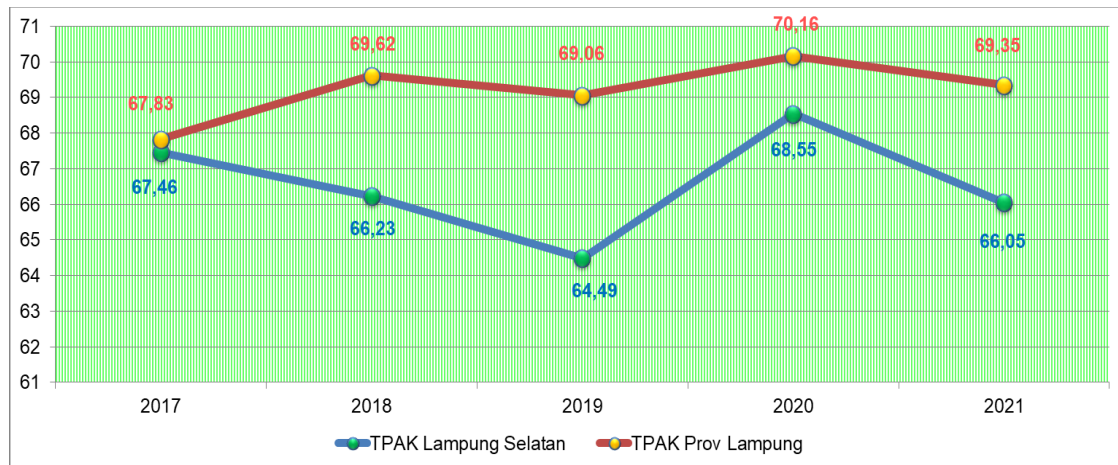
Sumber : BPS, Kabupaten Lampung Selatan, 2022

Data pada table menunjukkan perkembangan faktor pembentuk IPM Kabupaten Lampung Selatan, dimana angka AHH menunjukkan peningkatan setiap tahunnya dengan akumulasi rata-rata sepanjang tahun sebesar 69,1 Tahun lama hidup seseorang ini menandakan dimensi Kesehatan. Pada dimensi Pendidikan RRLS menunjukkan angka yang mengalami peningkatan dengan rata-rata sepanjang tahun sebesar 7,66 Tahun rata-rata penduduk menempuh sampai kepada jenjang SMP, Harapan Lama sekolah begitu mengalami

perubahan dengan rata-rata sepanjang tahun sebesar 12,3 Tahun rata-rata harapan lama sekolah penduduk sampai kepada jenjang SMA. Dimensi standar layak hidup di wakili oleh Pengeluaran Perkapita (Ribu/Orang/tahun) standar pengeluaran perkapita terus mengalami peningkatan dengan rata-rata sepanjang tahun sebesar Rp 9.775, peningkatan pengeluaran menandakan standar hidup yang terus meningkat.

4.4.2. Produktivitas Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)

Indikator utama ketenagakerjaan yang sering digunakan sebagai indikator keberhasilan dalam menangani masalah ketenagakerjaan adalah Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) adalah persentase banyaknya angkatan kerja terhadap banyaknya penduduk yang berumur lima belas tahun ke atas. Nilai TPAK mengindikasikan besarnya persentase penduduk usia kerja yang aktif secara ekonomi di suatu negara. Semakin tinggi nilai TPAK, semakin tinggi pula pasokan tenaga kerja yang tersedia untuk memproduksi barang dan jasa dalam suatu perekonomian. Berikut adalah perbandingan TPAK Provinsi Lampung dan Kabupaten Lampung Selatan:



Sumber : BPS, Kabupaten Lampung Selatan, 2022

Gambar 27. Perkembangan TPAK Provinsi Lampung dan Kabupaten Lampung Selatan tahun 2017-2021

TPAK Kabupaten Lampung Selatan bila dibandingkan dengan rata-rata provinsi masih dibawah TPAK Provinsi Lampung, diman angka kisaran yang terus berfluktuasi Provinsi Lampung angka paling minim adalah sebesar

67,83% pada tahun 2017 dan angka paling tinggi menyentuh 70,16% tahun 2020 sedangkan Kabupaten Lampung Selatan angka TPAK paling minim sebesar 64,49% pada tahun 2019 dan paling tinggi sebesar 68,55% pada tahun 2020. Kabupaten Lampung Selatan pada tahun 2018, 2019 dan 2021 adalah angka persentase yang mengalami penurunan dan rendah dengan kisaran 64-66%, angka TPAK tertinggi sepanjang 5 Tahun hanya berada pada 2017 dan 2020. Kabupaten Lampung Selatan harus terus meningkatkan dan menyiapkan modal manusia untuk menggerakkan perekonomian, ikut serta dalam menyediakan lapangan pekerjaan Semakin tinggi nilai TPAK, semakin tinggi pula pasokan tenaga kerja yang tersedia untuk memproduksi barang dan jasa di Kabupaten Lampung Selatan.

4.4.3. Strategi Perkembangan Manusia dan Produktivitas

Kondisi Kabupaten Lampung Selatan memiliki nilai IPM yang lebih rendah dibandingkan dengan IPM Provinsi Lampung dan nasional . Hal ini dipengaruhi oleh aspek pendidikan, kesehatan, dan perekonomian masyarakat. Adapun, mengingat mayoritas penduduk Kabupaten Lampung Selatan berada di pedesaan maka pengembangan kualitas masyarakat Desa perlu mendapatkan perhatian serius. Strategi yang dilaksanakan untuk meningkatkan IPM:

1. Fokus pada peningkatan faktor pembentuk IPM, yaitu meningkatkan angka harapan hidup, peningkatan angka rata-rata lama sekolah, meningkatkan harapan lama sekolah dan meningkatkan pengeluaran perkapita penduduk.
2. Peningkatan Indeks Desa Membangun (IDM). DM memiliki indikator yang berhubungan dengan IPM, sehingga dengan adanya peningkatan IDM, maka IPM di desa akan turut meningkat.

4.4.4. Program Perkembangan Manusia dan Produktivitas

1. Program penyediaan lapangan pekerjaan dan keterampilan dasar untuk bekerja penduduk untuk menurunkan tingkat pengangguran.

BAB 5

PEMBANGUNAN KELUARGA GRAND DESIGN PEMBANGUNAN KEPENDUDUKAN (GDPK) KABUPATEN LAMPUNG SELATAN 2021 - 2035

5.1. Kebijakan Pembangunan

Penyelenggaraan Pembangunan Keluarga yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 1994 tentang Penyelenggaraan Pembangunan Keluarga Sejahtera menyebutkan bahwa Keluarga sebagai unit terkecil dalam masyarakat mempunyai peran penting dalam pembangunan nasional, oleh karena itu keluarga perlu dibina dan dikembangkan kualitasnya agar menjadi keluarga sejahtera dan memberikan kontribusi bagi pembangunan nasional.

Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 mendefinisikan ketahanan dan kesejahteraan keluarga sebagai kondisi keluarga yang memiliki keuletan dan ketangguhan serta mengandung kemampuan fisik material guna hidup mandiri dan mengembangkan diri dan keluarganya untuk hidup harmonis dalam meningkatkan kesejahteraan kebahagiaan lahir dan batin. Ketahanan keluarga diindikasikan sebagai kecukupan dan kesinambungan akses terhadap pendapatan dan sumberdaya setidaknya untuk memenuhi kebutuhan dasar termasuk didalamnya adalah kecukupan akses terhadap pangan, air bersih, pelayanan kesehatan, kesempatan pendidikan, perumahan, waktu untuk berpartisipasi di masyarakat, dan integrasi sosial. Dengan demikian, ketahanan keluarga merupakan konsep yang mengandung aspek multidimensi untuk mewujudkan pertumbuhan penduduk yang seimbang dan keluarga berkualitas.

Menurut BKKBN (<http://aplikasi.bkkbn.go.id/>) Keluarga Sejahtera adalah keluarga yang dibentuk berdasarkan atas perkawinan yang sah, mampu

memenuhi kebutuhan hidup spiritual dan materiil yang layak, bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, memiliki hubungan yang serasi, selaras dan seimbang antar anggota dan antar keluarga dengan masyarakat dan lingkungan (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 52 tahun 2009).

5.2. Pembangunan Keluarga di Kabupaten Lampung Selatan

Pembangunan Keluarga merupakan konsep yang mengandung aspek multidimensi untuk mewujudkan pertumbuhan penduduk yang seimbang dan keluarga berkualitas. Undang-Undang nomor 52 Tahun 2009 telah mengamanatkan BKKBN sebagai lembaga yang menetapkan kebijakan Pembangunan Keluarga melalui pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga yang meliputi dimensi ekonomi, dimensi sosial/budaya, dimensi kesehatan, dimensi agama, dan dimensi Pendidikan.

5.2.1. Perkembangan Pembangunan Keluarga dari Dimensi Sosial/Budaya

Pembangunan keluarga dari dimensi sosial/budaya dimaksudkan agar setiap keluarga dapat menjalankan peran dan fungsi sosial kesehatan. Fungsi pendidikan bukan hanya berhubungan dengan kecerdasan, melainkan juga termasuk pendidikan emosional dan pendidikan spiritual. Fungsi kesehatan berkaitan dengan penerapan cara hidup sehat dan memahami tentang kesehatan reproduksi termasuk tentang persiapan kehidupan berkeluarga bagi para remaja. Membangun keluarga yang sejahtera lahir maupun batin sudah dimulai sejak dari masa remaja. Permasalahan remaja merupakan permasalahan yang sangat kompleks mulai dari jumlahnya yang cukup besar hingga permasalahan seputar kesehatan reproduksi remaja. Jumlah yang sangat besar tersebut adalah potensi yang memerlukan pengelolaan yang terencana, sistematis, dan terstruktur agar dapat menjadi modal pembangunan dimasa mendatang. Dalam rangka mengembangkan pembangunan keluarga dari dimensi sosial dan budaya, BKKBN bekerjasama dengan pemerintah daerah dan juga masyarakat untuk

membentuk atau membuat program yang dapat mencakup informasi terkait pembangunan keluarga, antara lain :

5.2.2.1. Pusat Informasi dan Konseling Remaja

BKKBN mengembangkan program GenRe dalam rangka merespon permasalahan remaja tersebut, yaitu program yang dikembangkan dalam rangka penyiapan kehidupan berkeluarga bagi remaja melalui pemahaman tentang pendewasaan usia perkawinan. Program GenRe dilaksanakan melalui pendekatan langsung kepada remaja serta orang tua yang memiliki remaja pengembangan Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK Remaja).

PIK Remaja dikembangkan melalui jalur pendidikan dan masyarakat. Jalur pendidikan meliputi sekolah, perguruan tinggi, dan pesantren. Sedangkan di jalur masyarakat diantaranya melalui organisasi kepemudaan, organisasi keagamaan, dan komunitas remaja. Kedua jalur tersebut merupakan sasaran yang penting untuk mendekati komunitas remaja. Pembentukan PIK Remaja di kedua jalur tersebut akan membantu mendekatkan akses remaja terhadap informasi GenRe khususnya Kesehatan Reproduksi Remaja, Penyiapan Kehidupan Berkeluarga bagi Remaja, Life Skills, Kependudukan dan Pembangunan Keluarga.

5.2.2.2. Bina Kelompok Remaja

Selain program PIK Remaja, BKKBN juga mengembangkan program Bina Kelompok Remaja (BKR) yaitu program GenRe yang dilaksanakan melalui pendekatan kepada orang tua yang memiliki remaja. Dalam rangka meningkatkan kualitas pengelolaan kelompok BKR agar lebih maju dan mandiri. Salah satu kegiatan yang dilakukan adalah pemilihan kelompok BKR unggulan. Pemilihan tersebut diharapkan akan mendorong setiap kelompok BKR untuk berusaha meningkatkan kualitas dan kapasitasnya. Kelompok BKR yang menjadi unggulan akan lebih mapan dan memiliki fungsi tambahan sebagai model, tempat rujukan, studi banding, dan magang bagi kelompok BKR lainnya. Tujuan dari pemilihan kelompok BKR Unggulan ini secara umum

adalah untuk meningkatkan kuantitas dan kualitas kelompok BKR baik dari segi pengelolaan maupun pelaksanaan kegiatannya, dan siap untuk menjadi model, tempat rujukan, tempat studi banding, dan tempat magang bagi kelompok BKR yang lain

5.2.2.3. Bina Keluarga Balita (BKB)

Bina Keluarga Balita (BKB) merupakan program pemerintah untuk meningkatkan kualitas anak dalam rangka pembangunan keluarga yang bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan orang tua dalam mengasuh dan membina tumbuh kembang anak melalui kegiatan stimulasi fisik mental, intelektual, emosional, spiritual, sosial, dan moral. Pelaksanaan layanan BKB yang sudah terintegrasi dengan layanan Posyandu dan PAUD dikenal dengan sebutan BKB Holistik Integratif (BKB HI).

5.2.2.4. Bina Keluarga Lansia (BKL)

Bina Keluarga Lansia (BKL) adalah Kelompok Kegiatan (POKTAN) keluarga yang mempunyai Lansia, yang bertujuan meningkatkan pengetahuan dan keterampilan keluarga yang memiliki lansia dan lansia itu sendiri untuk meningkatkan kualitas hidup lansia. Sasaran kelompok ini adalah keluarga yang mempunyai lansia berusia >60 th. Kegiatan utama adalah penyuluhan, emu keluarga dan kunjungan rumah. Kegiatan ini diharapkan bisa bersinergi dengan lintas sektor yang ada misal PKM, Dinas Sosial, PPL dll. Dengan terbentuknya Bina Keluarga Lansia diharapkan keluarga yang mempunyai lansia atau lansia itu sendiri untuk lebih aktif berkegiatan. Melalui program pembangunan keluarga yang komprehensif bersama mitra kerja diharapkan BKL dapat meningkatkan kualitas keluarga yang berkarakter dalam mewujudkan Lansia Tangguh.

5.2.2.5. Perkawinan Usia Muda dan Perceraian

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyebutkan bahwa “Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 tahun“(Pasal 7 ayat 1). Jika terjadi penyimpangan, maka dapat meminta dispensasi kepada pengadilan atau Pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun wanita. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak pada pasal 11 ayat 1 menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Dari dasar hukum di atas, maka yang dimaksud dengan pernikahan usia muda adalah pernikahan yang dilakukan oleh pasangan yang perempuannya berusia dibawah usia 18 tahun. Umur pada saat perkawinan pertama dapat mempengaruhi kesehatan reproduksi wanita. Seorang wanita cenderung akan mempunyai resiko yang lebih besar ketika melahirkan bila umur perkawinan pertama belum mencapai usia matangnya organ reproduksi, bahkan dapat berujung kematian pada ibu dan bayi.

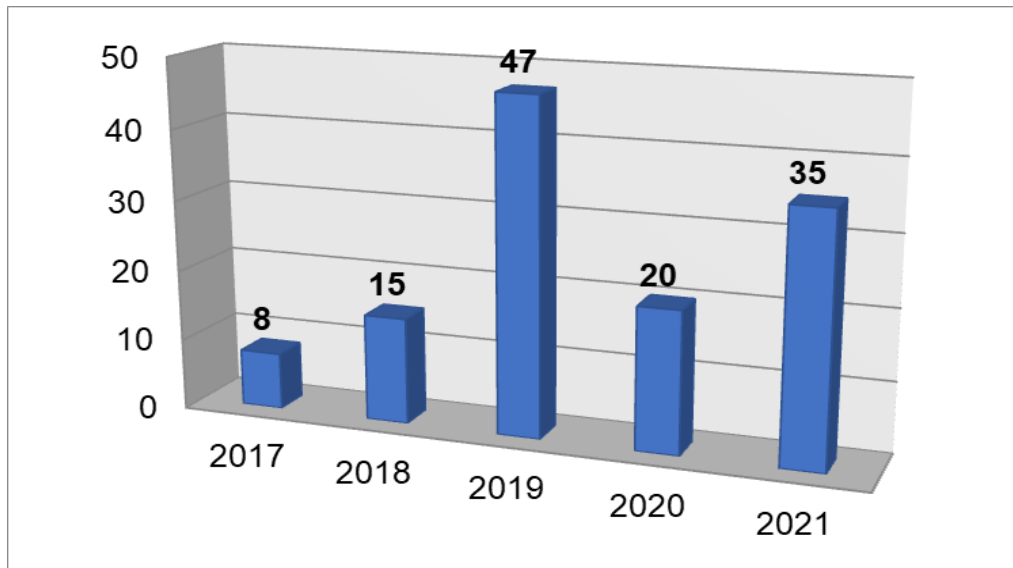
Dalam perkembangannya, tingkat perkawinan dibawah umur banyak terjadi di beberapa kabupaten / kota, salah satunya di Kabupaten Lampung Selatan. Apabila melihat dari kondisi komposisi penduduk berdasarkan umur, Kabupaten Lampung Selatan sangat berpotensi terhadap peningkatan perkawinan usia muda. Perkawinan usia muda merupakan salah satu pemicu dari adanya peningkatan kasus perceraian. Resiko dari pernikahan muda adalah rentan terjadinya perceraian karena fondasi perkawinan yang tidak kokoh. Beberapa penelitian menemukan bahwa pasangan yang menikah muda disebabkan karena faktor hamil sebelum menikah. Rumah tangga sering cecok karena perkawinan dilaksanakan tanpa persiapan yang matang, baik persiapan secara ekonomi maupun persiapan psikologi. akibatnya pasangan yang menikah muda cenderung lebih mudah untuk bercerai. Umur perkawinan pertama dipengaruhi oleh beberapa faktor sosial ekonomi diantaranya: agama,

pendidikan, tempat tinggal, pekerjaan dan faktor sosial ekonomi lainnya. Relatif rendahnya tingkat pendidikan akan berkorelasi positif terhadap usia kawin muda. Kondisi ini dapat terjadi karena beberapa faktor antara lain faktor ekonomi. Keterbatasan finansial keluarga menyebabkan anak-anak mereka tidak dapat melanjutkan sekolah ke jenjang yang lebih tinggi, disisi lain anak juga menjadi beban orang tua. Akibatnya anak akan putus sekolah dan memutuskan untuk menikah di usia muda.

5.2.2.6. Kekerasan Terhadap Anak dan Perempuan

Mengacu pada Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 pasal 48 disebutkan bahwa pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga antara lain mendapatkan perlindungan, untuk mempertahankan keutuhan, ketahanan dan kesejahteraan keluarga serta membesarkan, memelihara, merawat, mendidik, mengarahkan dan membimbing kehidupan anaknya termasuk kehidupan berkeluarga sampai dengan dewasa. Sejalan dengan hal tersebut, maka hak anak merupakan bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin dilindungi dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah dan Negara sesuai yang diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Peraturan Menteri Kementeriaan Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Nomor 13 Tahun 2020 tentang Perlindungan Perempuan dan Perlindungan Anak Dari Kekerasan Berbasis Gender Dalam Bencana. Oleh sebab itu setiap anak dan perempuan berhak memperoleh perlindungan khusus, yaitu perlindungan yang diberikan kepada anak dan perempuan dalam situasi darurat, anak yang berhadapan dengan hukum, anak dari kelompok minoritas dan terisolasi, anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual, anak yang diperdagangkan, anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkoba, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya (napza), anak korban penculikan, penjualan, perdagangan, anak korban kekerasan baik fisik dan atau mental, anak yang menyandang cacat, dan anak

korban perlakuan salah dan penelantaran serta perempuan yang mengalami kekerasan rumah tangga, pelecehan fisik.



Sumber : KemenPPA

Gambar 28. Jumlah Kasus Kekerasan terhadap anak dan perempuan Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2017-2021

Berdasarkan data dari kementerian perlindungan perempuan dan anak, kasus kekerasan anak dan perempuan di Kabupaten Lampung Selatan memiliki trend yang naik turun, dimana pada tahun 2017 hingga 2018 terjadi peningkatan 7 kasus, dimana pada tahun 2017 terdapat 8 kasus, sedangkan tahun 2018 15 kasus. Peningkatan yang cukup drastis terjadi pada tahun 2019 dimana kasus yang terjadi sebanyak 47 kasus, indikasi adanya penurunan kegiatan ekonomi akibat adanya covid-19 menjadi salah satu penyebab tingginya kasus pada tahun 2019.

Kekerasan terhadap anak dan perempuan yang ditampilkan pada grafik menjadi peringatan bagi kita semua bahwa kekerasan terhadap anak sangat rawan terjadinya disekitar lingkungan mereka. Beberapa kasus menunjukkan bahwa kejahatan seksual terhadap anak justru dilakukan oleh orang terdekat (paman, tetangga. Dan keluarga terdekat yang sudah dikenal). Lindungi anak-

anak kita melalui perwujudan Ketahanan Keluarga dan mengimplementasi 8 (delapan) fungsi Keluarga.

5.3. Permasalahan Pembangunan Keluarga

Mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lampung Selatan. Permasalahan dan Isu Strategis Daerah, terdapat program di bidang sosial yang perlu disinergikan dan salah satu diantaranya adalah urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan perlindungan Anak/P3A, dan Kepemudaan dan Olahraga. Untuk permasalahan yang terjadi di Kabupaten Ketapang ialah rendahnya keberdayaan social, belum optimalnya kesehatan reproduksi, rendahnya keberdayaan perempuan, rendahnya perlindungan terhadap perempuan dan anak, rendahnya prestasi olahraga, dan rendahnya peran serta pemuda dalam pembangunan daerah. Sesuai amanat Undang-Undang Nomor 52 tahun 2009, BKKBN sebagai lembaga yang menetapkan kebijakan Pembangunan Keluarga melalui pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga guna mewujudkan keluarga yang sejahtera, tentram, mandiri dan bahagia, dalam pelaksanaannya masih menghadapi beberapa permasalahan. Secara umum permasalahan yang dihadapi dalam Pembangunan Keluarga adalah belum optimalnya peran dan fungsi keluarga, baik fungsi ekonomi, pendidikan, maupun kesehatan. Secara khusus, permasalahan tersebut meliputi permasalahan dari sisi internal dan sisi eksternal keluarga. Permasalahan dari sisi internal keluarga antara lain adalah:

1. Penyikapan terhadap pola berkeluarga. Masih rendahnya pemahaman tentang pola keluarga yang ideal, sehingga menghambat implementasi pola keluarga ideal.
2. Pemenuhan hak dasar keluarga Masih rendahnya pemenuhan hak dasar keluarga, seperti partisipasi dalam pendidikan serta akses terhadap pelayanan kesehatan, perumahan, dan social.
3. Berkaitan dengan ketahanan keluarga
 - a. Masih rendahnya keluarga yang berpartisipasi dalam kelompok BKR, BKB, dan BKL

- b. Masih rendahnya kemampuan kelompok untuk mengembangkan kegiatan yang lebih inovatif dan kreatif
- c. Masih rendahnya kemampuan kelompok dalam memperluas dukungan dan jejaring kerja
- d. Masih relatif tingginya perkawinan usia muda (perkawinan dibawah umur 18 tahun)
- e. Masih tingginya angka perceraian

Permasalahan pembangunan keluarga dari sisi eksternal meliputi

1. Kebijakan dan program pendukung kesejahteraan keluarga yang dilakukan pemerintah, swasta dan masyarakat belum terintegrasi dan terkoordinasi secara optimal.
2. Masih rendahnya dukungan pemangku kepentingan untuk menumbuh kembangkan program Pembangunan Keluarga khususnya Program PIK R, BKR, BKB dan BKL.

Seluruh permasalahan diatas sesungguhnya bermuara pada tercapainya tujuan Pembangunan Keluarga yaitu menciptakan keluarga yang tangguh yang mampu mengatasi persoalan internal keluarnya secara mandiri dan menangkal gangguan yang berasal dari luar dengan berpegang teguh pada prinsip keluarga dan nilai-nilai keluarga dengan mengedepankan Ketakwaan dan Keimanan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Dengan demikian Pembangunan Keluarga merupakan pondasi utama dalam mewujudkan ketahanan nasional dan pilar utama dalam menjaga ideologi dan nilai-nilai luhur bangsa.

5.4. Tujuan, Sasaran, dan Strategi Kebijakan Pembangunan Keluarga

Secara khusus, tujuan dari Pembangunan Keluarga adalah untuk :

- b. Menciptakan keluarga tangguh yang mampu mengatasi persoalan internal keluarga secara mandiri
- c. Mengoptimalkan fungsi keluarga sebagai lingkungan pertama dan utama dalam mendidik, mengasuh, membina tumbuh kembang generasi penerus.

- d. Mewujudkan pembangunan manusia Indonesia secara emosional dan spiritual yang berasal dari pembangunan keluarga.
- e. Mengoptimalkan peran keluarga sebagai fondasi utama dalam mewujudkan Ketahanan Nasional dalam menjaga ideologi dan nilai-nilai luhur bangsa
 1. Sasaran dari Pembangunan Keluarga adalah seluruh keluarga yang terdiri dari keluarga dengan siklus keluarganya, keluarga yang memiliki potensi dan sumber kesejahteraan sosial, keluarga rentan secara ekonomi, sosial, lingkungan, maupun budaya, serta keluarga yang bermasalah secara sosial ekonomi dan sosial psikologis Dalam mewujudkan tujuan diatas, diperlukan strategi, yaitu:
 2. Membangun Keluarga yang bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa
 3. Membangun iklim berkeluarga berdasarkan perkawinan yang sah
 4. Membangun keluarga harmonis, sejahtera, sehat, maju dan mandiri
 5. Membangun keluarga yang berwawasan nasional dan berkontribusi kepada masyarakat, bangsa dan negara.
 6. Membangun keluarga yang mampu merencanakan sumber daya dengan pendampingan manajemen sumber daya keluarga.

5.5. Program Perkembangan Keluarga

1. Penguatan perencanaan bagi kehidupan berkeluarga baik secara fisik maupun mental.
2. Peningkatan kualitas remaja dengan pemberian akses informasi, pendidikan, konseling, dan pelayanan tentang kehidupan berkeluarga.
3. Pendampingan dan penyuluhan terhadap kelompok umur usia muda dalam urusan membangun keluarga untuk perkawinan.
4. Penurunan tingkat kekerasan terhadap anak dan perempuan.

5.6. Kondisi Yang Diinginkan Pada Pembangunan Keluarga

Kondisi yang diinginkan pada Pembangunan Keluarga adalah terwujudnya keluarga yang berkualitas, sejahtera dan berketahanan sosial, yang meliputi:

1. Keluarga yang bertakwa kepada Tuhan YME, yaitu keluarga yang berdasarkan pernikahan yang sah menurut hukum negara.
2. Keluarga sejahtera, sehat, maju, mandiri, dan harmonis yang berkeadilan dan berkesetaraan gender dengan jumlah anak yang ideal sesuai kemampuan keluarga
3. Keluarga yang berketahanan sosial, yaitu :
 - a. Keluarga yang memiliki perencanaan sumber daya keluarga
 - b. Keluarga yang berwawasan nasional yaitu keluarga yang mengembangkan kepribadian dan budaya bangsa Indonesia
 - c. Keluarga yang berkontribusi kepada masyarakat, yaitu keluarga yang mampu berperan serta dalam kegiatan sosial kemasyarakatan dan memiliki kepedulian terhadap lingkungan.
 - d. Keluarga yang berkontribusi kepada bangsa dan negara serta berpartisipasi dalam kegiatan bela negara, taat membayar pajak, patuh terhadap peraturan perundangan yang berlaku.

BAB 6

PENATAAN PERSEBARAN DAN PENGARAHAN MOBILITAS PENDUDUK

6.1. Kondisi Saat Ini

6.1.1. Persebaran atau Distribusi Penduduk

Persebaran penduduk merupakan bentuk dari penyebaran penduduk di suatu wilayah, apakah merata atau tidak. Kondisi persebarannya tersebut dapat dilihat dari kepadatan penduduk yang merupakan angka jumlah rata-rata penduduk pada setiap kilometer persegi suatu wilayah negara. Persebaran penduduk yang tidak merata antar daerah kota/kabupaten merupakan salah satu isu penting yang perlu mendapat perhatian karena dapat menjadi penghambat pembangunan. Sebaliknya, distribusi penduduk yang merata akan menyebabkan pemerataan pembangunan yang secara otomatis berimplikasi pada pencapaian kesejahteraan sosial ekonomi penduduk. Ketidakmerataan persebaran penduduk umumnya disebabkan oleh ketimpangan dan kesenjangan pembangunan antar daerah atau negara.

Pertambahan penduduk yang cepat akan berpengaruh terhadap tingkat kepadatan penduduk di suatu wilayah tersebut. Hal ini terjadi karena penduduk bertambah sedangkan ruang atau wilayah sifatnya tetap. Dengan tingkat kepadatan penduduk yang tinggi tanpa diimbangi dengan penyebaran penduduk yang merata maka akan terjadi suatu ledakan penduduk di daerah-daerah tertentu terutama di daerah yang mempunyai daya tarik yang cukup kuat baik daya tarik ekonomi, fasilitas sosial yang memadahi, jaminan keamanan, kondisi geografis yang bagus, maupun dari aspek sosial.

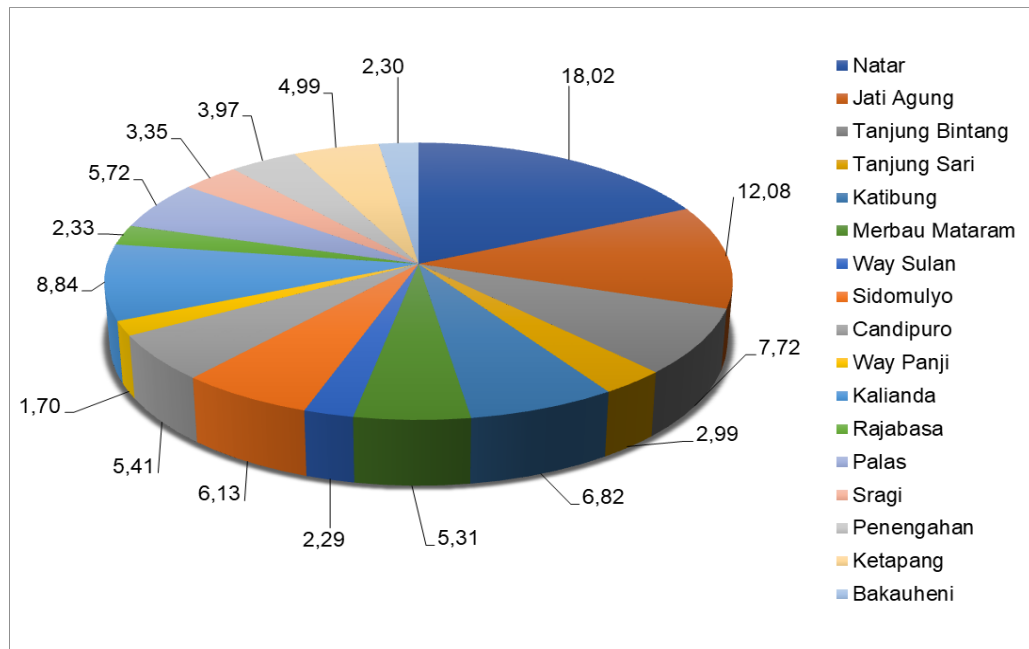
Tabel 13. Distribusi dan Kepadatan penduduk kabupaten Lampung Selatan berdasarkan kecamatan tahun 2021

No	Kecamatan	Jumlah Penduduk 2021	Luas Wilayah (Km ²)	Kepadatan Penduduk (Jiwa/Km ²)
1	Natar	193.172	250.88	770
2	Jati Agung	129.501	164.47	787
3	Tanjung Bintang	82.757	129.72	638
4	Tanjung Sari	32.044	103.32	310
5	Katibung	73.069	188.62	387
6	Merbau Mataram	56.901	113.94	499
7	Way Sulan	24.496	46.54	526
8	Sidomulyo	65.748	158.99	414
9	Candipuro	58.029	84.9	683
10	Way Panji	18.232	38.45	474
11	Kalianda	94.784	179.82	527
12	Rajabasa	25.022	100.39	249
13	Palas	61.289	165.57	370
14	Sragi	35.914	93.44	384
15	Penengahan	42.555	124.96	341
16	Ketapang	53.518	108.6	493
17	Bakauheni	24.696	57.13	432
Lampung Selatan		1.071.727	2.109.74	508

Tabel 14, menunjukkan jumlah penduduk di Kabupaten Lampung Selatan pada tahun 2021 berdasarkan kecamatan, luas wilayah masing-masing kecamatan, dan kepadatan penduduk. Berdasarkan tabel 14, Kabupaten Lampung Selatan secara administratif terdiri dari 17 kecamatan dengan luas total wilayah kabupaten seluas 2109.74 km². Jumlah penduduk tertinggi berada di Kecamatan Natar dengan penduduk sejumlah 193.172 jiwa dengan luas wilayah 250,88 km². Kabupaten Lampung Selatan pada setiap kecamatan dilihat dari distribusi penduduk distribusi 1%-5% terdapat 8 kecamatan, distribusi 5,1%-10% terdapat 7 Kecamatan sedangkan 11% > terdapat 2 Kecamatan. Dilihat dari kepadatan penduduk 17 Kecamatan rata-rata memiliki kepadatan yang tinggi untuk cakupan 1 kecamatan dimana berada pada minimal

200 Jiwa/Km² – 787 Jiwa/Km², sedangkan dilihat dari total Kabupaten memiliki kepadatan 508 Jiwa/Km².

Indikator persebaran penduduk dilihat dari nilai kepadatan penduduknya, dimana kepadatan penduduk menggambarkan jumlah penduduk dalam satu luasan wilayah. Semakin besar nilai jumlah penduduk maka nilai kepadatan juga akan semakin bertambah. Pada umumnya, suatu wilayah tumbuh lebih padat dibanding daerah lain karena didorong beberapa faktor seperti pertumbuhan alami, faktor fisiografis, ekonomi dan sosial budaya. Untuk kasus Kecamatan Natar, disinyalir penyebab utama tingginya kepadatan penduduknya disebabkan oleh berbagai faktor yaitu faktor ekonomi (tersedianya berbagai peluang dan kesempatan kerja yang lebih luas) dan faktor sosial budaya (tersedianya berbagai fasilitas pelayanan publik yang lebih memadai dan berkualitas) seperti pelayanan di bidang pendidikan, kesehatan dan lain-lain.



Sumber : BPS, Kabupaten Lampung Selatan, 2022

Gambar 29. Persentase Jumlah Penduduk berdasarkan Kecamatan di Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2022

Nilai persentase jumlah penduduk merupakan nilai yang menunjukkan persentase kontribusi jumlah penduduk yang ada di kecamatan terhadap jumlah penduduk total di kabupaten. Seperti yang termuat pada tabel xx dan gambar xx bahwa Kecamatan Natar memiliki kontribusi paling tinggi terhadap jumlah penduduk Kabupaten Lampung Selatan. Nilai 18% menunjukkan bahwa sebanyak 18% dari 100% penduduk yang ada di Kabupaten Lampung Selatan berada di Kecamatan Natar. Kecamatan Way Panji merupakan kecamatan yang memiliki sebaran penduduk terkecil di Kabupaten Lampung Selatan, artinya hanya sekitar kurang dari 2% dari total penduduk Kabupaten Lampung Selatan yang tersebar di Kecamatan Way Panji.

6.1.2. Penataan Mobilitas Penduduk

Mobilitas penduduk meliputi semua gerakan (movement) penduduk yang melintasi batas wilayah tertentu dalam periode waktu tertentu pula. Batas wilayah umumnya dipergunakan batas administrasi misalnya: provinsi, kabupaten, kecamatan, atau kelurahan. manusia melakukan mobilitas dengan suatu tujuan yaitu untuk meningkatkan kualitas hidupnya mulai dengan pemenuhan kebutuhan pangan. Dengan kata lain dapat dinyatakan bahwa seseorang akan melakukan mobilitas dengan tujuan untuk memperoleh pekerjaan atau pendapatan, dengan demikian daerah tujuan mobilitas penduduk merupakan daerah dimana terdapat peluang yang lebih besar untuk memperoleh pekerjaan yang lebih baik atau peningkatan pendapatan. Sehingga kesempatan kerja yang tersedia di suatu daerah merupakan salah satu faktor pendorong adanya mobilitas penduduk. Selanjutnya, jika kebutuhan dasarnya telah dapat terpenuhi maka mobilitas dilakukan dengan tujuan memenuhi kebutuhan sekunder, termasuk wisata.

Pengertian mobilitas penduduk adalah pergerakan penduduk dari suatu daerah ke daerah lain. Baik untuk sementara maupun untuk jangka waktu yang lama atau menetap. Apabila perpindahan bertujuan untuk menetap di daerah tujuan maka disebut migrasi, jadi migrasi dapat diartikan perpindahan

penduduk dari satu daerah ke daerah lain yang bertujuan untuk menetap. Mobilitas penduduk ada dua tipe yaitu mobilitas permanen atau yang disebut dengan migrasi dan mobilitas non permanen (sirkuler). Saat ini sedang dipersiapkan Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) tentang mobilitas penduduk baik permanen dan non permanen, akan disepakati pengertian tentang mobilitas penduduk non permanen karena penduduk sering melakukan mobilitas non permanen terutama terjadi di kota besar dan juga terhadap mahasiswa yang sedang melaksanakan studinya. Kedua tipe ini berpengaruh positif maupun negatif di daerah asal maupun di daerah tujuan. Oleh sebab itu pengendalian mobilitas perlu dilakukan agar persebaran penduduk sesuai dengan daya dukung maupun daya tampung lingkungan (daduling) baik fisik maupun sosial.

Meningkatnya pertumbuhan ekonomi merangsang penduduk suatu daerah untuk melakukan migrasi guna dapat meningkatkan pendapatan/kesejahteraan keluarga. Meningkatnya migrasi kesuatu daerah menyebabkan kebutuhan akan pemukiman/tempat tinggal akan semakin meningkat. Untuk memenuhi kebutuhan ini merangsang penduduk asli kota merubah dan mengalih fungsikan bangunannya dari non ekonomis menjadi ekonomis. Berikut adalah data mobilitas penduduk antar kecamatan di Kabupaten Lampung Selatan:

Tabel 14. Perkembangan Migrasi Kabupaten Lampung Selatan berdasarkan kecamatan tahun 2022

Kecamatan	Migrasi Keluar Laki-Laki	Migrasi Keluar Perempuan	Migrasi Keluar Total	Migrasi Masuk Laki-Laki	Migrasi Masuk Perempuan	Migrasi Masuk Total
Tanjung Bintang	1,134	1,326	2,460	698	2,375	3,073
Sragi	638	671	1,309	266	866	1,132
Ketapang	917	934	1,851	439	1,342	1,781
Bakauheni	432	454	886	198	612	810
Way Sulan	360	388	748	151	511	662
Way Panji	263	306	569	113	431	544

Kecamatan	Migrasi Keluar Laki-Laki	Migrasi Keluar Perempuan	Migrasi Keluar Total	Migrasi Masuk Laki-Laki	Migrasi Masuk Perempuan	Migrasi Masuk Total
Kalianda	1,681	2,064	3,745	713	2,817	3,530
Raja Basa	491	543	1,034	158	579	737
Palas	1,002	1,074	2,076	437	1,436	1,873
Penengahan	531	797	1,328	233	928	1,161
Katibung	1,189	1,379	2,568	522	1,747	2,269
Natar	3,310	3,544	6,854	1,643	5,986	7,629
Tanjung Sari	444	488	932	218	783	1,001
Jati Agung	1,850	2,081	3,931	1,094	3,988	5,082
Sidomulyo	1,286	1,413	2,699	455	1,885	2,340
Merbau Mataram	900	1,013	1,913	478	1,569	2,047
Candipuro	930	971	1,901	438	1,473	1,911
TOTAL	17358	19446	36804	8254	29328	37582

Sumber : BPS, Kabupaten Lampung Selatan, 2022

Apabila dilihat dari tabel 15. migrasi keluar menggambarkan jumlah penduduk yang berasal dari Kabupaten Lampung Selatan yang keluar dari kabupaten, hal ini dikarenakan beberapa faktor seperti tuntutan pekerjaan, perubahan status perkawinan, pendidikan, dan beberapa faktor lain. Banyaknya penduduk yang bermigrasi keluar Kabupaten Lampung Selatan pada tahun 2022 didominasi oleh penduduk yang berasal dari Kecamatan Natar dengan jumlah 6854 jiwa penduduk, sedangkan kecamatan yang memiliki jumlah penduduk sedikit yang bermigrasi keluar kabupaten adalah penduduk di Kecamatan Way Panji. Migrasi masuk menggambarkan keadaan penduduk yang masuk ke Kabupaten Lampung Selatan dari berbagai daerah, sama halnya dengan indikator migrasi keluar, terdapat beberapa alasan seorang penduduk untuk berpindah masuk dari kabupaten sebelumnya ke Kabupaten Lampung Selatan. Kecamatan Natar menjadi salah satu kecamatan dengan tujuan migrasi masuk tertinggi di Kabupaten Lampung Selatan, hal ini dibuktikan dengan tingginya nilai migrasi masuk Kecamatan Natar berjumlah 5082 jiwa dari berbagai daerah, baik dari dalam maupun luar Provinsi Lampung.

6.2. Intervensi

1. Distribusi penduduk antar kecamatan yang tidak merata
2. Kepadatan penduduk terendah terjadi di daerah yang luas wilayahnya besar dan lokasinya yang jauh dari perkotaan
3. Kesenjangan persebaran penduduk menyebabkan ketimpangan sosial dan ekonomi pada masyarakat antar kecamatan
4. Daerah yang relative maju menjadi penarik bagi sumber daya manusia di daerah tertinggal sehingga daerah tertinggal semakin jauh tertinggal dibanding daerah yang lebih maju.
5. Kesempatan kerja yang terbatas dan upah yang relative rendah mendorong sebagian penduduk di daerah lain

6.2.1. Strategi Intervensi

Berdasarkan kondisi dan permasalahan persebaran dan mobilitas penduduk di Kabupaten Lampung Selatan, maka terdapat beberapa intervensi yang dapat ditawarkan kepada pemerintah daerah sebagai acuan dalam upaya menangani persoalan tersebut. Bentuk intervensi yang dirumuskan disini yaitu berupa rancangan kebijakan, program dan strategi yang selanjutnya dapat diaplikasikan secara nyata di lapangan. Adapun strategi intervensi yang diperlukan untuk mengatasi berbagai permasalahan persebaran dan mobilitas penduduk yaitu sebagai berikut:

1. Membangun dan mengembangkan perekonomian terutama di daerah terpencil.
2. Mengalokasikan anggaran untuk membangun jalan yang menghubungkan jalan utama dengan jalan desa khususnya tempat sumber produksi sehingga penduduk dapat langsung membawa hasil pertanian ke pasar.

3. Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan membuat program di desa yang dapat menarik pemuda desa yang telah menyelesaikan pendidikannya untuk kembali ke desa dan terlibat dalam kegiatan tersebut.
4. Menempatkan para transmigran ke wilayah-wilayah kecamatan yang masih rendah kepadatannya dengan metode penempatan yang dibaur dengan masyarakat lokal atau berdampingan dengan pemukiman penduduk lokal dalam upaya untuk mencegah terjadinya kecemburuan sosial antar penduduk transmigran dengan penduduk asli (lokal).
5. Pemerintah kabupaten perlu mengembangkan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi lokal di setiap kecamatan berbasis potensi lokal.

6.2.2. Program Penataan Persebaran dan Mobilitas Penduduk

1. Peningkatan layanan dasar berupa infrastruktur jalan yang baik untuk perekonomian dan sosial.
2. Peningkatan Ekonomi desa dengan menjadikan desa mandiri.
3. Peningkatan komponen Indeks desa membangun untuk pemerataan segala aspek di desa baik ekonomi, sosial maupun lingkungan.
4. Peningkatan Moda transportasi Persentase pengguna moda transportasi umum di wilayah untuk aksesibilitas penduduk dalam mobilisasi.

6.3. Kondisi Yang Diinginkan

Pada masa yang akan datang diharapkan terbangun infrastruktur, fasilitas dan pelayanan publik yang merata dan lebih memadai serta berkualitas di setiap wilayah kecamatan yang ada di Kabupaten Lampung Selatan. Sektor pertanian dapat berkembang menjadi sektor unggulan yang dapat mendorong perkembangan sector industri dan jasa, termasuk pariwisata. Program pemberdayaan masyarakat terutama pemuda, karang taruna, kelompok perempuan dan ibu-ibu PKK dan kelompok lainnya dapat berjalan dan berkembang dengan baik di tingkat desa dan kecamatan. Semakin banyak jumlah pemuda dari desa yang telah menyelesaikan kuliah di kota mau kembali

dan memberi kontribusi nyata kepada desanya melalui berbagai program pembangunan desa.

Pada masa yang akan datang, distribusi penduduk antar kecamatan di Kabupaten Lampung Selatan diharapkan menjadi relative lebih merata. Daerah yang relative lebih maju, seperti Kecamatan Natar, diharapkan tidak menyebabkan daerah pada kecamatan lain yang kurang maju semakin terbelakang karena penduduk yang berpendidikan lebih tinggi lebih tertarik untuk bekerja di daerah yang lebih maju. Perekonomian di setiap wilayah/kecamatan di Kabupaten Lampung Selatan pada masa yang akan datang diharapkan lebih berkembang sehingga dapat menciptakan peluang kerja dengan jumlah yang memadai dan bervariasi, terutama bagi penduduk yang berpendidikan relative tinggi.

BAB 7

PENATAAN ADMINISTRASI PENDUDUK

7.1. Kondisi Saat Ini

7.1.1. Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Dalam pembangunan kependudukan, administrasi kependudukan sebagai suatu sistem yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari administrasi pemerintahan dan administrasi negara dalam rangka pemberian perlindungan terhadap hak-hak individu penduduk, melalui pelayanan publik dalam bentuk penerbitan dokumen kependudukan. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, yang merupakan penjabaran amanat Pasal 26 Ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945, telah mencantumkan tujuan Administrasi Kependudukan adalah mewujudkan tertib Administrasi Kependudukan serta keabsahan dan kebenaran atas Dokumen Kependudukan yang diterbitkan. Dari sisi kepentingan penduduk, Administrasi Kependudukan memberikan pemenuhan hak-hak administratif, seperti pelayanan publik serta perlindungan yang berkenaan dengan Dokumen Kependudukan untuk semua masyarakat tanpa kecuali.

Untuk mendukung pendataan penduduk tersebut telah disahkan Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan direvisi terakhir menjadi Undang Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan. Dalam UU Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, data dikelompokkan menjadi: Data Pribadi, Database, Data Kependudukan dan Data agregat.

Data kependudukan hasil pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil dijamin keamanannya dan kerahasiaannya oleh Negara antara lain dimanfaatkan untuk: pelayanan public, perencanaan pembangunan, alokasi anggaran, pembangunan demokrasi, dan penegakan hukum dan pencegahan kriminal. Adapun hak akses

atas pemanfaatan data kependudukan baik bagi petugas pada penyelenggara, instansi pelaksana, dan pengguna data kependudukan diatur pada UU Nomor 24 Tahun 2013 pasal 94, Pasal 95A, 95B dan Pasal 96.

Data kependudukan disajikan dalam skala provinsi dan skala kabupaten/kota. Data yang dipublikasikan berasal dari data kependudukan yang telah dikonsolidasikan dan dibersihkan oleh Kementerian Dalam Negeri. Data Kependudukan diterbitkan secara berkala, untuk skala nasional, skala provinsi dan kabupaten/kota diterbitkan per semester yaitu semester pertama diterbitkan tiap tanggal 30 Juni dan semester kedua diterbitkan tanggal 31 Desember setiap tahun kelender. Sehubungan dengan pembangunan database kependudukan tersebut maka Ditjen Dukcapil Kementerian Dalam Negeri berupaya menyelesaikan proses digitalisasi secara menyeluruh dalam pelayanan administrasi kependudukan. Untuk tahun 2020 di seluruh Indonesia telah diterapkan tanda tangan elektronik (TTE) pada dokumen kependudukan yang diterbitkan untuk masyarakat. Sembilan dokumen itu meliputi surat pindah, biodata, KK, akta lahir, akta mati, akta kawin, akta cerai, KIA, dan KTP-el.

Pemutakhiran dan penerbitan dokumen kependudukan menjadi sangat urgent dilakukan karena berkaitan dengan hak-hak warga negara dalam memperoleh jaminan keamanan, pelayanan publik dan kepastian hukum. Tinggi rendahnya kepemilikan dokumen kependudukan, seperti Kartu Tanda Penduduk (KTP), Akta Kelahiran, Kartu Keluarga (KK), dan sebagainya menjadi dasar untuk menilai kinerja pemerintah dalam urusan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil. Kepemilikan KTP-EL, akta kelahiran dan akta Kartu Keluarga di kabupaten Ketapang dapat dilihat pada Tabel 16:

Tabel 15. Perkembangan Persentase Penduduk yang Memiliki KTP-el, Akta Kelahiran, dan Kartu Keluarga di Kabupaten Lampung Selatan

No	Indikator	2017	2018	2019	2020	2021
1	Persentase Penerbitan KTP Elektronik	65,74	94,8	97	102	102,73
2	Persentase Penerbitan Kartu Keluarga	52,03	97,59	100	90,89	97,15
3	Persentase Penerbitan Akta Kelahiran	52,44	60,99	69	80	73,79

Sumber : *Disdukcapil, Kabupaten Lampung Selatan, 2022*

Berdasarkan tabel 16, indikator penataan administrasi kependudukan dititikberatkan kepada persentase penerbitan dokumen penting dalam urusan administrasi, hal ini guna mewujudkan masyarakat Lampung Selatan yang tertib administrasi. Persentase penerbitan KTP elektronik merupakan persentase terhadap jumlah pembuatan KTP elektronik di Kabupaten Lampung Selatan, berdasarkan data yang didapatkan, penerbitan KTP elektronik terus mengalami peningkatan yang tinggi pada tahun 2018 yaitu sebesar, 29.06% dari jumlah sebelumnya pada tahun 2017. Hal ini menjadi indikasi sadarnya masyarakat Kabupaten Lampung Selatan dalam tertib administrasi, selain itu dibuktikan dengan adanya peningkatan yang cukup konstan pada tahun-tahun berikutnya. Persentase penerbitan kartu keluarga menggambarkan jumlah atau kuantitas permintaan terhadap kartu keluarga, dimana penerbitan kartu keluarga dapat dilakukan karena beberapa faktor, antara lain: Adanya kelahiran atau kematian baru, adanya perpindahan anggota keluarga baik didalam maupun keluar lingkungan administrasi Kabupaten Lampung Selatan, adanya faktor eksternal lain.

Persentase penerbitan kartu keluarga di Kabupaten Lampung Selatan yang bersifat fluktuatif dari tahun ke tahun menandakan adanya pola mobilitas penduduk yang cenderung stabil dimana penerbitan yang cukup tinggi terjadi pada tahun 2018 dimana penerbitan pada tahun ini naik sebesar 45.56% dari penerbitan di tahun sebelumnya, pada tahun 2019, 2020, dan 2021 permintaan cenderung stabil, hal ini diindikasikan tidak ada atau stabilnya mobilitas

penduduk secara administrasi, ataupun tidak ekstremnya angka kelahiran atau kematian yang berakibat terhadap penerbitan kartu keluarga baru. Sama halnya dengan penerbitan akta kelahiran di Kabupaten Lampung Selatan dimana persentasenya mengalami peningkatan yang konstan di setiap tahunnya, hal ini menjadi indikasi adanya tertib administrasi sejak dini bagi setiap masyarakat di Kabupaten Lampung Selatan. Berikut adalah Perkembangan ketertiban administrasi pencatatan kependudukan melalui kepemilikan KTP Kabupaten Lampung Selatan:

Tabel 16. Perkembangan Jumlah Penduduk Wajib KTP Menurut Kecamatan di Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2022

No	Nama Kecamatan	Wajib KTP Sem I Tahun 2022	Pencetakan KTP -El Januari S.D Desember 2022
1	Natar	138.412	12.670
2	Tanjung Bintang	59.129	5.413
3	Kalianda	68.194	6.241
4	Sidomulyo	47.864	4.382
5	Katibung	51.362	4.702
6	Penengahan	30.619	2.805
7	Palas	44.781	4.099
8	Jati Agung	85.735	7.848
9	Ketapang	38.470	3.522
10	Sragi	26.175	2.396
11	Raja Basa	18.036	1.651
12	Candipuro	42.492	3.890
13	Merbau Mataram	40.120	3.672
14	Bakauheni	16.886	1.546
15	Tanjung Sari	23.400	2.142
16	Way Sulan	17.617	1.613
17	Way Panji	13.599	1.245
TOTAL		762.891	69.837

Sumber : Disdukcapil, Kabupaten Lampung Selatan, 2022

Wajib KTP adalah penduduk yang berusia 17 tahun keatas/secara administrasi harus memiliki KTP, sedangkan pencetakan KTP elektronik adalah jumlah dari orang yang telah melaksanakan perekaman pencetakan KTP

elektronik. Wajib KTP adalah perkiraan kasar tentang banyaknya penduduk baik yang sudah maupun belum memiliki KTP, tercatat 5 wilayah memiliki jumlah dengan kisaran yang tinggi mencapai 50.000 orang keatas, kecamatan tersebut yaitu Natar sebesar 138.412 orang, Jati Agung sebesar 85.735 orang, Kalianda sebesar 68.194 orang, Tanjung Bintang sebesar 59.129 orang dan Katibung sebesar 51.362 orang. Pada KTP elektronik orang yang telah melakukan perekaman KTP tercatat 3 wilayah memiliki jumlah kisaran yang tinggi mencapai 5.000-12.000 orang, kecamatan tersebut yaitu Natar sebesar 12.670 orang, Jati Agung sebesar 7.848 orang, Kalianda sebesar 6.241 orang dan Tanjung Bintang 5.413 orang. Ketertiban administrasi adalah langkah penting untuk membantu pemerintah memetakan dan mencatat kesahan suatu penduduk yang bertempat tinggal di wilayah tersebut, oleh sebab itu langkah ini merupakan tujuan penting.

Akta kematian adalah dokumen resmi yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang berada di wilayah yang bersangkutan. Akta kematian penting dalam proses administrasi dan hukum, serta memiliki nilai penting dalam kehidupan sehari-hari. Manfaat Akta Kematian Manfaat utama dari Akta Kematian adalah untuk memberikan bukti legal bahwa seseorang telah meninggal dunia. Akta ini digunakan untuk berbagai tujuan administrasi dan hukum, seperti: Untuk Mengajukan klaim asuransi: Dokumen ini digunakan untuk mengajukan klaim asuransi atas kematian seseorang. Tanpa Akta Kematian, klaim asuransi mungkin tidak akan diproses. Sebagai dasar Pembagian harta warisan: Akta Kematian diperlukan dalam proses pembagian harta warisan seseorang kepada ahli warisnya. Sebagai dasar Pembatalan kartu identitas: Akta Kematian juga digunakan untuk membatalkan kartu identitas atau dokumen resmi lainnya yang dimiliki oleh orang yang telah meninggal dunia. Pencatatan populasi: Akta Kematian juga digunakan untuk memperbarui catatan populasi, sehingga menghindari kebingungan dan memastikan akurasi data populasi.

Tabel 17. Perkembangan Jumlah Penduduk Cetak Akta Kematian Menurut Kecamatan di Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2022

No	Kecamatan	Cetak Akta Kematian (LK)	Cetak Akta Kematian (PR)	Cetak Akta Kematian (JML)
1	Natar	795	379	1174
2	Tanjung Bintang	292	180	472
3	Kalianda	416	221	637
4	Sidomulyo	244	142	386
5	Katibung	189	100	289
6	Penengahan	175	102	277
7	Palas	279	142	421
8	Jati Agung	382	182	564
9	Ketapang	225	117	342
10	Sragi	180	88	268
11	Raja Basa	157	83	240
12	Candipuro	240	120	360
13	Merbau Mataram	198	123	321
14	Bakauheni	99	53	152
15	Tanjung Sari	95	49	144
16	Way Sulan	95	47	142
17	Way Panji	127	71	198
	Total	4.188	2.199	6.387

Sumber : Disdukcapil, Kabupaten Lampung Selatan, 2022

Akte kematian merupakan bagaian ketertiban administrasi yang penting, merupakan indicator banyaknya jumlah kematian yang dilaporkan ke disdukcapil. Jumlah total pelaporan kecamatan paling tinggi dari total laki-laki dan perempuan adalah Kecamatan Natar sebanyak 1.174 kasus kematian telah dilaporkan ke disdukcapil, diikuti oleh Kalianda sebanyak 637 dan Jati Agung sebanyak 564. Semakin meningkatnya masyarakat membuat akta kematian yaitu disebabkan oleh semakin baiknya kesadaran masyarakat akan pentingnya dokumen kependudukan dan kemungkinan besar juga didorong oleh tujuan bisnis atau untuk pengurusan pembagian harta untuk anggota keluarga. Disisi lain disinyalir juga bahwa pengurusan taspen bagi ASN yang meninggal menjadi salah satu yang memotivasi warga membuat akta kematian. Meskipun

tidak semua diketahui pasti faktor-faktor yang mempengaruhi peningkatan kepemilikan akta tersebut, namun yang pasti dapat membantu pemutakhiran data secara reguler yang pada akhirnya mendukung terwujudnya tata administrasi kependudukan yang lebih baik.

7.2. Permasalahan dan Intervensi Penataan Administrasi Kependudukan

Rincian permasalahan administrasi kependudukan di Kabupaten Lampung Selatan secara detail dapat dilihat pada uraian dibawah ini.

1. Belum tertatanya jumlah penduduk secara maksimal.
2. Intensitas sosialisasi tentang berbagai kebijakan administrasi kependudukan belum maksimal.
3. Masih terjadi multi tafsir terhadap Undang- Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006.
4. Terbatasnya Sumber Daya Manusia dan teknologi informasi komunikasi
5. Belum adanya regulasi tentang standar kompetensi dan jenjang karier ASN pengelolaan dan perencanaan TIK.
6. Masih relatif terbatasnya sarana dan prasarana kerja serta SDM yang ada untuk mendukung pelaksanaan tugas pengelolaan administrasi kependudukan, baik sarana teknologi maupun informasi.
7. Masih adanya penduduk yang sudah menetap di luar daerah domisilinya lebih dari 1 tahun, namun yang bersangkutan tidak mau pindah, sehingga secara de facto terdata di domisili yang baru, tetapi secara de yure mereka masih terdata di daerah asalnya.
8. Kurangnya kesadaran masyarakat untuk mendukung terselenggaranya tertib administrasi kependudukan.

Adapun dari permasalahan yang ada tersebut perlunya intervensi untuk menyelesaikan permasalahan yang ada, adapun beberapa intervensi antara lain :

1. Peningkatan kesadaran masyarakat untuk mengurus dokumen kependudukan melalui pengaktifan peran ketua RT dan perangkatnya.

2. Pengembangan aplikasi adminduk yang terpadu dan merata di setiap wilayah cakupan
3. Pengoptimalan pelayanan administrasi kependudukan di setiap wilayah cakupan
4. Peningkatan ferkuensi sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat terkait dengan manfaat dan pentingnya pembuatan dan penataan data dan dokumen kependudukan dengan memperhatikan waktu yang tepat bagi masyarakat.
5. Pemanfaatan data dan dokumen adminduk secara terintegrasi dengan berbagai bentuk pelayanan publik

Disadari bahwa kunci utama dari Administrasi Kependudukan selain tata kelola dan pelayanan adalah kesadaran dari masyarakat untuk berperan aktif melaporkan peristiwa penting yang dialami sehingga secara berkelanjutan data kependudukan bersifat update. Sehingga dalam jangka panjang permasalahan tentang kurangnya kesadaran masyarakat untuk berperan aktif harus menjadi fokus perhatian secara berkelanjutan. Intinya diperlukan adanya inovasi dari semua pihak yang berkompeten dalam meningkatkan kesadaran masyarakat.

7.3. Tujuan , Sasaran, Strategi, dan Arah Kebijakan Penataan Administrasi Kependudukan

Adapun sasaran yang dituju adalah: Meningkatnya penataan administrasi kependudukan di Kabupaten Lampung Selatan. Strategi yang dilaksanakan adalah: Peningkatan sosialisasi kebijakan dan pembinaan pelaksanaan administrasi kependudukan. Adapun Arah Kebijakan yang dipertimbangkan dalam pelaksanaan tugas dari Dinas Dukcapil Kabupaten Lampung Selatan adalah: Optimalisasi sosialisasi kebijakan dan pembinaan pelaksanaan administrasi kependudukan. Optimalisasi sosialisasi kebijakan dan pelaksanaan administrasi kependudukan ini berarti juga melaksanakan konsolidasi internal maupun eksternal. Terkait dengan dasar pemikiran dan pertimbangan tersebut

maka langkah penting yang dilakukan oleh Disdukcapil adalah peningkatan kualitas tata kelola dan pelayanan secara berkelanjutan agar tercapai tertib administrasi kependudukan dengan melaksanakan program penataan administrasi kependudukan

7.4. Program Penataan Administrasi Kependudukan

Program Penataan Administrasi Kependudukan dikaitkan dengan permasalahan yang dihadapi maka dikelompokkan menjadi program yang bersifat internal dan eksternal. Program internal adalah perbaikan dan peningkatan tata kelola dan layanan dari Dinas Dukcapil Kabupaten Lampung Selatan. Sedangkan secara eksternal adalah peningkatan kesadaran dari masyarakat untuk melaporkan semua kejadian penting yang terjadi. Peningkatan tertip pencatatan pendudukan dan administrasi penduduk.

7.5. Kondisi Yang Diinginkan Pada Penataan Administrasi Kependudukan

Hasil dari pelaksanaan program yang dilakukan oleh Dinas Dukcapil Kabupaten Lampung Selatan berupa konsolidasi internal maupun eksternal. tertib adminduk, pelayanan prima adminduk, integrasi data dan informasi kependudukan ke dalam database kependudukan yang dapat diakses oleh berbagai pihak yang memerlukan dan peningkatan pemanfaatana database kependudukan sebagai DSS (*Decision Support System*) diharapkan terwujudnya Single Identity Number bagi semua warga di Kabupaten Lampung Selatan.

BAB 8

ROADMAP GDPK KABUPATEN LAMPUNG SELATAN

8.1. Roadmap Kuantitas Penduduk 2021 – 2035

Badan Pusat Statistik (BPS) telah membuat proyeksi penduduk Indonesia (2015 - 2045) dengan dasar hasil Survei Penduduk Antar Sensus Tahun 2015 (SUPAS 2015). Proyeksi ini dibuat dengan metode komponen berdasarkan asumsi tentang kecenderungan kelahiran, kematian, serta perpindahan penduduk antar provinsi yang paling mungkin terjadi selama periode 25 tahun yang akan datang. Tahapan yang dilakukan adalah menghitung proyeksi penduduk Indonesia, kemudian menghitung proyeksi penduduk per provinsi. Selanjutnya melakukan literasi dengan penduduk Indonesia sebagai patokan sehingga penjumlahan proyeksi penduduk per provinsi hasilnya sama dengan proyeksi penduduk Indonesia.

Hasil proyeksi sangat ditentukan oleh asumsi yang digunakan. Oleh karena itu, menentukan asumsi merupakan kunci perhitungan proyeksi penduduk. Biasanya asumsi mengenai kecenderungan tingkat kelahiran, tingkat kematian, serta perpindahan penduduk ditentukan oleh tren yang terjadi di masa lalu dengan memperhatikan berbagai faktor yang mempengaruhi ketiga komponen tersebut.

Berbagai sumber data digunakan untuk melihat gambaran tentang pola kelahiran, kematian, dan perpindahan di Indonesia. Untuk keperluan proyeksi ini, SP2000, dan SP2010, SUPAS2005, SUPAS 2015, SDKI 2007 dan 2012 Hal ini dilakukan dengan pertimbangan untuk mengetahui pola secara lebih tepat serta dapat menentukan angka kelahiran dan kematian yang dipakai pada tahun tertentu. Dengan demikian data yang akan dijabarkan dari masa lalu hingga perkiraan di masa yang akan datang tidak mengandung penyimpangan.

8.2. Sasaran Lima Tahun Pembangunan Kependudukan

Road Map (peta jalan) pengendalian variabel dinamika parameter kependudukan Kabupaten Lampung Selatan dari tahun 2020 – 2035 disajikan dalam tabel xx Pengendalian pada variabel dinamika kependudukan pada periode sebelumnya hingga 15 tahun ke depan berdampak pada perubahan struktur umur penduduk. Berdasarkan perkiraan komposisi umur penduduk, Kabupaten Lampung Selatan telah memasuki era bonus demografi pada periode 2020 – 2035. Era bonus demografi menjadi peluang emas (gold opportunity) bagi Kabupaten Lampung Selatan untuk meningkatkan kemajuan pembangunan melalui peningkatan kualitas SDM usia produktif yang kreatif dan inovatif. Sehingga pertumbuhan ekonomi yang berkualitas bisa dicapai guna peningkatan kesejahteraan masyarakat.

8.2.1. Rasio Ketergantungan dan Bonus Demografi

Berdasarkan hasil proyeksi penduduk pada Tabel xx. Kabupaten Lampung Selatan saat ini sedang berada pada tahapan bonus demografi dengan rasio ketergantungan kurang dari 50. Pengertian bonus demografi adalah keuntungan ekonomi yang disebabkan oleh menurunnya kelahiran jangka panjang. Bonus demografi menjadi dasar meningkatkan produktivitas dan memicu pertumbuhan ekonomi melalui pemanfaatan sumber daya manusia. Saat tingkat fertilitas (jumlah kelahiran sepanjang hidup perempuan) turun, pertumbuhan pendapatan per kapita untuk memenuhi kebutuhan dasar penduduk usia anak-anak dapat dialihkan untuk peningkatan mutu manusia sebagai modal pembangunan. Pada saat yang sama, jumlah anak yang sedikit memberi perempuan peluang masuk pasar kerja sehingga meningkatkan tabungan keluarga. Inilah fase yang disebut sebagai window of opportunity (jendela kesempatan), yaitu jika jumlah penduduk produktif yang lebih besar dapat dioptimalkan untuk mengakumulasi pertumbuhan dan perkembangan kesejahteraan secara ekonomi, maka hasil yang diperoleh dapat dimanfaatkan untuk kemajuan daerah di masa depan melalui saving yang dilakukan.

Untuk meraih keuntungan bonus demografi, ada empat prasyarat yang harus dipenuhi. Pertama, penduduk usia muda yang meledak jumlahnya itu harus mempunyai pekerjaan produktif dan bisa menabung. Kedua, tabungan rumah tangga dapat diinvestasikan untuk menciptakan lapangan kerja produktif. Ketiga, ada investasi untuk meningkatkan modal manusia agar dapat memanfaatkan momentum jendela peluang yang akan datang. Keempat, menciptakan lingkungan yang memungkinkan perempuan masuk pasar kerja. Bonus demografi adalah sebuah fenomena dimana jumlah penduduk usia produktif sangat besar, sementara usia muda semakin kecil dan usia lanjutbelum banyak.

Syaratnya untuk meraih bonus demografi adalah program Keluarga Berencana (KB) yang telah dicanangkan pemerintah tetap berjalan dan berhasil. Keberhasilan program tersebut dalam dua puluh lima tahundiperkirakan akan menggeser anak-anak dan remaja berusia dibawah 15 tahun, yang biasanya besar dan berat dibagian bawah piramida penduduk Lampung, ke penduduk usia produktif. Struktur penduduk seperti ini akan menyebabkan beban ketergantungan atau dukungan ekonomi yang harus diberikan oleh penduduk usia produktif kepada anak-anak dan lansia menjadi lebih ringan. Selain itu Lampung juga akan memiliki banyak tenaga kerja produktif yang dapat bersaing dengandaerah lain. Untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, bonus demografimerupakan peluang emas untuk mendorong penciptaan lapangan kerja.

Dengan demikian penduduk usia produktif bisa terserap di pasar kerja. Bonus demografi pada suatu sisi akan menjadi beban besar buat bangsa dan negara jika penduduk usia produktifnya tidak berkualitas, jikakualitas penduduk berusia produktif ini rendah, maka negara akan dihadapkanpada berbagai masalah yang semakin rumit, dengan rendahnya produktivitas,kualitas tenaga kerja juga ikut rendah dan pertumbuhan ekonomi lamban dandaya persaingan di pasar global juga ikut rendah. Sebaliknya, bonus ini bisa menjadi keuntungan jika penduduk usia produktif berkualitas dan mendapat pendidikan yang layak.

TUJUAN	SASARAN	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA SASARAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	KONDISI AWAL	TARGET					OPD Terkait		
					2020	2021	2022	2023	2024	2025			
SASARAN KUANTITAS PENDUDUK 2021 - 2025													
Terwujudnya kondisi penduduk yang tumbuh seimbang	1	Pengendalian Fertilitas											
			1	Menurunkan angka kelahiran (TFR) per WUS	Menurunnya tingkat fertilitas melalui penurunan TFR	Penurunan angka TFR Per WUS (Jumlah)	2.34	2.22	2.2	2.18	2.16	2.14	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
			2	Meningkatkan angka prevalensi pemakaian kontrasepsi modern	Menurunnya tingkat fertilitas melalui pemakaian kontrasepsi modern	Peningkatan pemakaian kontrasepsi modern (Jumlah)	55.42	56	57	58	59	60	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
	2	Penurunan Angka Mortalitas											
			1	Menurunkan angka kematian bayi (AKB)	Menurunnya tingkat mortalitas melalui penurunan tingkat AKB	Penurunan angka kematian bayi (Kasus)	1.23	1.2	1.19	1.15	1.1	1	Dinas Kesehatan

TUJUAN	SASARAN	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA SASARAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	KONDISI AWAL	TARGET					OPD Terkait	
					2020	2021	2022	2023	2024	2025		
SASARAN KUANTITAS PENDUDUK 2021 - 2025												
Terwujudnya kondisi penduduk yang tumbuh seimbang	1	Pengendalian Fertilitas										
		1	Menurunkan angka kelahiran (TFR) per WUS	Menurunnya tingkat fertilitas melalui penurunan TFR	Penurunan angka TFR Per WUS (Jumlah)	2.34	2.22	2.2	2.18	2.16	2.14	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
		2	Meningkatkan angka prevalensi pemakaian kontrasepsi modern	Menurunnya tingkat fertilitas melalui pemakaian kontrasepsi modern	Peningkatan pemakaian kontrasepsi modern (Jumlah)	55.42	56	57	58	59	60	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
	2	Penurunan Angka Mortalitas										
		1	Menurunkan angka kematian bayi (AKB)	Menurunnya tingkat mortalitas melalui penurunan tingkat AKB	Penurunan angka kematian bayi (Kasus)	1.23	1.2	1.19	1.15	1.1	1	Dinas Kesehatan

TUJUAN	SASARAN	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA SASARAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	KONDISI AWAL	TARGET					OPD Terkait	
					2025	2026	2027	2028	2029	2030		
SASARAN KUANTITAS PENDUDUK 2025 - 2030												
Terwujudnya masyarakat kondisi penduduk yang tumbuh seimbang sebagai prasyarat penduduk tanpa pertumbuhan Terwujudnya masyarakat kondisi penduduk yang tumbuh seimbang sebagai prasyarat penduduk tanpa pertumbuhan	1	Pengendalian Fertilitas										
		1	Menurunkan angka kelahiran (TFR) per WUS	Menurunnya tingkat fertilitas melalui penurunan TFR	Penurunan angka TFR Per WUS (Jumlah)	2.14	2.12	2.1	2.08	2.06	2.04	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
		2	Meningkatkan angka prevalensi pemakaian kontrasepsi modern	Menurunnya tingkat fertilitas melalui pemakaian kontrasepsi modern	Peningkatan pemakaian kontrasepsi modern (Jumlah)	60	61	61.2	61.5	62	62.5	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
		3	Menurunkan kebutuhan KB yang tidak terpenuhi (unmet need)	Menurunnya tingkat fertilitas melalui penurunan kebutuhan KB yang tidak terpenuhi	Penurunan kebutuhan KB yang tidak terpenuhi (Jumlah)	29	28.5	28	26	25.5	25	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
	2	Penurunan Angka Mortalitas										

TUJUAN	SASARAN		PROGRAM	INDIKATOR KINERJA SASARAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	KONDISI AWAL	TARGET					OPD Terkait	
						2025	2026	2027	2028	2029	2030		
			1	Menurunkan angka kematian bayi (AKB)	Menurunnya tingkat mortalitas melalui penurunan tingkat AKB	Penurunan angka kematian bayi (Kasus)	1	1	1	1	1	1	Dinas Kesehatan
			2	Menurunkan angka kematian ibu (AKI) per 100000 kelahiran	Menurunnya tingkat mortalitas melalui penurunan tingkat AKI	Penurunan angka kematian ibu (Kasus)	39	38	37	34	32	30	Dinas Kesehatan

TUJUAN	SASARAN	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA SASARAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	KONDISI AWAL	TARGET					OPD Terkait	
					2025	2026	2027	2028	2029	2030		
SASARAN KUANTITAS PENDUDUK 2025 - 2030												
Terwujudnya masyarakat kondisi penduduk yang tumbuh seimbang sebagai prasyarat penduduk tanpa pertumbuhan Terwujudnya masyarakat kondisi penduduk yang tumbuh seimbang sebagai prasyarat penduduk tanpa pertumbuhan	1	Pengendalian Fertilitas										
		1	Menurunkan angka kelahiran (TFR) per WUS	Menurunnya tingkat fertilitas melalui penurunan TFR	Penurunan angka TFR Per WUS (Jumlah)	2.14	2.12	2.1	2.08	2.06	2.04	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
		2	Meningkatkan angka prevalensi pemakaian kontrasepsi modern	Menurunnya tingkat fertilitas melalui pemakaian kontrasepsi modern	Peningkatan pemakaian kontrasepsi modern (Jumlah)	60	61	61.2	61.5	62	62.5	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
		3	Menurunkan kebutuhan KB yang tidak terpenuhi (unmet need)	Menurunnya tingkat fertilitas melalui penurunan kebutuhan KB yang tidak terpenuhi	Penurunan kebutuhan KB yang tidak terpenuhi (Jumlah)	29	28.5	28	26	25.5	25	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
	2	Penurunan Angka Mortalitas										
		1	Menurunkan angka kematian bayi (AKB)	Menurunnya tingkat mortalitas melalui penurunan	Penurunan angka kematian bayi (Kasus)	1	1	1	1	1	1	Dinas Kesehatan

TUJUAN	SASARAN		PROGRAM	INDIKATOR KINERJA SASARAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	KONDISI AWAL	TARGET					OPD Terkait
						2025	2026	2027	2028	2029	2030	
				tingkat AKB								
		2	Menurunkan angka kematian ibu (AKI) per 100000 kelahiran	Menurunnya tingkat mortalitas melalui penurunan tingkat AKI	Penurunan angka kematian ibu (Kasus)	39	38	37	34	32	30	Dinas Kesehatan

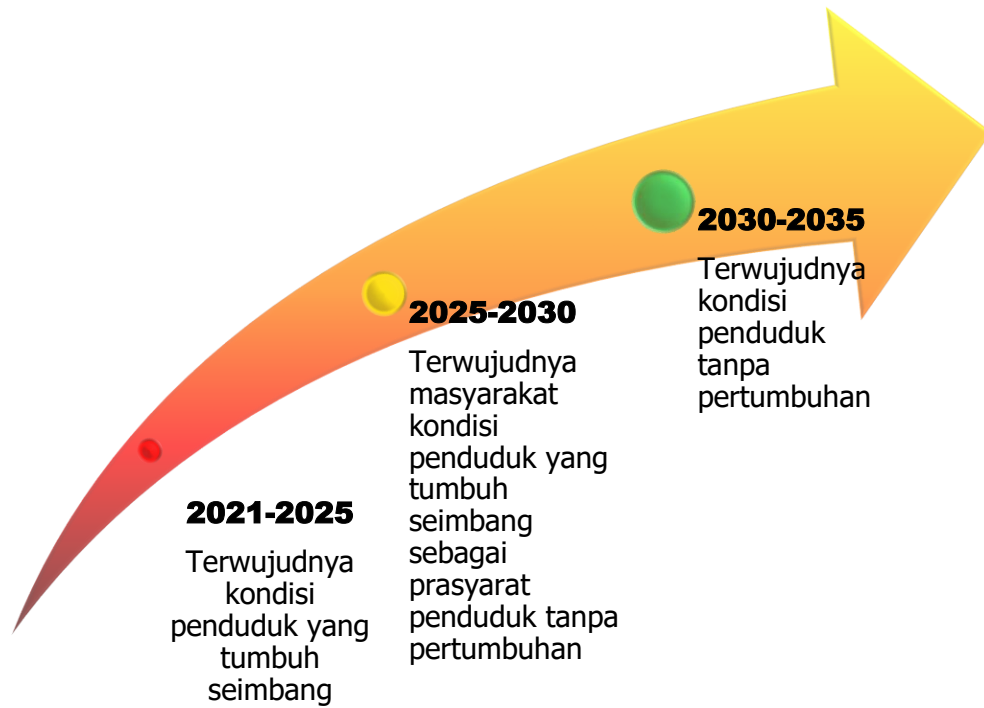
TUJUAN	SASARAN		PROGRAM	INDIKATOR KINERJA SASARAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	KONDISI AWAL	TARGET					OPD Terkait
						2030	2031	2032	2033	2034	2035	
SASARAN KUANTITAS PENDUDUK 2030-2035												
Terwujudnya kondisi penduduk tanpa pertumbuhan	1	Pengendalian Fertilitas										
			1	Menurunkan angka kelahiran (TFR) per WUS	Menurunnya tingkat fertilitas melalui penurunan TFR	Penurunan angka TFR Per WUS (Jumlah)	2.14	2.12	2.1	2.08	2.06	2.04

TUJUAN	SASARAN		PROGRAM	INDIKATOR KINERJA SASARAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	KONDISI AWAL	TARGET					OPD Terkait
						2030	2031	2032	2033	2034	2035	
		2	Meningkatkan angka prevalensi pemakaian kontrasepsi modern	Menurunnya tingkat fertilitas melalui pemakaian kontrasepsi modern	Peningkatan pemakaian kontrasepsi modern (Jumlah)	60	61	61.2	61.5	62	62.5	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
		3	Menurunkan kebutuhan KB yang tidak terpenuhi (unmet need)	Menurunnya tingkat fertilitas melalui penurunan kebutuhan KB yang tidak terpenuhi	Penurunan kebutuhan KB yang tidak terpenuhi (Jumlah)	29	28.5	28	26	25.5	25	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
		4	Meningkatkan peserta KB Aktif yang menggunakan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	Menurunnya tingkat fertilitas melalui peningkatan penggunaan kontrasepsi jangka panjang	Peningkatan pemakaian kontrasepsi jangka panjang (Jumlah)	70	100	120	150	170	180	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2	Penurunan Angka Mortalitas											

TUJUAN	SASARAN		PROGRAM	INDIKATOR KINERJA SASARAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	KONDISI AWAL	TARGET					OPD Terkait	
						2030	2031	2032	2033	2034	2035		
			1	Menurunkan angka kematian bayi (AKB)	Menurunnya tingkat mortalitas melalui penurunan tingkat AKB	Penurunan angka kematian bayi (Kasus)	1	1	1	1	1	1	Dinas Kesehatan
			2	Menurunkan angka kematian ibu (AKI) per 100000 kelahiran	Menurunnya tingkat mortalitas melalui penurunan tingkat AKI	Penurunan angka kematian ibu (Kasus)	30	30	29	27	25	20	Dinas Kesehatan

TUJUAN	SASARAN	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA SASARAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	KONDISI AWAL	TARGET					OPD Terkait	
					2030	2031	2032	2033	2034	2035		
SASARAN KUANTITAS PENDUDUK 2030-2035												
Terwujudnya kondisi penduduk tanpa pertumbuhan	1	Pengendalian Fertilitas										
		1	Menurunkan angka kelahiran (TFR) per WUS	Menurunnya tingkat fertilitas melalui penurunan TFR	Penurunan angka TFR Per WUS (Jumlah)	2.14	2.12	2.1	2.08	2.06	2.04	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
		2	Meningkatkan angka prevalensi pemakaian kontrasepsi modern	Menurunnya tingkat fertilitas melalui pemakaian kontrasepsi modern	Peningkatan pemakaian kontrasepsi modern (Jumlah)	60	61	61.2	61.5	62	62.5	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
		3	Menurunkan kebutuhan KB yang tidak terpenuhi (unmet need)	Menurunnya tingkat fertilitas melalui penurunan kebutuhan KB yang tidak terpenuhi	Penurunan kebutuhan KB yang tidak terpenuhi (Jumlah)	29	28.5	28	26	25.5	25	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

TUJUAN	SASARAN		PROGRAM	INDIKATOR KINERJA SASARAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	KONDISI AWAL	TARGET					OPD Terkait	
						2030	2031	2032	2033	2034	2035		
			4	Meningkatkan peserta KB Aktif yang menggunakan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	Menurunnya tingkat fertilitas melalui peningkatan penggunaan kontrasepsi jangka panjang	Peningkatan pemakaian kontrasepsi jangka panjang (Jumlah)	70	100	120	150	170	180	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
	2	Penurunan Angka Mortalitas											
			1	Menurunkan angka kematian bayi (AKB)	Menurunnya tingkat mortalitas melalui penurunan tingkat AKB	Penurunan angka kematian bayi (Kasus)	1	1	1	1	1	1	Dinas Kesehatan
			2	Menurunkan angka kematian ibu (AKI) per 100000 kelahiran	Menurunnya tingkat mortalitas melalui penurunan tingkat AKI	Penurunan angka kematian ibu (Kasus)	30	30	29	27	25	20	Dinas Kesehatan



Gambar 30. Road Map Kuantitas Penduduk Tahun 2021 – 2035

Tabel 18. Roadmap Kualitas Penduduk 2021-2035

TUJUAN	SASARAN	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA SASARAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	KONDISI AWAL	TARGET					OPD Terkait	
					2020	2021	2022	2023	2024	2025		
SASARAN KUALITAS PENDUDUK 2021 - 2025												
Terwujudnya masyarakat yang sehat secara jasmani dan rohani, cerdas dan berkualitas, produktif dan kompeten, inovatif dan sejahtera	Dimensi Pendidikan											
	1	Peningkatan Angka Partisipasi Murni Untuk Semua Jenjang Pendidikan										
			1	Meningkatkan Angka Partisipasi Murni jenjang SD/MI/Sederajat	Meningkatnya APM melalui peningkatan APM jenjang SD/MI/Sederajat	Peningkatan APM pada jenjang SD/MI/Sederajat (Jumlah)	98.46	98.8	99.06	99.36	99.7	99.96
		2	Meningkatkan Angka Partisipasi Murni jenjang SMP/MTs/Sederajat	Meningkatnya APM melalui peningkatan APM jenjang SMP/MTs/Sederajat	Peningkatan APM pada jenjang SMP/MTs/Sederajat (Jumlah)	78.77	79.1	79.37	79.67	80	80.27	Dinas Pendidikan

TUJUAN	SASARAN		PROGRAM	INDIKATOR KINERJA SASARAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	KONDISI AWAL	TARGET					OPD Terkait
						2020	2021	2022	2023	2024	2025	
		3	Meningkatkan Angka Partisipasi Murni jenjang SMA/MA/Sederajat	Meningkatnya APM melalui peningkatan APM jenjang SMA/MA/Sederajat	Peningkatan APM pada jenjang SMA/MA/Sederajat (Jumlah)	54.74	55	55.34	55.64	55.9	56.24	Dinas Pendidikan
	2	Peningkatan Angka Kasar Untuk Semua Jenjang Pendidikan										
		1	Meningkatkan Angka Partisipasi Kasar (APK) jenjang SD/MI/Sederajat	Meningkatnya APK melalui peningkatan APM jenjang SD/MI/Sederajat	Peningkatan APK pada jenjang SD/MI/Sederajat (Jumlah)	102.92	103	103.5	103.8	104	104.4	Dinas Pendidikan
		2	Meningkatkan Angka Partisipasi Kasar (APK) jenjang SMP/MTs/Sederajat	Meningkatnya APK melalui peningkatan APM jenjang SMP/MTs/Sederajat	Peningkatan APK pada jenjang SMP/MTs/Sederajat (Jumlah)	93.01	93.3	93.61	93.91	94.2	94.51	Dinas Pendidikan

TUJUAN	SASARAN		PROGRAM	INDIKATOR KINERJA SASARAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	KONDISI AWAL	TARGET					OPD Terkait
						2020	2021	2022	2023	2024	2025	
		3	Meningkatkan Angka Partisipasi Kasar (APK) jenjang SMA/MA/Sederajat	Meningkatnya APK melalui peningkatan APM jenjang SMA/MA/Sederajat	Peningkatan APK pada jenjang SMA/MA/Sederajat (Jumlah)	76.17	76.5	76.77	77.07	77.4	77.67	Dinas Pendidikan
Dimensi Kesehatan												
	1	Penanganan, Penyuluhan, dan Pencegahan Terhadap Segala Penyakit Menular										
		1	Menurunnya Prevalensi HIV/AIDS dari Total Populasi	Menurunnya Penyakit Menular melalui penurunan prevalensi HIV/AIDS	Penurunan Prevalensi HIV/AIDS dari total populasi (Kasus)	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	Dinas Kesehatan
		2	Menurunnya insiden TBC per 100.000 penduduk	Menurunnya Penyakit Menular melalui penurunan insiden TBC	Penurunan insiden TBC per 100.000 penduduk (Kasus)	227	200	180	170	150	130	Dinas Kesehatan
	2	Penanganan Prevalensi Kekurangan Gizi										

TUJUAN	SASARAN		PROGRAM	INDIKATOR KINERJA SASARAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	KONDISI AWAL	TARGET					OPD Terkait
						2020	2021	2022	2023	2024	2025	
		1	Menurunnya prevalensi kekurangan gizi pada anak balita	Menurunnya angka prevalensi kekurangan gizi pada anak balita	Penurunan prevalensi kekurangan gizi pada anak balita (Kasus)	0.004	0	0.004	0.003	0	0.003	Dinas Kesehatan
Dimensi Ekonomi												
	1	Penanganan Tingginya Angka Kemiskinan										
		1	Menurunnya tingkat kemiskinan ekstrem	Menurunnya angka kemiskinan melalui penurunan tingkat kemiskinan ekstrem	Penurunan persentase tingkat kemiskinan ekstrem (Persen)	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda)

TUJUAN	SASARAN		PROGRAM	INDIKATOR KINERJA SASARAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	KONDISI AWAL	TARGET					OPD Terkait
						2020	2021	2022	2023	2024	2025	
			2	Menurunnya penduduk miskin	Menurunnya angka kemiskinan melalui penurunan persentase penduduk miskin	14	13.5	12	12.5	12	11.5	Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda)

TUJUAN	SASARAN		PROGRAM	INDIKATOR KINERJA SASARAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	KONDISI AWAL	TARGET					OPD Terkait
						2025	2026	2027	2028	2029	2030	
SASARAN KUALITAS PENDUDUK 2025 - 2030												
Terwujudnya masyarakat yang sehat secara jasmani dan rohani, cerdas dan berkualitas, kreatif dan inovatif untuk	Dimensi Pendidikan											
	1	Peningkatan Angka Partisipasi Murni Untuk Semua Jenjang Pendidikan										
			1	Meningkatkan Angka Partisipasi Murni jenjang SD/MI/Sederajat	Meningkatnya APM melalui peningkatan APM jenjang SD/MI/Sederajat	Peningkatan APM pada jenjang SD/MI/Sederajat (Jumlah)	99.6	99.6	99.7	99.7	99.7	99.7

TUJUAN	SASARAN		PROGRAM	INDIKATOR KINERJA SASARAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	KONDISI AWAL	TARGET					OPD Terkait	
						2025	2026	2027	2028	2029	2030		
meningkatkan kerja produktif dan kompeten untuk mandiri serta berdaya saing		2	Meningkatkan Angka Partisipasi Murni jenjang SMP/MTs/Sederajat	Meningkatnya APM melalui peningkatan APM jenjang SMP/MTs/Sederajat	Peningkatan APM pada jenjang SMP/MTs/Sederajat (Jumlah)	80.27	81	81.5	82	83	84	Dinas Pendidikan	
		3	Meningkatkan Angka Partisipasi Murni jenjang SMA/MA/Sederajat	Meningkatnya APM melalui peningkatan APM jenjang SMA/MA/Sederajat	Peningkatan APM pada jenjang SMA/MA/Sederajat (Jumlah)	56.24	57	57	58	59	60	Dinas Pendidikan	
	2	Peningkatan Angka Kasar Untuk Semua Jenjang Pendiidkan											
		1	Meningkatkan Angka Partisipasi Kasar (APK) jenjang SD/MI/Sederajat	Meningkatnya APK melalui peningkatan APM jenjang SD/MI/Sederajat	Peningkatan APK pada jenjang SD/MI/Sederajat (Jumlah)	104.42	105	110	115	117	118	Dinas Pendidikan	

TUJUAN	SASARAN		PROGRAM	INDIKATOR KINERJA SASARAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	KONDISI AWAL	TARGET					OPD Terkait
						2025	2026	2027	2028	2029	2030	
		2	Meningkatkan Angka Partisipasi Kasar (APK) jenjang SMP/MTs/Sederajat	Meningkatnya APK melalui peningkatan APM jenjang SMP/MTs/Sederajat	Peningkatan APK pada jenjang SMP/MTs/Sederajat (Jumlah)	94.51	95	96	97	97.5	99	Dinas Pendidikan
		3	Meningkatkan Angka Partisipasi Kasar (APK) jenjang SMA/MA/Sederajat	Meningkatnya APK melalui peningkatan APM jenjang SMA/MA/Sederajat	Peningkatan APK pada jenjang SMA/MA/Sederajat (Jumlah)	77.67	79	85	90	91	95	Dinas Pendidikan
Dimensi Kesehatan												
	1	Penanganan, Penyuluhan, dan Pencegahan Terhadap Segala Penyakit Menular										
		1	Menurunnya Prevalensi HIV/AIDS dari Total Populasi	Menurunnya Penyakit Menular melalui penurunan prevalensi HIV/AIDS	Penurunan Prevalensi HIV/AIDS dari total populasi (Kasus)	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	Dinas Kesehatan

TUJUAN	SASARAN		PROGRAM	INDIKATOR KINERJA SASARAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	KONDISI AWAL	TARGET					OPD Terkait
						2025	2026	2027	2028	2029	2030	
		2	Menurunnya insiden TBC per 100.000 penduduk	Menurunnya Penyakit Menular melalui penurunan insiden TBC	Penurunan insiden TBC per 100.000 penduduk (Kasus)	130	120	110	105	100	99	Dinas Kesehatan
	2	Penanganan Prevalensi Kekurangan Gizi										
		1	Menurunnya prevalensi kekurangan gizi pada anak balita	Menurunnya angka prevalensi kekurangan gizi pada anak balita	Penurunan prevalensi kekurangan gizi pada anak balita (Kasus)	0.003	0	0.003	0.003	0	0.002	Dinas Kesehatan
	Dimensi Ekonomi											
	1	Penanganan Tingginya Angka Kemiskinan										
		1	Menurunnya tingkat kemiskinan ekstrem	Menurunnya angka kemiskinan melalui penurunan tingkat kemiskinan ekstrem	Penurunan persentase tingkat kemiskinan ekstrem (Persen)	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda)

TUJUAN	SASARAN		PROGRAM	INDIKATOR KINERJA SASARAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	KONDISI AWAL	TARGET					OPD Terkait	
						2025	2026	2027	2028	2029	2030		
			2	Menurunnya penduduk miskin	Menurunnya angka kemiskinan melalui penurunan persentase penduduk miskin	Penurunan persentase penduduk miskin (Persen)	11.5	11.5	11	10.5	10	10	Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda)
	2	Peningkatan Pendapatan Daerah											
			1	Meningkatnya PDRB Per-Kapita Sektoral Lapangan Usaha	Meningkatnya pendapatan daerah melalui peningkatan PDRB Per-Kapita	Peningkatan PDRB Per-Kapita Sektoral Lapangan Usaha (Juta Rupiah)	47.44	49.4	51.44	55	57.4	59	Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda)

TUJUAN	SASARAN	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA SASARAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	KONDISI AWAL	TARGET					OPD Terkait		
					2030	2031	2032	2033	2034	2035			
SASARAN KUALITAS PENDUDUK 2030 - 2035													
Terwujudnya kualitas penduduk yang beriman, maju, mandiri, berdaya saing, mapan, dan berkeadilan dalam kebhinekaan	Dimensi Pendidikan												
	1	Peningkatan Angka Partisipasi Murni Untuk Semua Jenjang Pendidikan											
			1	Meningkatkan Angka Partisipasi Murni jenjang SD/MI/Sederajat	Meningkatnya APM melalui peningkatan APM jenjang SD/MI/Sederajat	Peningkatan APM pada jenjang SD/MI/Sederajat (Jumlah)	99.7	99.7	99.8	99.8	99.9	100	Dinas Pendidikan
			2	Meningkatkan Angka Partisipasi Murni jenjang SMP/MTs/Sederajat	Meningkatnya APM melalui peningkatan APM jenjang SMP/MTs/Sederajat	Peningkatan APM pada jenjang SMP/MTs/Sederajat (Jumlah)	84	84.5	85	87	88	89	Dinas Pendidikan
			3	Meningkatkan Angka Partisipasi Murni jenjang SMA/MA/Sederajat	Meningkatnya APM melalui peningkatan APM jenjang SMA/MA/Sederajat	Peningkatan APM pada jenjang SMA/MA/Sederajat (Jumlah)	60	62	62.5	65	67	70	Dinas Pendidikan
2	Peningkatan Angka Kasar Untuk Semua Jenjang Pendidikan												

TUJUAN	SASARAN		PROGRAM	INDIKATOR KINERJA SASARAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	KONDISI AWAL	TARGET					OPD Terkait
						2030	2031	2032	2033	2034	2035	
		1	Meningkatkan Angka Partisipasi Kasar (APK) jenjang SD/MI/Sederajat	Meningkatnya APK melalui peningkatan APM jenjang SD/MI/Sederajat	Peningkatan APK pada jenjang SD/MI/Sederajat (Jumlah)	118	120	125	135	140	150	Dinas Pendidikan
		2	Meningkatkan Angka Partisipasi Kasar (APK) jenjang SMP/MTs/Sederajat	Meningkatnya APK melalui peningkatan APM jenjang SMP/MTs/Sederajat	Peningkatan APK pada jenjang SMP/MTs/Sederajat (Jumlah)	99.5	100	120	140	145	150	Dinas Pendidikan
		3	Meningkatkan Angka Partisipasi Kasar (APK) jenjang SMA/MA/Sederajat	Meningkatnya APK melalui peningkatan APM jenjang SMA/MA/Sederajat	Peningkatan APK pada jenjang SMA/MA/Sederajat (Jumlah)	95	98	100	120	130	140	Dinas Pendidikan
Dimensi Kesehatan												
1	Penanganan, Penyuluhan, dan Pencegahan Terhadap Segala Penyakit Menular											

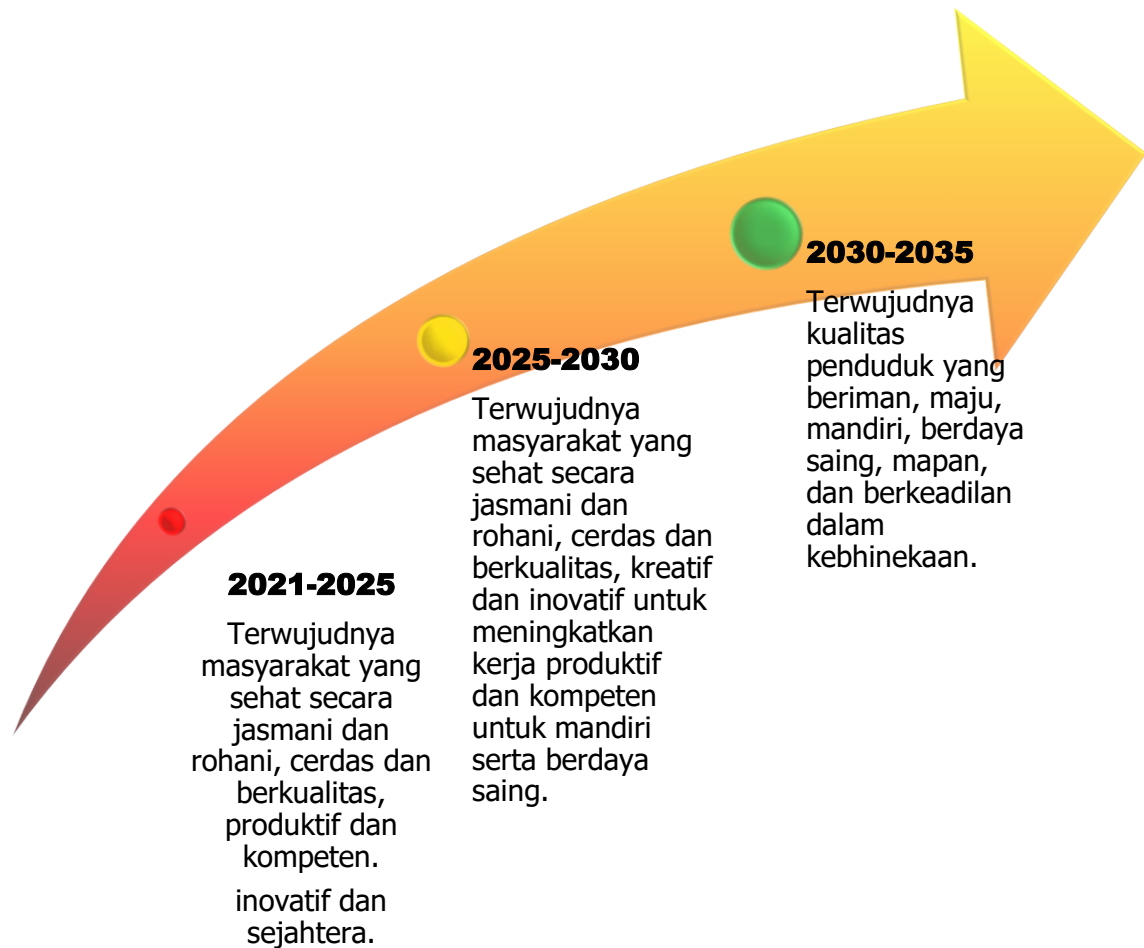
TUJUAN	SASARAN		PROGRAM	INDIKATOR KINERJA SASARAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	KONDISI AWAL	TARGET					OPD Terkait
						2030	2031	2032	2033	2034	2035	
		1	Menurunnya Prevalensi HIV/AIDS dari Total Populasi	Menurunnya Penyakit Menular melalui penurunan prevalensi HIV/AIDS	Penurunan Prevalensi HIV/AIDS dari total populasi (Kasus)	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	Dinas Kesehatan
		2	Menurunnya insiden TBC per 100.000 penduduk	Menurunnya Penyakit Menular melalui penurunan insiden TBC	Penurunan insiden TBC per 100.000 penduduk (Kasus)	99	95	90	90	80	70	Dinas Kesehatan
	2	Penanganan Prevalensi Kekurangan Gizi										
		1	Menurunnya prevalensi kekurangan gizi pada anak balita	Menurunnya angka prevalensi kekurangan gizi pada anak balita	Penurunan prevalensi kekurangan gizi pada anak balita (Kasus)	0.002	0	0.002	0.002	0	0.002	Dinas Kesehatan
	Dimensi Ekonomi											
	1	Penanganan Tingginya Angka Kemiskinan										

TUJUAN	SASARAN		PROGRAM	INDIKATOR KINERJA SASARAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	KONDISI AWAL	TARGET					OPD Terkait
						2030	2031	2032	2033	2034	2035	
		1	Menurunnya tingkat kemiskinan ekstrem	Menurunnya angka kemiskinan melalui penurunan tingkat kemiskinan ekstrem	Penurunan persentase tingkat kemiskinan ekstrem (Persen)	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda)
		2	Menurunnya penduduk miskin	Menurunnya angka kemiskinan melalui penurunan persentase penduduk miskin	Penurunan persentase penduduk miskin (Persen)	10	9.5	9.5	9	9	9	Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda)
	2	Peningkatan Pendapatan Daerah										

TUJUAN	SASARAN		PROGRAM	INDIKATOR KINERJA SASARAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	KONDISI AWAL	TARGET					OPD Terkait
						2030	2031	2032	2033	2034	2035	
		1	Meningkatnya PDRB Per-Kapita Sektoral Lapangan Usaha	Meningkatnya pendapatan daerah melalui peningkatan PDRB Per-Kapita	Peningkatan PDRB Per-Kapita Sektoral Lapangan Usaha (Juta Rupiah)	59	60	62.45	64	67	69	Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda)

Tabel 19. Road Map Kualitas Penduduk Tahun 2021 – 2035 Kabupaten Lampung Selatan

No	Periode	Capaian
1	2021-2025	Terwujudnya masyarakat yang sehat secara jasmani dan rohani, cerdas dan berkualitas, produktif dan kompeten. inovatif dan sejahtera
2	2025-2030	Terwujudnya masyarakat yang sehat secara jasmani dan rohani, cerdas dan berkualitas, kreatif dan inovatif untuk meningkatkan kerja produktif dan kompeten untuk mandiri serta berdaya saing.
3	2030-2035	Terwujudnya kualitas penduduk yang beriman, maju, mandiri, berdaya saing, mapan, dan berkeadilan dalam kebhinekaan.



Gambar 31. Road Map Kualitas Penduduk Tahun 2021 – 2035

Tabel 20. Roadmap Pembangunan Keluarga Tahun 2021-2035

TUJUAN	SASARAN	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA SASARAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	KONDISI AWAL	TARGET					OPD Terkait	
					2020	2021	2022	2023	2024	2025		
SASARAN PEMBANGUNAN KELUARGA 2021 - 2025												
Membangun kualitas keluarga dengan berlandaskan perkawinan sah dengan ketaatan kepada Tuhan YME	1	Penguatan Perencanaan Bagi Kehidupan Berkeluarga Baik Secara Fisik Maupun Mental										
		1	Meningkatkan keaktifan program penyiapan kehidupan keluarga bagi remaja pada masing-masing kecamatan	Meningkatnya penguatan kehidupan berkeluarga melalui PKBR	Peningkatan persentase kegiatan PKBR pada masing-masing kecamatan	100	100	100	100	100	100	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

TUJUAN	SASARAN		PROGRAM	INDIKATOR KINERJA SASARAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	KONDISI AWAL	TARGET					OPD Terkait	
						2020	2021	2022	2023	2024	2025		
			2	Meningkatkan pengetahuan dan kualitas remaja terhadap informasi berkeluarga	Meningkatnya penguatan kehidupan berkeluarga melalui peningkatan kualitas remaja	Peningkatan persentase kegiatan BKR pada masing-masing kecamatan	100	100	100	100	100	100	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

TUJUAN	SASARAN		PROGRAM	INDIKATOR KINERJA SASARAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	KONDISI AWAL	TARGET					OPD Terkait
						2020	2021	2022	2023	2024	2025	
SASARAN PEMBANGUNAN KELUARGA 2021 - 2025												
Membangun kualitas keluarga dengan berlandaskan perkawinan sah dengan ketaatan kepada Tuhan YME	1	Penguatan Perencanaan Bagi Kehidupan Berkeluarga Baik Secara Fisik Maupun Mental										
			1	Meningkatkan keaktifan program penyiapan kehidupan keluarga bagi remaja pada masing-masing kecamatan	Meningkatnya penguatan kehidupan berkeluarga melalui PKBR	Peningkatan persentase kegiatan PKBR pada masing-masing kecamatan	100	100	100	100	100	100

			2	Meningkatkan pengetahuan dan kualitas remaja terhadap informasi berkeluarga	Meningkatnya penguatan kehidupan berkeluarga melalui peningkatan kualitas remaja	Peningkatan persentase kegiatan BKR pada masing-masing kecamatan	100	100	100	100	100	100	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
--	--	--	---	---	--	--	-----	-----	-----	-----	-----	-----	--

TUJUAN	SASARAN	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA SASARAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	KONDISI AWAL	TARGET						OPD Terkait
					2025	2026	2027	2028	2029	2030		
SASARAN PEMBANGUNAN KELUARGA 2025 - 2030												
Membangun keluarga yang sehat secara jasmani dan rohani, cerdas dan berkualitas, serta mandiri dengan jumlah anak ideal dalam keharmonisan	1	Penguatan Perencanaan Bagi Kehidupan Berkeluarga Baik Secara Fisik Maupun Mental										
		1	Meningkatkan keaktifan program penyiapan kehidupan keluarga bagi remaja pada masing-masing kecamatan	Meningkatnya penguatan kehidupan berkeluarga melalui PKBR	Peningkatan persentase kegiatan PKBR pada masing-masing kecamatan	100	100	100	100	100	100	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

TUJUAN	SASARAN		PROGRAM	INDIKATOR KINERJA SASARAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	KONDISI AWAL	TARGET					OPD Terkait
						2025	2026	2027	2028	2029	2030	
		2	Meningkatkan pengetahuan dan kualitas remaja terhadap informasi berkeluarga	Meningkatnya penguatan kehidupan berkeluarga melalui peningkatan kualitas remaja	Peningkatan persentase kegiatan BKR pada masing-masing kecamatan	100	100	100	100	100	100	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
	2	Penurunan Angka Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak										
		1	Meningkatkan persentase penanganan KDRT pada perempuan dan anak	Menurunnya angka kekerasan terhadap perempuan dan anak melalui peningkatan penanganan KDRT	Peningkatan persentase penanganan KDRT	100	100	100	100	100	100	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

TUJUAN	SASARAN	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA SASARAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	KONDISI AWAL	TARGET					OPD Terkait	
					2025	2026	2027	2028	2029	2030		
SASARAN PEMBANGUNAN KELUARGA 2025 - 2030												
Membangun keluarga yang sehat secara jasmani dan rohani, cerdas dan berkualitas, serta mandiri dengan jumlah anak ideal dalam keharmonisan	1	Penguatan Perencanaan Bagi Kehidupan Berkeluarga Baik Secara Fisik Maupun Mental										
		1	Meningkatkan keaktifan program penyiapan kehidupan keluarga bagi remaja pada masing-masing kecamatan	Meningkatnya penguatan kehidupan berkeluarga melalui PKBR	Peningkatan persentase kegiatan PKBR pada masing-masing kecamatan	100	100	100	100	100	100	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
		2	Meningkatkan pengetahuan dan kualitas remaja terhadap informasi berkeluarga	Meningkatnya penguatan kehidupan berkeluarga melalui peningkatan kualitas remaja	Peningkatan persentase kegiatan BKR pada masing-masing kecamatan	100	100	100	100	100	100	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
	2	Penurunan Angka Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak										

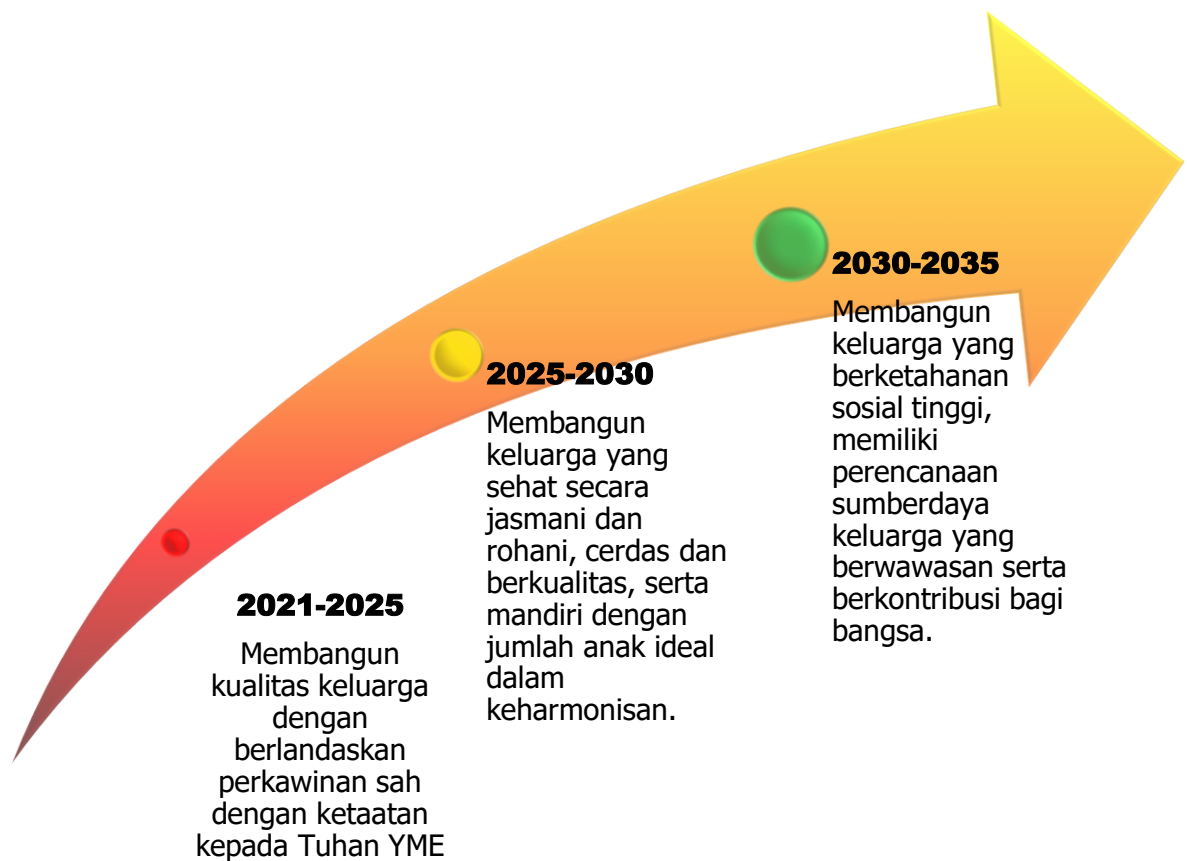
TUJUAN	SASARAN	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA SASARAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	KONDISI AWAL	TARGET					OPD Terkait	
					2025	2026	2027	2028	2029	2030		
		1	Meningkatkan persentase penanganan KDRT pada perempuan dan anak	Menurunnya angka kekerasan terhadap perempuan dan anak melalui peningkatan penanganan KDRT	Peningkatan persentase penanganan KDRT	100	100	100	100	100	100	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

TUJUAN	SASARAN	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA SASARAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	KONDISI AWAL	TARGET					OPD Terkait	
					2030	2031	2032	2033	2034	2035		
SASARAN PEMBANGUNAN KELUARGA 2030 - 2035												
Membangun keluarga yang berketahanan	1	Penguatan Perencanaan Bagi Kehidupan Berkeluarga Baik Secara Fisik Maupun Mental										

TUJUAN	SASARAN		PROGRAM	INDIKATOR KINERJA SASARAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	KONDISI AWAL	TARGET					OPD Terkait
						2030	2031	2032	2033	2034	2035	
sosial tinggi, memiliki perencanaan sumberdaya keluarga yang berwawasan serta berkontribusi bagi bangsa.		1	Meningkatkan keaktifan program penyiapan kehidupan keluarga bagi remaja pada masing-masing kecamatan	Meningkatnya penguatan kehidupan berkeluarga melalui PKBR	Peningkatan persentase kegiatan PKBR pada masing-masing kecamatan	100	100	100	100	100	100	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
		2	Meningkatkan pengetahuan dan kualitas remaja terhadap informasi berkeluarga	Meningkatnya penguatan kehidupan berkeluarga melalui peningkatan kualitas remaja	Peningkatan persentase kegiatan BKR pada masing-masing kecamatan	100	100	100	100	100	100	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
	2	Penurunan Angka Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak										

TUJUAN	SASARAN		PROGRAM	INDIKATOR KINERJA SASARAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	KONDISI AWAL	TARGET					OPD Terkait
						2030	2031	2032	2033	2034	2035	
		1	Meningkatkan persentase penanganan KDRT pada perempuan dan anak	Menurunnya angka kekerasan terhadap perempuan dan anak melalui peningkatan penanganan KDRT	Peningkatan persentase penanganan KDRT	100	100	100	100	100	100	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
	3	Penurunan Angka Perceraian Pada Keluarga Kelompok Usia Muda										
		1	Meningkatkan pendampingan dan penyuluhan bagi keluarga pada usia kelompok muda	Menurunnya angka perceraian pada keluarga kelompok usia muda melalui peningkatan pendampingan dan penyuluhan	Peningkatan persentase perceraian dapat diatasi	100	100	100	100	100	100	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Penyusunan Roadmap Pembangunan Keluarga dilakukan untuk mencapai kondisi keluarga yang harmonis, sejahtera dan damai, yang siap menghadapi perubahan-perubahan yang sangat cepat. Sedangkan ketahanan keluarga diharapkan dapat menjadi sandaran bagi kelangsungan berkehidupan yang aman, damai dan sejahtera. Adapun Roadmap Pembangunan Keluarga untuk setiap periode dapat dilihat pada gambar berikut:



Gambar 32. Road Map Pembangunan Keluarga Tahun 2021 – 2035

Tabel 21. Roadmap Penataan dan Pengarahan Mobilitas Penduduk

TUJUAN	SASARAN	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA SASARAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	KONDISI AWAL	TARGET					OPD Terkait	
					2020	2021	2022	2023	2024	2025		
SASARAN PENATAAN DAN PENGARAHAN MOBILITAS PENDUDUK 2020 - 2025												
Penambahan dan perbaikan infrastruktur, fasilitas dan pelayanan sosial, ekonomi secara merata di setiap kecamatan	1	Peningkatan layanan dasar berupa infrastruktur jalan yang baik untuk perekonomian dan sosial										
		1	Meningkatkan penyediaan jalan mantap di setiap kecamatan	Meningkatnya layanan dasar infrastruktur melalui peningkatan jalan mantap di setiap kecamatan	Peningkatan persentase kondisi jalan mantap	67	75	78	80	82	85	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
	2	Peningkatan ekonomi desa										
		1	Menurunkan jumlah desa tertinggal	Meningkatnya perekonomian desa melalui penurunan jumlah desa tertinggal	Penurunan persentase desa tertinggal	73	70	68	65	63	60	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa

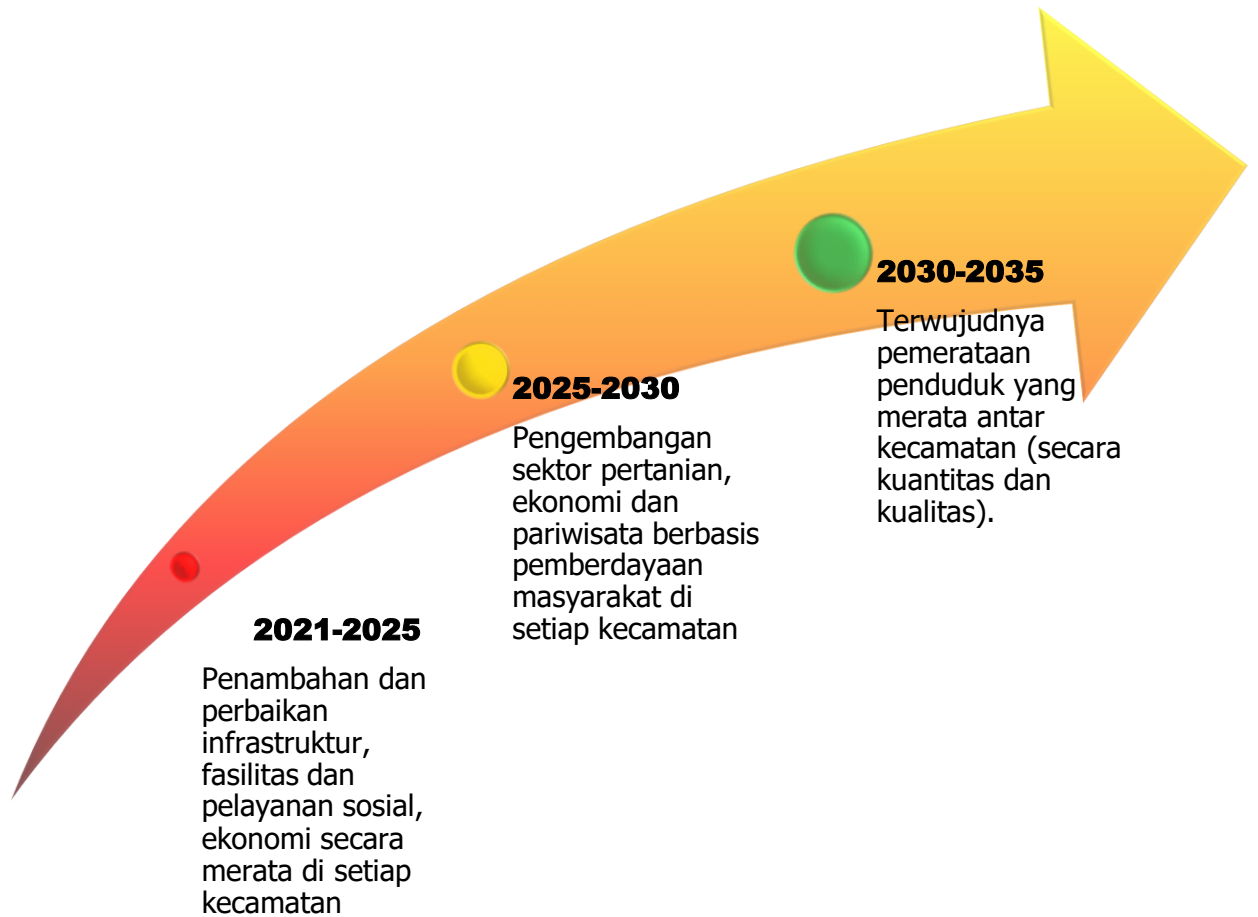
TUJUAN	SASARAN	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA SASARAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	KONDISI AWAL	TARGET					OPD Terkait	
					2025	2026	2027	2028	2029	2030		
SASARAN PENATAAN DAN PENGARAHAN MOBILITAS PENDUDUK 2025 - 2030												
Penambahan dan perbaikan infrastruktur, fasilitas dan pelayanan sosial, ekonomi secara merata di setiap kecamatan	1	Peningkatan layanan dasar berupa infrastruktur jalan yang baik untuk perekonomian dan sosial										
		1	Meningkatkan penyediaan jalan mantap di setiap kecamatan	Meningkatnya layanan dasar infrastruktur melalui peningkatan jalan mantap di setiap kecamatan	Peningkatan persentase kondisi jalan mantap	85	87	89	90	91	93	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
	2	Peningkatan ekonomi desa										
		1	Menurunkan jumlah desa tertinggal	Meningkatnya perekonomian desa melalui penurunan jumlah desa tertinggal	Penurunan persentase desa tertinggal	60	58	55	52	51	50	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa
	3	Peningkatan akses mobilisasi										

TUJUAN	SASARAN		PROGRAM	INDIKATOR KINERJA SASARAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	KONDISI AWAL	TARGET					OPD Terkait
						2025	2026	2027	2028	2029	2030	
		1	Meningkatkan moda transportasi umum di wilayah	Meningkatnya akses mobilisasi melalui peningkatan moda transportasi umum	Peningkatan persentase pengguna moda transportasi umum	100	100	100	100	100	100	Dinas Perhubungan

TUJUAN	SASARAN		PROGRAM	INDIKATOR KINERJA SASARAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	KONDISI AWAL	TARGET					OPD Terkait
						2030	2031	2032	2033	2034	2035	
SASARAN PENATAAN DAN PENGARAHAN MOBILITAS PENDUDUK 2025 - 2030												
Terwujudnya pemerataan penduduk yang merata antar	1		Peningkatan layanan dasar berupa infrastruktur jalan yang baik untuk perekonomian dan sosial									

TUJUAN	SASARAN		PROGRAM	INDIKATOR KINERJA SASARAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	KONDISI AWAL	TARGET					OPD Terkait	
						2030	2031	2032	2033	2034	2035		
kecamatan (secara kuantitas dan kualitas)			1	Meningkatkan penyediaan jalan mantap di setiap kecamatan	Meningkatnya layanan dasar infrastruktur melalui peningkatan jalan mantap di setiap kecamatan	Peningkatan persentase kondisi jalan mantap	93	94	95	96	97	100	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
	2	Peningkatan ekonomi desa											
			1	Menurunkan jumlah desa tertinggal	Meningkatnya perekonomian desa melalui penurunan jumlah desa tertinggal	Penurunan persentase desa tertinggal	50	48	47	46	45	40	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa
	3	Peningkatan akses mobilisasi											

TUJUAN	SASARAN		PROGRAM	INDIKATOR KINERJA SASARAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	KONDISI AWAL	TARGET					OPD Terkait
						2030	2031	2032	2033	2034	2035	
			1 Meningkatkan moda transportasi umum di wilayah	Meningkatnya akses mobilisasi melalui peningkatan moda transportasi umum	Peningkatan persentase pengguna moda transportasi umum	100	100	100	100	100	100	Dinas Perhubungan



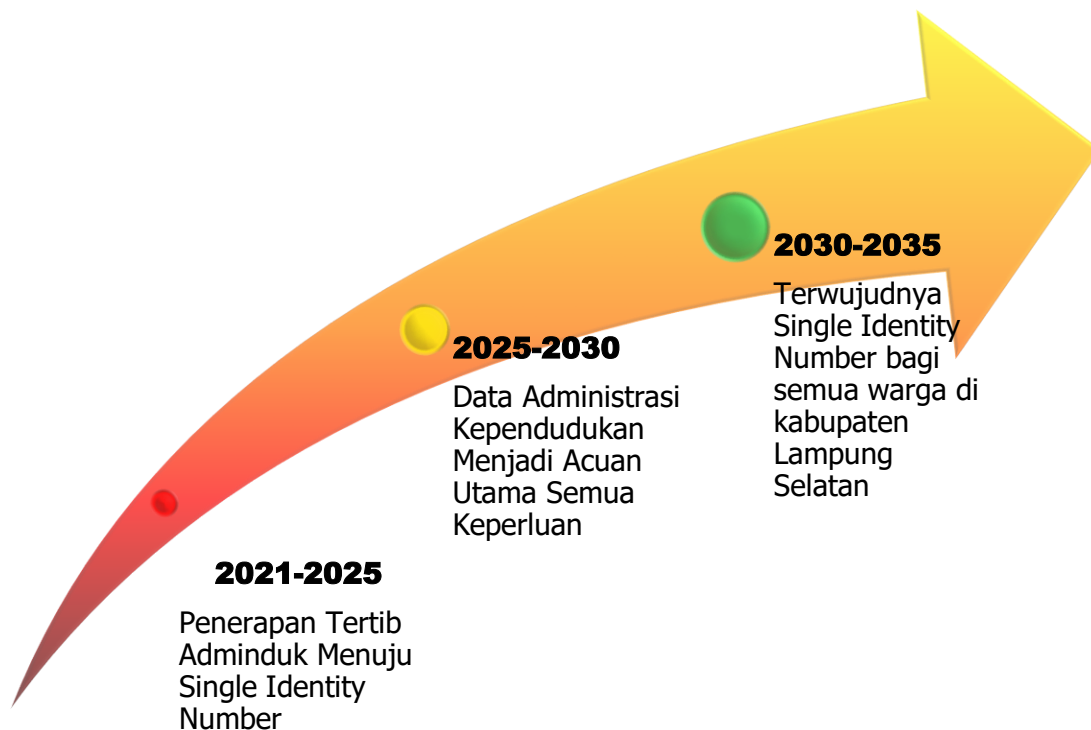
Gambar 33. Road Map Penataan dan Pengarahan Mobilitas Penduduk Tahun 2021 – 2035

Tabel 22. Roadmap Perbaikan dan Peningkatan Tata Kelola dan Layanan Administrasi Kependudukan

TUJUAN	SASARAN	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA SASARAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	KONDISI AWAL	TARGET					OPD Terkait		
					2020	2021	2022	2023	2024	2025			
SASARAN PERBAIKAN DAN PENINGKATAN TATA KELOLA LAYANAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN 2020 - 2025													
Penerapan Tertib Adminduk Menuju Single Identity Number	1	Penataan Administrasi Kependudukan											
			1	Meningkatkan pelayanan pencetakan KTP elektronik	Tertatanya administrasi kependudukan dengan peningkatan pelayanan pencetakan KTP elektronik	Peningkatan persentase pencetakan KTP Elektronik	50	55	59	62	64	65	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
			2	Meningkatkan jumlah pencetakan akta kelahiran per kelahiran bayi	Tertatanya administrasi kependudukan dengan meningkatnya kelahiran yang dicatat dalam akta kelahiran	Peningkatan cakupan pencetakan akta kelahiran	49000	50100	50600	51000	51700	52000	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil

TUJUAN	SASARAN	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA SASARAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	KONDISI AWAL	TARGET					OPD Terkait	
					2025	2026	2027	2028	2029	2030		
SASARAN PERBAIKAN DAN PENINGKATAN TATA KELOLA LAYANAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN 2025 - 2030												
Data Administrasi Kependudukan Menjadi Acuan Utama Semua Keperluan	1	Penataan Administrasi Kependudukan										
		1	Meningkatkan pelayanan pencetakan KTP elektronik	Tertatanya administrasi kependudukan dengan peningkatan pelayanan pencetakan KTP elektronik	Peningkatan persentase pencetakan KTP Elektronik	65	66	69	70	72	75	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
		2	Meningkatkan jumlah pencetakan akta kelahiran per kelahiran bayi	Tertatanya administrasi kependudukan dengan meningkatnya kelahiran yang dicatat dalam akta kelahiran	Peningkatan cakupan pencetakan akta kelahiran	53000	54000	54100	55000	57000	58000	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil

TUJUAN	SASARAN	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA SASARAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	KONDISI AWAL	TARGET					OPD Terkait	
					2030	2031	2032	2033	2034	2035		
SASARAN PERBAIKAN DAN PENINGKATAN TATA KELOLA LAYANAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN 2030 - 2035												
Terwujudnya Single Identity Number bagi semua warga di kabupaten Lampung Selatan	1	Penataan Administrasi Kependudukan										
		1	Meningkatkan pelayanan pencetakan KTP elektronik	Tertatanya administrasi kependudukan dengan peningkatan pelayanan pencetakan KTP elektronik	Peningkatan persentase pencetakan KTP Elektronik	75	80	83	85	87	90	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
		2	Meningkatkan jumlah pencetakan akta kelahiran per kelahiran bayi	Tertatanya administrasi kependudukan dengan meningkatnya kelahiran yang dicatat dalam akta kelahiran	Peningkatan cakupan pencetakan akta kelahiran	58000	58500	59000	59100	59500	60000	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil



Gambar 34. Road Map Perbaikan dan Peningkatan Tata Kelola dan Layanan Administrasi Kependudukan Tahun 2021 – 2035

8.3. Keterkaitan GDPK dengan RPJMD

Keterkaitan antara GDPK dengan RPJMD merujuk pada indikator pembangunan yang dituangkan dalam Permendagri no 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Indikator kependudukan yang terkait dengan RPJMD adalah sebagai berikut :

a. Aspek Kesejahteraan Masyarakat

Pada aspek kesejahteraan ini, indicator kependudukan yang terkait adalah

1. Persentase penduduk di bawah garis kemiskinan;
2. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)
3. Angka Melek Huruf (AMH)
4. Angka Rata rata Lama Sekolah (RLS)
5. Usia Harapan Hidup (UHH)
6. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)
6. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)
7. Keluarga Pra KS dan KS 1

b. Aspek Daya Saing Daerah

Pada aspek kesejahteraan ini, indicator kependudukan yang terkait adalah :

1. Rasio Ketergantungan
2. Persentase KTP-elektronik
3. Cakupan Akte Kelahiran

PENUTUP

Kebijakan pembangunan pada hakekatnya dimaksudkan untuk mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan (sustainable development) yaitu kebijakan pembangunan untuk meningkatkan kesejahteraan penduduk saat ini, dan sekaligus juga mempertimbangkan kesejahteraan penduduk di masa mendatang. Penduduk adalah titik sentral pembangunan, karena di samping sebagai subyek (pelaku) pembangunan, penduduk sekaligus adalah obyek (penikmat) hasil pembangunan. Oleh Kebijakan pembangunan untuk meningkatkan taraf hidup penduduk saat ini tidak boleh mengorbankan kesejahteraan penduduk generasi mendatang.

Menyadari pentingnya masalah kependudukan ini dalam pembangunan maka pada tahun 2009 telah diterbitkan Undang-Undang Nomor 52 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga. Sebagai tindak lanjut dari terbitnya undang-undang ini, pemerintah memandang perlu membuat Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) yang mencakup lima aspek, yaitu: kuantitas, kualitas, mobilitas, data-base, serta keluarga. Diharapkan GDPK ini dapat memberikan arah kebijakan bagi perencanaan dan pelaksanaan pembangunan kependudukan di bidang pengendalian kuantitas. Di samping itu, GDPK ini hendaknya digunakan menjadi acuan bagi penyusunan “road map” pembangunan kependudukan dan sekaligus menjadi pedoman bagi pemerintah daerah dalam perencanaan pembangunan yang berwawasan kependudukan.

Dengan demikian, apa yang tertuang dalam Grand Design Pembangunan Kependudukan ini mempunyai keterkaitan yang erat dan menjadi salah satu acuan untuk bidang kependudukan dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang dirumuskan setiap lima tahun sesuai tahapan rencana pembangunan.